



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**Buku Panduan**  
**KKKN** 2022  
Kuliah Kerja Nyata

**“ UNISDA Berkontribusi,  
Desa BERGERAK Mandiri**

**BUKU PANDUAN  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN 2022  
“Unisda Berkontribusi, Desa Bergerak Mandiri”**

Tim Penyusun:

Dr. Ali Shodikin, M.Pd.

Ahmad Sholikin, S.I.P., M.A.

Siti Shoimah, S.AB., M.AB.

Martha Laila Arisandra, S.E., M.M.

Daniar Sofeny, M.Pd.

Dinita Rahmalia, M.Si.

All right reserved ©2022

*Hak cipta dilindungi undang-undang*

Diterbitkan oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM (UNISDA)**

Jalan Airlangga No. 3 Sukodadi –Lamongan 62253

Telp. (0322) 390497 Fax. 390929

E-mail: [humas@unisda.ac.id](mailto:humas@unisda.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT karena atas rahmat-Nya, Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, pengamal dan penyiari ajaran-ajarannya.

Sejak Universitas Islam Darul Ulum menerjunkan KKN angkatan yang pertama sampai pada tahun terakhir 2021, keberadaannya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lokasi KKN karena partisipasi aktif peserta KKN dalam membantu program pembangunan. Demikian pula, mahasiswa telah mampu memetik manfaatnya dalam pengembangan potensi dirinya. Begitu pula Unisda mendapat masukan yang sangat berarti dalam upaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari tri dharma perguruan tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat oleh Unisda adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh mahasiswa baik melalui pendidikan dan pengajaran maupun penelitian ilmiah kepada masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk mengabdikan dalam menunaikan misi Unisda.

Agar KKN ini memperoleh hasil yang optimal, Panitia KKN 2022 Unisda Lamongan bekerja keras mencari alternatif-alternatif yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama, survey lokasi, pemetaan potensi desa, penyusunan rancangan program kerja, rancangan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan merumuskannya dalam Buku Panduan KKN ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa peserta KKN, dosen pembimbing, dan panitia pelaksana dalam mewujudkan keberhasilan KKN yang sangat kita dambakan.

Kami menyadari penyusunan Buku Panduan KKN ini, belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang

konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku pedoman ini pada pelaksanaan tahun mendatang. Atas kerjasama kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan KKN 2022 dapat bermanfaat.

Lamongan, 12 Juli 2022  
Tim Penyusun



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM  
LAMONGAN

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 032/U/A.5/VI/2022/SK

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN  
TAHUN 2022

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rohmat Allah SWT. Rektor Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, setelah :

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Unisda adalah perguruan tinggi yang memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kehidupan kampus dan masyarakat.  
2. Bahwa salah satu pola strategis implementatif Tri Dharma perguruan Tinggi dalam kehidupan kampus dan masyarakat adalah dilaksanakannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh mahasiswa.  
3. Bahwa berdasarkan diktum 1 dan 2 diatas dipandang perlu diterbitkan surat keputusan ini.

**MENGINGAT** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas  
2. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Kepmendiknas No : 45/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi  
6. Buku Pedoman akademik dan Kemahasiswaan UNISDA Lamongan

**MEMPERHATIKAN** : Kalender Akademik UNISDA Lamongan Tahun Akademik 2021/2022.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : 1. Nama-nama yang tercantun dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana KKN tahun 2022  
2. Panitia dalam melaksanakan tugasnya hendaknya berpedoman pada Ketentuan yang berlaku dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISDA Lamongan  
3. Panitia secara berkala menyampaikan laporan kepada Penanggungjawab mengenai semua kegiatan yang dilaksanakan.  
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



di : Lamongan  
tanggal : 17 Juni 2022

Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M.

Lampiran SK. Rektor Unisda Lamongan

Nomor : 032 /U/A.5/VI/2022

Tanggal : 17 Juni 2022

Tentang : PANITIA PELAKSANA KKN UNISDA TAHUN 2022

Penanggungjawab	: Rektor UNISDA Lamongan
Konsultan	: 1. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama 3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama
Ketua	: Dr. Sauqi Futaqi, M.Pd.I (LPPM)
Wakil Ketua	: Moh. Azus Shony Azar, S.E., M.M. (LPPM)
Sekretaris	: Nurwingsyah Rohmaningtyas, S.H.I., M.SEI. (LPPM)
Bendahara	: Eni Widyatiningsih, S.E. (BAUK)
Wakil Sekretaris	: Eva Nur Laily Rohmah, S.IP., M.IP (LPPM)

#### SEKSI-SEKSI

##### a. Bidang Diklat

1. Dr. Ali Shodikin, M.Pd. (LPPM - Koordinator)
2. Ahmad Sholikin, S.I.P., M.A. (FISIP)
3. Siti Shoimah, S.AB., M.AB. (FE)

##### b. Bid. Evaluasi dan Pengumpulan Data

1. Martha Laila Arisandra, S.E.M.M (FE - Koordinator)
2. Daniar Sofeny, M.Pd. (FKIP)
3. Dinita Rahmalia, M.Si. (FMIPA)

##### c. Bidang Humas dan Lapangan

1. Moh. Hudi, S.H, M.H (FH - Koordinator )
2. Ahmad Munir Hamid, S.E, M. SEI (FAI)
3. Agus Setiawan, S.T., M.T. (FT)

##### d. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

1. Halimur Rosyid, S.Sos., M.IP. (FISIP)
2. Miftahul Huda, M.Pd. (FKIP)
3. Dian Eka Kusumawati, S.P., M.P. (FP)



Jember, 17 Juni 2022

Tanggal 17 Juni 2022

Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Surat Keputusan Tentang Pelaksana KKN .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Pemikiran dan Tema .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Esensi Kuliah Kerja Nyata .....	4
D. Tujuan .....	7
E. Manfaat .....	8
F. Status KKN .....	9
G. Prinsip Dasar dan Pelaksanaan .....	9
<b>BAB II PENGELOLA KKN .....</b>	<b>12</b>
A. Organisasi Pelaksana.....	12
B. Lembaga Pengelola dan Tugas.....	12
<b>BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN KKN .....</b>	<b>20</b>
A. Bidang Kegiatan KKN.....	20
B. Penjelasan Fokus Branding Desa.....	21
C. Sifat Kegiatan Mahasiswa dalam Program KKN.....	106
D. Jenis Kegiatan dan Alokasi Waktu dalam Program KKN ...	106
E. Pendanaan.....	108
F. Sosialisasi .....	108
G. Kerjasama .....	108
H. Tata Tertib Peserta KKN.....	109
I. Tahapan Kegiatan KKN .....	113
<b>BAB IV PERSIAPAN KKN.....</b>	<b>114</b>
A. Pembentukan Panitia KKN .....	114
B. Survei Lokasi KKN .....	114
C. Sosialisasi Internal .....	114
D. Perizinan .....	114

E. Pendaftaran Peserta KKN .....	115
F. Jadwal Kegiatan.....	116
G. Penempatan Peserta dan DPL KKN .....	117
H. Kelengkapan Administrasi .....	117
<b>BAB V PENDIDIKAN/PELATIHAN, SURVEI, DAN</b>	
<b>PROGRAM KERJA .....</b>	<b>118</b>
A. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan .....	119
B. Materi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan .....	119
C. Ketentuan dalam Pendidikan dan Pelatihan.....	119
D. Survei Lokasi Peserta KKN .....	120
E. Penyusunan Program Kerja.....	121
F. Lokakarya Program Kerja .....	122
<b>BAB VI PELAKSANAAN KKN .....</b>	<b>124</b>
A. Pemberangkatan Mahasiswa KKN.....	124
B. Penerimaan Mahasiswa KKN .....	124
C. Sosialisasi Program Kerja KKN .....	125
D. Pelaksanaan Program Kerja KKN .....	125
E. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN .....	126
<b>BAB VII PELAPORAN DAN PENILAIAN .....</b>	<b>127</b>
A. Pelaporan.....	127
B. Penilaian .....	131
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Peta Lokasi .....	136
2. Format Laporan Kelompok KKN.....	138
3. Format Program Kerja Unggulan .....	141
4. Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat .....	150



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran dan Tema

#### 1. Dasar Pemikiran

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu program wajib dalam jenjang pendidikan tinggi. KKN lahir dari dasar pemikiran bahwa mahasiswa adalah calon sarjana sebagai penerus pembangunan bangsa yang harus dapat memecahkan beragam masalah di lingkungan masyarakat. Dinamika pembangunan dalam masyarakat sangat kompleks dan perlu penanggulangan secara komprehensif. Perlu adanya persiapan atau pendidikan yang melatih para mahasiswa sebagai penerus pembangunan untuk bekerja secara interdisipliner dan menanggulangi permasalahan sesuai dengan kompetensi *hard skills* dan *soft skills*-nya.

Seiring dengan kompleksitas masalah yang ada di masyarakat, diperlukan program-program yang tepat sasaran sesuai dengan analisis kebutuhan berbasis data. Hal ini dimaksudkan, program-program yang dirancang dan dijalankan memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, proses pemilihan program-program KKN diharapkan akan lebih efektif dan efisien dalam memecahkan masalah yang ada. Selain itu, program-program KKN ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi masyarakat untuk bergerak mengembangkan desanya. Program-program yang telah dirancang dan dirintis, juga diharapkan dapat diteruskan oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan, sehingga menjadi kebiasaan untuk menjadi budaya.

Sebagai salah satu kegiatan pengabdian pada masyarakat, program KKN menuntut mahasiswa untuk dapat mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya guna memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh

masyarakat lokasi KKN dan memberikan solusi alternatif sebagai penyelesaiannya secara ilmiah dan praktis. Dengan kata lain, melalui KKN mahasiswa membantu pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, pendidikan, penelitian dan aplikasi pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Perguruan tinggi harus menjadi jembatan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan kebutuhan masyarakat. Di samping harus membina, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tersebut perguruan tinggi seharusnya juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan perguruan tinggi oleh masyarakat sudah sewajarnya dan seharusnya sudah dibina dan dilakukan pada waktu mahasiswa masih dalam proses belajar di perguruan tinggi. Dengan demikian para calon sarjana tersebut akan memperoleh pengalaman yang lengkap baik yang diperoleh dari bangku kuliah, laboratorium, buku maupun yang diperoleh dari pengalaman langsung dalam masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi yang ada di provinsi Jawa Timur, maka Universitas Islam Darul 'Ulum (UNISDA) Lamongan terpanggil untuk berkontribusi memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), UNISDA Lamongan merumuskan kegiatan KKN yang terjadwal secara akademik di UNISDA Lamongan.

KKN mempunyai empat sasaran yaitu mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah. Mahasiswa akan memperoleh pendalaman pengertian dan penghayatan terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat desa serta mencoba belajar dan memecahkan masalah tersebut dengan berpikir dan bekerja secara interdisipliner sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Mahasiswa diharapkan menjadi motivator dan fasilitator dari usaha-usaha pembangunan yang pada saat sekarang sedang giat dilakukan

terutama di daerah pedesaan. Perguruan tinggi akan memperoleh masukan-masukan yang berharga bagi pengembangan kurikulum yang benar-benar sesuai dengan cita-cita pembangunan. Masyarakat memperoleh pengetahuan baru berupa pemikiran-pemikiran yang dapat membantu proses perubahan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Di samping itu, masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dengan kehadiran mahasiswa peserta KKN karena mereka dapat memberikan solusi alternatif penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara ilmiah dan praktis. Sementara itu, Pemerintah di tempat lokasi KKN juga akan mendapatkan partner yang bisa diajak bekerjasama dalam proses pembangunan di daerah setempat. Karena salah satu kendala yang sering dihadapi Pemerintah adalah masalah komunikasi dan pemahaman terhadap upaya-upaya dalam proses pembangunan. Kehadiran mahasiswa di daerah akan membantu pemerintah dalam mengkomunikasikan program-program yang sedang maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Karena itu, Universitas Islam Darul Ulum dalam tahun ini melaksanakan program KKN di Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk mengembangkan dan membantu masyarakat Lamongan dan sekitarnya.

## 2. Tema

Tema KKN Unisda Lamongan tahun 2022 ini adalah “UNISDA Berkontribusi, Desa BERGERAK Mandiri” .

### **B. Dasar Hukum**

Yang menjadi dasar hukum kegiatan KKN Unisda Lamongan adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kurikulum Kerangka Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/199/2020 tanggal 12 Maret 2020;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan UNISDA Lamongan;

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan bahwa *“Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”*. Selain itu, pada pasal 24 ayat 2 juga disebutkan bahwa *“Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat”*.

### **C. Esensi Kuliah Kerja Nyata**

Esensi KKN dalam rangkaian aktivitas akademik menjadi salah satu bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan melakukan interelasi langsung dinamika kehidupan masyarakat.

KKN merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa dan civitas akademica melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan saja menjadi kesempatan mahasiswa belajar

dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat sehingga memberikan warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif.

KKN merupakan mata kuliah wajib, yang tercantum dalam kurikulum Unisda Lamongan dan harus ditempuh oleh semua mahasiswa program strata satu (S1). Mata kuliah KKN disiapkan dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman riil di masyarakat. Dengan pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan mendapatkan kemampuan generatif berupa *life skills* (kecakapan hidup) seperti kemampuan berpikir dan bernalar secara analitis berdasarkan sumber empiris dan realistis agar dapat merancang dan melaksanakan program, membantu mengatasi permasalahan yang ada, bekerja sama dengan orang lain, mengatur diri sendiri, dan melatih keterampilan dalam bekerja. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam bermasyarakat sebagai nilai tambah selama menempuh kuliah di Unisda Lamongan.

Pada prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi sebagai upaya menerapkan ilmu yang diperoleh dan hasil-hasil penelitian di bidang ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pelaksanaan KKN merupakan kegiatan akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program KKN juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan profesional.

Unisda sebagai sebuah perguruan tinggi hadir di tengah masyarakat demi mengemban fungsi tridharma perguruan tinggi. Jika hanya aktivitas pengajaran dan penelitian yang mendapat perhatian, kesan perguruan tinggi sebagai menara gading tidak dapat dielakkan. Agar perguruan tinggi dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat lewat pengamalan sebagian ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan pengabdian kepada

masyarakat mau tidak mau harus dilakukan. Program pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud tidak hanya dilakukan oleh dosen, melainkan juga mahasiswa yang secara konkret berwujud KKN. Jadi, KKN merupakan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa pada lokasi yang ditentukan dan bekerjasama dengan kampus.

KKN sengaja dirancang sistematis sebagai salah satu wujud pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, dan pendampingan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan membantu meningkatkan kualitas hidup dalam aktivitas pembangunan. Pelaksanaan KKN bersifat multidisipliner dan sekaligus pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN mahasiswa dihadapkan secara langsung kepada masyarakat sehingga yang terjadi adalah sifat saling memberi dan menerima antara keduanya. Agar pelaksanaan KKN dapat berjalan dan berhasil sesuai dengan harapan, harus ada kejelasan tugas dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait.

KKN merupakan salah satu wahana pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, dalam pelaksanaannya lebih dulu harus dilakukan kajian secara cermat sebelum menentukan berbagai program yang akan dilaksanakan. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan hasil observasi riil di lapangan dan kajian analitis kritis sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan sosial. Sebagai sebuah program pengabdian kepada masyarakat, KKN lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan potensi dan tantangan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupannya baik secara individu maupun kelompok.

Draf pengembangan alternatif model KKN Unisda ini sengaja disusun untuk memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen KKN di Unisda. Draf ini merupakan

perumusan alternatif yang berpeluang disesuaikan dengan perkembangan mutakhir dan memenuhi saran implementatif dari sebuah era baru pelaksanaan KKN yang menjadi bagian untuk pelaksanaan rangkaian akademik di Unisda.

#### **D. Tujuan**

##### **1. Tujuan Akademik**

- a. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa serta memantapkan wawasan keilmuan dan kemasyarakatan sekaligus memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang manfaat pendidikan, meningkatkan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memperoleh gambaran yang jelas tentang tata kehidupan masyarakat secara riil, menggali potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, meletakkan dasar-dasar pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga proses transformasi keilmuan dari kampus ke masyarakat lebih bisa memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

##### **2. Tujuan Nonakademik**

- a. Mengkoordinasikan dan meletakkan dasar-dasar tumbuhnya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa, sehingga pada saatnya nanti bersamaan dengan berkembangnya sector-sektor pembangunan masyarakat, mahasiswa mempunyai persiapan yang memadai dalam meningkatkan ketrampilan hidupnya.
- b. Memantapkan kerangka landasan bagi upaya terwujudnya kesejahteraan hidup lahir batin, mendorong dan memotivasi potensi SDM yang ada di masyarakat kearah kehidupan yang dinamis, memiliki wawasan keagamaan yang cukup, etos kerja yang tinggi dan demokratis.

## E. Manfaat

1. Manfaat bagi Mahasiswa
  - a. Memperluas wawasan dan mendewasakan cara berfikir terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dengan memakai paradigma keilmuan yang dipelajari di Kampus.
  - b. Memberikan keterampilan praktis tentang metode-metode ilmiah dalam aplikasinya terhadap pengembangan diri dan persiapan terjun di masyarakat.
  - c. Menanamkan *sense of research* dan *sense of critique* (budaya penelitian dan budaya kritis) atas fenomena yang terjadi di masyarakat guna memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang harus dikembangkan di masyarakat.
2. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah
  - a. Memperoleh alternative pemikiran dan pengetahuan yang baru dan dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat, baik skala desa, kecamatan atau kabupaten.
  - b. Memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan sekaligus mengetahui data-data tentang potensi fisik dan non fisik, sehingga dapat dioptimalisasikan melalui pembangunan yang nyata.
3. Manfaat bagi Perguruan Tinggi
  - a. Memperoleh *feed back* (umpan balik) dari hasil integrasi mahasiswa dengan dinamika masyarakat yang plural, sehingga segala kebijakan Perguruan Tinggi yang menyangkut pendidikan (kurikulum) dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.
  - b. Memperoleh fenomena riil dan kasus nyata yang bisa dipakai sebagai salah satu rujukan materi dalam kegiatan akademik, terutama penemuan masalah untuk pengembangan penelitian ilmiah.



## F. Status KKN

KKN merupakan bagian dan proses pendidikan yang berhubungan erat dengan pembinaan mahasiswa secara utuh serta pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat. Karena itu, KKN menjadi bagian integral dan kurikulum pendidikan tinggi dan merupakan persyaratan bagi setiap mahasiswa program strata satu (S-1).

Mata kuliah KKN Unisda Lamongan merupakan program “wajib” sebagai mata kuliah intrakurikuler yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa program S1 dengan bobot kredit 4 (empat) SKS.

## G. Prinsip Dasar dan Pelaksanaan

### 1. Prinsip Dasar

- a. *Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi*: pendidikan dan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi KKN.
- b. *Pelestarian Tri Gatra KKN*: KKN dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pengembangan institusi (*institutional development*).
- c. *Empati-Partisipatif*: KKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. KKN dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan

pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKN harus mampu mengadakan pendekatan sosiokultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.

- d. *Interdisipliner*: KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh panitia pelaksana KKN. Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN.
- e. *Komplementatif dan berdimensi luas*: KKN berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian diharapkan mahasiswa peserta KKN mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional.
- f. *Realistis-Pragmatis*: program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- g. *Environmental development*: KKN dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mahasiswa KKN mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan mencari penyelesaiannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dengan harapan masyarakat mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

## 2. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. *Co-creation (gagasan bersama)*: KKN dilaksanakan berdasar pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, Pusat Studi) dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat setempat.
- b. *Flexibility (keluwesan)*: KKN dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.
- c. *Sustainability (berkesinambungan)*: KKN dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.
- d. *Research based community services*: KKN dilaksanakan berbasis riset.

## **BAB II**

### **PENGELOLA KKN**

#### **A. Organisasi Pelaksana**

KKN 2022 Unisda Lamongan dilaksanakan oleh Panitia KKN yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan No. 032/U/A.5/VI/2022/SK.

#### **B. Lembaga Pengelola dan Tugas**

Pengelola program KKN Unisda meliputi Rektor sebagai penanggung jawab program dan Wakil Rektor sebagai konsultan pelaksanaannya. Adapun pembagian tugas pelaksana kebijakan sampai dengan tingkat implementasi di lapangan adalah sebagai berikut;

1. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Tugas Wakil Rektor bidang penelitian dan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun kebijakan dan strategi universitas tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program KKN;
  - b. Menyusun kriteria dan cara penilaian kinerja program KKN Unisda;
  - c. Memberikan laporan kinerja program KKN Unisda kepada Rektor;
  - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan program KKN Unisda;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan program KKN Unisda.
2. Ketua LPPM  
Pelaksanaan Program KKN dipimpin oleh Ketua LPPM Unisda dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Memimpin unit pelaksana Program KKN Unisda;
  - b. Melaksanakan program KKN sesuai dengan kebijakan

- dan strategi universitas;
- c. melaksanakan penilaian kinerja program KKN Unisda sesuai dengan kriteria dan cara penilaian yang ditetapkan oleh universitas.
  - d. memberikan laporan dan pertanggungjawaban kinerja program KKN Unisda kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara berkala.
  - e. melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan Program KKN Unisda.
3. Ketua Panitia KKN
- Manajemen Operasional KKN dikoordinasikan oleh Ketua KKN yang dibantu oleh seksi-seksi. Tugas Ketua KKN adalah;
- a. Melaksanakan pengelolaan KKN;
  - b. Mengembangkan program-program KKN;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan hibah KKN;
  - d. Membuat rencana dan laporan kegiatan KKN.
4. Wakil Ketua KKN
- Wakil ketua KKN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
- a. merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi serta mengembangkan pelaksanaan KKN;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan setiap periode KKN sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada ketua LPPM.
5. Sekretaris KKN
- Pelaksanaan Program KKN dikoordinasikan oleh Sekretaris dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Program KKN;
  - b. Bertanggung jawab kepada Ketua KKN tentang kegiatan

Program KKN.

6. Wakil Sekretaris KKN

Pelaksanaan Program KKN oleh Wakil Sekretaris dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membantu dan bertugas mengelola teknis pelaksanaan operasional KKN dan bertanggungjawab langsung kepada Penanggungjawab.
- b. Mengkoordinasikan diklat, perencanaan lapangan, pembimbingan dan evaluasi, kegiatan KKN
- c. Melakukan dan bertugas menyusun kurikulum, jadwal, memberi pelatihan, menyusun dan menggandakan materi. Serta menyiapkan segala dukungan untuk pelatihan.

7. Bendahara KKN

Tugas bendahara adalah

- a. Mengelola pelaksanaan realisasi keuangan;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data;
- c. Melakukan analisa dan pelaporan keuangan pelaksanaan program KKN;
- d. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan setiap periode Program KKN.

8. Seksi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Keberhasilan pelaksanaan KKN di lapangan sangat ditentukan oleh kecermatan persiapan sebelum mahasiswa ditempatkan di desa. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu kegiatan dalam mempersiapkan mahasiswa sebelum terjun ke desa.

Tugas seksi pendidikan dan pelatihan adalah;

- a. Menyampaikan pemahaman maksud dan tujuan program KKN;
- b. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KKN;
- c. Menyampaikan pengetahuan untuk mempertajam penginderaan terhadap permasalahan maupun

- pemecahannya;
- d. Memberikan informasi tentang potensi dan permasalahan desa yang akan menjadi lokasi kerjanya;
  - e. Memberikan pengarahan agar dapat melatih diri bekerja berkelompok secara interdisipliner dan antarsektor.
9. Seksi Evaluasi dan Pengumpulan Data
- Tugas seksi evaluasi dan pengumpulan data adalah;
- a. Membuat instrumen untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi KKN baik form untuk yang harus diisi oleh pimpinan, panitia, maupun DPL;
  - b. Memeriksa hasil test diklat peserta KKN;
  - c. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KKN, beserta rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan KKN berikutnya;
  - d. Melakukan koordinasi dengan bagian atau koordinator lainnya untuk menjaga sinergitas pelaksanaan KKN;
  - e. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana KKN;
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi program KKN dengan hadir di lokasi KKN pada minggu kedua dan keempat.
10. Seksi Humas dan Lapangan
- Tugas Seksi Humas dan Lapangan adalah
- a. Membantu tugas Ketua Pelaksana KKN berkenaan tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan KKN di Lapangan;
  - b. Bersama dengan bagian perencanaan program, bagian diklat dan pelatihan mengembangkan program-program KKN;
  - c. Membantu melakukan penjajagan untuk lokasi KKN berdasarkan hasil kajian bagian perencanaan program;
  - d. Membantu melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah/tokoh dalam menyediakan informasi tempat pemondokan peserta KKN;

- e. Membantu melakukan pemetaan lokasi dan penentuan lokasi tempat KKN termasuk melakukan negosiasi dengan pihak lain serta menentukan biaya transportasi;
  - f. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan berkenaan pelaksanaan KKN di lapangan;
  - g. Melakukan koordinasi dengan bagian atau koordinator lainnya untuk menjaga sinergitas pelaksanaan KKN;
  - h. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana KKN.
11. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
- Tugas Seksi Publikasi dan Dokumentasi adalah:
- a. Membuat Layout Buku Panduan KKN Tahun 2022
  - b. Memproduksi informasi terkait kegiatan KKN hingga selesai.
  - c. Membuat pemberitaan di Media Cetak dan Elektronik.
  - d. Bekerjasama dengan Tim Evaluasi tentang Tugas Publikasi Video Mahasiswa di Media Sosial.
12. Koordinator Kecamatan Dosen Pembimbing Lapangan (Korcam DPL)
- Dosen Pembimbing Lapangan tingkat kecamatan (Korcam DPL) bertugas melakukan pembimbingan kegiatan KKN yang diselenggarakan di suatu kecamatan, yakni:
- a. Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Program KKN di tingkat kecamatan lokasi KKN;
  - b. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan serta membantu persiapan implementasi kegiatan KKN di kecamatan yang direncanakan;
  - c. Melakukan pengembangan sinergi dan koordinasi program KKN dengan pemerintah daerah atau mitra kerja lain di kecamatan kegiatan KKN;
  - d. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi;
  - e. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif



mahasiswa KKN, antar-DPL, dan antara mahasiswa KKN dan pemerintah di wilayah kegiatan KKN;

- f. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi program dengan hadir di lokasi KKN.
13. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  
Dosen Pembimbing Lapangan yang bertugas pada level desa/dusun bertugas
- a. Mendampingi mahasiswa KKN pada saat diklat;
  - b. Mendampingi dan membimbing mahasiswa KKN melakukan survei lokasi;
  - c. Membimbing mahasiswa KKN dalam penyusunan program KKN, pelaksanaan KKN di lapangan serta membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa KKN di lapangan, dan penyusunan laporan KKN;
  - d. Mengikuti upacara pemberangkatan dan serah terima mahasiswa KKN sampai ke desa lokasi KKN;
  - e. Melakukan kunjungan ke desa lokasi KKN pada minggu pertama dan ketiga.
  - f. Mengikuti upacara penutupan di kecamatan
  - g. Melakukan penilaian terhadap kegiatan dan laporan mahasiswa KKN.
14. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kecamatan (Korcam)  
Korcam selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN juga mempunyai tugas-tugas berikut:
- a. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat kecamatan dalam rangka penempatan dan penarikan mahasiswa tingkat kecamatan, serta mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa sekecamatan;
  - b. Memberikan laporan kepada DPL, aparat desa dan kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi;
  - c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan

dan realisasi penggunaan dana di tingkat kecamatan;

- d. Berdasarkan musyawarah seluruh anggota (diwakili oleh kordes-kordes yang ada di kecamatan yang bersangkutan), korcam menentukan peserta kkn yang akan bertugas jaga/piket di pos kkn yang ada di kantor kecamatan. Petugas yang piket di kantor kecamatan ditentukan 2-4 orang (pria dan wanita) tergantung pada kebutuhan. Seluruh peserta kkn diharapkan pernah bertugas di pos KKN kecamatan. Waktu piket pukul 08.00 – 21.00;
- e. Mengadakan pertemuan dengan kordes secara periodik (seminggu sekali) membicarakan masalah program kecamatan/desa dan bertukar informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kkn. Tempat pertemuan sebaiknya bergantian antara desa yang satu dengan desa yang lain.

Petugas piket di sekretariat kecamatan bertugas;

- a. Sebagai penghubung antarsistem mulai dari mahasiswa peserta KKN, pihak Pemda, Muspika, masyarakat, dan panitia KKN dengan seluruh peserta KKN;
- b. Menerima dan mencatat laporan mahasiswa yang akan meninggalkan/datang ke lokasi KKN;
- c. Mencatat segala kejadian yang ada di desa-desa dalam satu kecamatan dan seluruh desa.

Untuk keperluan ini, perlu disiapkan jadwal piket, buku daftar hadir piket, buku tamu, dan buku catatan harian.

#### 15. Koordinator Mahasiswa Tingkat Desa (Kordes)

Kordes selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas berikut:

- a. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat desa (termasuk rencana kerja, diskusi tingkat desa, pelaksanaan, laporan);
- b. Memberikan laporan kepada koordinator kecamatan, perangkat pemerintah desa, dan DPL apabila ada

- kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi;
- c. Melaporkan ke DPL jika terjadi kejadian yang luar biasa;
  - d. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat desa.

## BAB III

### RUANG LINGKUP KEGIATAN KKN

#### A. Bidang dan Topik KKN

Permasalahan yang ada di masyarakat sangatlah kompleks dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, untuk tujuannya efisiensi dan memberikan dampak yang lebih masif, diperlukan pemfokusan bidang KKN. Fokus bidang ini juga mempertimbangkan sumberdaya mahasiswa dan potensi desa berdasarkan hasil survey lapangan desa sasaran. Pada KKN 2022, Unisda memfokuskan pada 3 (tiga) bidang utama, yakni:

1. Pendidikan;
2. Ekonomi; dan
3. Sosial-Hukum.

Topik yang akan diusung pada KKN 2022 ini juga difokuskan pada pembentukan branding desa sesuai dengan potensi masing-masing desa. Telah ditabulasi dan ditetapkan 6 (enam) fokus branding desa, yakni desa literasi, desa ramah anak, desa wisata, desa *preneur*, desa anti korupsi, dan *smart village*.

**Tabel Potensi Desa**

No	Kecamatan	Desa	Potensi
1.	Plumpang	Keboh Melati	Desa Preneur: Anyaman Bambu
		Kepoh Agung	Desa Wisata: Waduk Gua
		Sumber agung	Desa Wisata Sendang Joko Tarub dan Batik Tulis Tuban
		Plumpang	Smart Village
		Sumur Jalak	Desa Wisata Embung
		Cangkring	Desa Preneur / Literasi
		Penidon	Smart Village: Smart Environment

		Kesamben	Desa Wisata Tambang Kapur dan Gua
2.	Widang	Comprenng	Desa Literasi
		Ngadipuro	Desa Preneur
		Ngadirejo	Desa Preneur
		Mrutuk	Desa Wisata Water Boom
		Simorejo	Desa Wisata Waduk
		Patihan	Desa Hidroponik
3.	Kedungpring	Blawirejo	Desa Wisata Prasasti atau Desa Preneur Tas Ekspor
		Sumengko	Smart Village, Desa Wisata
		Tenggerejo	Desa Wisata Waduk
		Kedungpring	Desa Anti Korupsi
		Sidobangun	Smart Village
		Kalen	Desa Literasi
		Warungering	Desa Ramah Anak dan Perempuan

## B. Penjelasan Fokus Branding Desa

### a) Desa Literasi

#### a. Latar Belakang

Peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, berkaitan erat dengan tingkat minat baca. Hasil survei beberapa lembaga menunjukkan tingkat minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Bahkan di bawah rata-rata tingkat minat baca negara Asia lainnya. Berdasarkan data UNESCO tahun 2012, indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Data UNESCO untuk indeks pembangunan pendidikan, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. Secara nasional, tidak sampai satu judul buku yang dibaca seseorang dalam setahun. Hasil survei UNESCO, daerah di Indonesia yang minat bacanya paling tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks baca 0,049. Di Singapura, indeks baca masyarakatnya sudah mencapai 0,45. Data

yang menggembirakan adalah capaian pemberantasan buta aksara di Indonesia. Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2015 yang merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, jumlah buta aksara di Indonesia tinggal 5.984.075 orang atau 3,70%. Dengan berbagai program pemberantasan buta aksara yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), angka buta aksara ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data minat baca dan tingkat buta aksara tersebut berpengaruh terhadap posisi Human Development Index (HDI) Indonesia. HDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari usia harapan hidup (tingkat kesehatan), pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan. Data BPS, tahun 2014 nilai HDI mengalami kenaikan tipis menjadi 68,90 dari 68,4 di tahun 2013. Data yang dirilis United Nations Development Program (UNDP), HDI Indonesia di tahun 2013 berada di peringkat ke-108 dari 187 negara. Angka HDI ini menunjukkan bahwa Indonesia juga berada jauh di bawah sejumlah negara di ASEAN.

Hasil-hasil survei tersebut menunjukkan pentingnya persoalan minat baca dan literasi di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai 270.234.842 jiwa, peringkat keempat dari segi jumlah penduduk terbanyak di dunia, dari segi minat baca dan HDI Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Berbekal pengalaman dalam pemberantasan buta aksara, bukan hal yang mustahil jika kita secara bersama-sama dan berupaya melakukan berbagai hal bahkan yang *out of the box*, kita bisa meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, keberadaan model pembelajaran non-formal yang komprehensif dengan menyelenggarakan program Desa Literasi menjadi suatu yang penting untuk dilakukan. Desa Literasi diharapkan bisa menjadi poros pendidikan non-formal masyarakat yang tidak hanya mengajarkan membaca, menulis dan berhitung (calistung), namun bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah

rendahnya pengetahuan dan minat baca masyarakat. Desa Literasi dikembangkan agar masyarakat, memiliki 6 kecakapan literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Kegiatan membaca menjadi awal dan pondasi dari berbagai kegiatan literasi lainnya agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh serta membentuk masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

#### *b. Tujuan Program*

Penyelenggaraan program Kampung Literasi dimaksudkan untuk memberikan layanan pengetahuan, informasi dan keterampilan kepada masyarakat sehingga memiliki kecakapan dan wawasan yang luas serta keterampilan yang memadai. Model pemberdayaan Kampung Literasi bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan, pembinaan dan menghidupkan aktivitas literasi secara berkelanjutan di masyarakat.

Tujuan khusus dari penyelenggaraan program Kampung Literasi ini antara lain:

1. Menyediakan layanan informasi dan pengetahuan di jalur pendidikan nonformal kepada masyarakat. Layanan tersebut berupa buku dan non-buku yang disediakan di TBM (taman baca masyarakat), pojok baca atau sejenisnya, serta dilengkapi dengan teknologi informasi.
2. Mengembangkan minimal dua dari enam komponen literasi, yaitu literasi baca-tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.

#### *c. Sasaran Program*

1. Sasaran utama pelaksanaan program Kampung Literasi adalah desa atau kampung dengan indikator, antara lain:
  - a. Memiliki penduduk tuna aksara yang relatif masih tinggi.

- b. Memiliki sumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan dan mengelola Kampung Literasi.
- c. Memiliki sarana pendukung pembentukan Kampung Literasi.
- d. Memiliki bentuk kearifan lokal yang dapat diberdayakan untuk pengembangan literasi masyarakat kampung tersebut.
- e. Memiliki embrio sumber pengetahuan seperti memiliki Taman Baca Masyarakat, Perpustakaan Desa, dan sumber pengetahuan lainnya.
- f. Memiliki hubungan yang harmonis antara penggiat literasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

## 2. Masyarakat

Secara umum, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan program Kampung Literasi. Prioritas layanan program Kampung Literasi bisa diberikan untuk masyarakat dengan kondisi, antara lain:

- a. Masyarakat yang masih berkeaksaraan rendah.
- b. Masyarakat yang sedang menempuh program pendidikan kesetaraan, Paket A, B dan C.
- c. Masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan literasinya.
- d. Warga belajar sedang mendalami keterampilan sesuai dengan kegiatan yang tersedia dalam program Kampung Literasi.

### d. Prinsip Kampung Literasi

Prinsip dasar dalam pembentukan Kampung Literasi adalah “dari, oleh dan untuk masyarakat” yang berarti:

- 1. Kampung Literasi dibentuk untuk memberikan berbagai layanan yang didasarkan atas prakarsa berbagai pihak, yakni lembaga, organisasi masyarakat, pemerintah dan tokoh- tokoh masyarakat.
- 2. Program dan kegiatan yang diselenggarakan di Kampung Literasi dilaksanakan oleh berbagai unsur, yakni lembaga,



organisasi masyarakat, pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.

3. Semua program dan kegiatan yang diselenggarakan pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat setempat dalam membangun lingkungan dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

*e. Hasil yang Diharapkan*

Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan program Kampung Literasi adalah:

1. Tersedianya layanan pengetahuan dan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa buku maupun non-buku yang tersedia di TBM, pojok baca, atau sejenisnya, yang dilengkapi dengan teknologi informasi.
2. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap yang positif sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.
3. Tersedianya layanan informasi dan sumber akses informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan 6 komponen literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

*f. Indikator Keberhasilan*

Indikator keberhasilan pelaksanaan program Kampung Literasi sebagai berikut.

1. Meluasnya informasi masyarakat terhadap program Kampung Literasi.
2. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke pusat aktivitas Kampung Literasi untuk mendapatkan pengetahuan, mencari informasi dan atau belajar keterampilan.
3. Meningkatnya layanan pengetahuan dan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa buku maupun non-buku yang tersedia pada TBM, pojok baca atau sejenisnya yang dilengkapi dengan teknologi informasi.

1. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap yang positif sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.
2. Meningkatkan beragam aktivitas literasi di masyarakat.
3. Tersedianya berbagai layanan pengetahuan dan informasi serta sumber aksesnya kepada masyarakat yang berkaitan dengan 6 literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

*g. Penyelenggara Program*

Penyelenggaraan program Kampung Literasi dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat (TBM), PKBM, lembaga satuan pendidikan nonformal lainnya dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat (Bupati/Walikota, dinas pendidikan dan dinas terkait lainnya, Camat, Kepala Desa/Lurah dan RT/RW).

*h. Standar Minimal Kampung Literasi*

Standar minimal dalam pelaksanaan program Kampung Literasi adalah sebagai berikut:

1. Lembaga yang memiliki lokasi dan bersedia mengelola Kampung Literasi yang dilengkapi dengan prasarana memadai seperti ruang sekretariat pengelola, ruang buku dan baca, ruang pelatihan dan keterampilan, ruang teknologi informasi (TI), dan ruang-ruang pendukung lainnya (musholla, ruang/taman bermain anak, dll.) serta dilengkapi dengan sarana pendukung pada masing-masing prasarana.
2. Memiliki kemitraan dengan berbagai pihak yang mendukung proses terselenggaranya Kampung Literasi.
3. Tersedianya layanan pengetahuan dan informasi berupa buku maupun non-buku yang disediakan pada TBM, pojok baca atau sejenisnya yang dilengkapi dengan teknologi informasi.

4. Memiliki program-program layanan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat setempat khususnya berbasis kearifan lokal yang dilengkapi dengan alat-alat keterampilan pendukung.
5. Mengembangkan minimal dua dari enam komponen literasi (literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan).

*i. Perencanaan dan pelaksanaan program Kampung Literasi*



**1. Analisis potensi kampung**

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam mendirikan Kampung Literasi adalah mempertimbangkan lokasi kampung. Lokasi kampung yang baik adalah lokasi yang dapat mendukung penyelenggaraan program dan layanan literasi seperti yang tertuang dalam kriteria kampung literasi pada bab sebelumnya (standar minimal sebuah Kampung Literasi).

**2. Melakukan diskusi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dinas pendidikan, dan kemitraan terkait lainnya**

Setelah mengidentifikasi potensi kampung yang tepat untuk memilih atau mendirikan kawasan Kampung Literasi, langkah

selanjutnya adalah melakukan diskusi dengan berbagai pihak dengan tujuan untuk menjaring pandangan dan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dinas pendidikan dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, diskusi juga dimaksudkan untuk mencapai kata mufakat dan komitmen untuk mendirikan Kampung Literasi.

### 3. Melakukan pemetaan sasaran program

Setiap kampung atau kawasan memiliki bentuk aktivitas dan profesi yang berbeda-beda dari masyarakat kampung lainnya. Oleh karena itu, dalam mendirikan Kampung Literasi terlebih dahulu dilakukan pemetaan sasaran program yang akan menerima manfaat dari penyelenggaraan program secara khusus. Misalnya, pada masyarakat pesisir pantai maka sasaran utamanya adalah para nelayan. Dengan demikian informasi literasi yang disajikan lebih banyak menyuguhkan literasi yang berkaitan dengan kehidupan nelayan. Di lingkungan pendidikan (dekat dengan kawasan sekolah, Perguruan Tinggi, dll) maka informasi literasi yang disuguhkan lebih variatif tergantung kecenderungan atau kebutuhan dari masyarakat dan pelajar/mahasiswa.

### 4. Melakukan pemetaan jenis layanan dan aktivitas program

Setelah melakukan pemetaan terhadap sasaran program, selanjutnya adalah pemetaan jenis layanan dan aktivitas program. Layanan program yang diberikan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di sekitarnya (sesuai hasil identifikasi sasaran program).

### 5. Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung program

Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Kampung Literasi seperti pojok baca, warung baca, taman baca dan sebagainya dilakukan melalui koordinasi dengan pengelola lainnya, pemerintah dan masyarakat setempat. Misalnya, area

pos siskamling diletakkan buku-buku yang dapat dibaca oleh masyarakat yang sedang berjaga. Di warung-warung masyarakat setempat dapat dibentuk satu bagian untuk meletakkan buku-buku yang dilengkapi dengan tempat membaca, dan sebagainya.

#### 6. Mengidentifikasi dan menentukan pengelola dan penyelenggara yang terlibat dalam program

Setelah menentukan prasarana dan sarana pendukung program, langkah selanjutnya adalah menentukan dan membentuk tim pengelola dan penyelenggara kegiatan yang telah direncanakan dalam program Kampung Literasi. Pengelola dan penyelenggara kegiatan memiliki kriteria tertentu yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

#### 7. Menentukan Visi dan Misi Program Kampung Literasi

Pelaksanaan program Kampung Literasi di setiap daerah memiliki maksud dan tujuan. Karena itu, penyelenggara Kampung Literasi di masing-masing daerah terlebih dahulu menentukan visi dan misi pendirian Kampung Literasi di daerahnya. Visi dan misi ini menjadi acuan dalam pembuatan rencana kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai.

#### 8. Menyelenggarakan Program Kampung Literasi

Setelah semua disiapkan dengan baik, langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan program Kampung Literasi. Pada bagian ini, setiap pengelola dan penyelenggara telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik.

#### 9. Monitoring, evaluasi dan penyusunan rencana strategis pengembangan program

Bagian akhir dari penyelenggaraan Kampung Literasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut seluruh pihak terkait menyusun rencana

strategis pengembangan program lanjutan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

*j. Bentuk Kegiatan di Kampung Literasi*

Literasi adalah poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat. Kampung Literasi merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan literasi di masyarakat terus berdenyut dan berkelanjutan. Kampung Literasi diharapkan menjadi tempat lahir dan tumbuhnya simpul-simpul masyarakat yang literat. Kegiatan yang dikembangkan di Kampung Literasi adalah kegiatan yang mencakup komponen 6 literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

1. Literasi Baca Tulis

Baca tulis adalah dasar dari setiap kegiatan literasi. Literasi baca tulis merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan dan merefleksikan tulisan dalam mencapai suatu tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi untuk dapat berpartisipasi di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan dalam literasi baca-tulis, antara lain:

a. Membaca dan Bercerita

Kegiatan membaca bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan jika dilakukan dengan bentuk yang beragam. Variasi kegiatan dalam membaca dan bercerita, antara lain:

- Membaca senyap, membaca buku tanpa mengeluarkan suara. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh setiap orang.
- Membaca nyaring (read a loud), membacakan buku dengan bersuara dan didengarkan oleh peserta lainnya.
- Membaca dan bercerita, memahami bahan bacaan kemudian menyampaikan kembali isi buku.

b. Kelompok Baca Berkala

Kelompok baca berkala adalah kegiatan untuk sama-sama membahas sebuah buku atau isu tertentu. Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca yang lebih komprehensif, meningkatkan kemampuan untuk menganalisa dan mengkritisi secara utuh isu-isu tertentu yang sedang berkembang di masyarakat.

c. Penulisan Sejarah Kampung dan Potensi/Kearifan Lokal

Penulisan sejarah kampung atau potensi dan kearifan lokal sebuah kampung merupakan upaya kita bersama untuk mempublikasikan dan melestarikan nilai-nilai dan sejarah kampung agar tetap hidup di masyarakat. Publikasi dan penulisan bisa dilakukan di berbagai media, cetak maupun elektronik.

2. Literasi Berhitung

Literasi berhitung merupakan kemampuan untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, mencakup penalaran matematis dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta dan alat-alat untuk menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi fenomena. Dalam konteks di masyarakat, literasi berhitung bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami peran dan kegunaan berhitung dalam aspek kehidupan sehari-hari. Ragam kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain, bermain dengan menggunakan hitung-hitungan dan angka.

3. Literasi Sains

Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains dalam mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan baru, menggambarkan fenomena ilmiah dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan dalam literasi sains, antara lain

mengenal alam sekitar dan lingkungan, mengenal fenomena alam, belajar bersama dengan alat peraga sains, pengenalan hidup sehat, dll.

#### 4. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Literasi teknologi informasi dan komunikasi merupakan keterampilan berpikir kritis dan kreatif terhadap informasi dan komunikasi sebagai warga global dengan bertanggung jawab dan beretika dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi secara bijak dan kreatif. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan, antara lain:

- a. Mengenal dan belajar menggunakan perangkat komputer;
- b. Belajar menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan dan hal-hal yang kreatif;
- c. Pelatihan jurnalistik;
- d. Memanfaatkan teknologi untuk wirausaha.

#### 5. Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen serta masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Tujuan literasi keuangan adalah mengedukasi masyarakat terkait dengan pengetahuan mengelola, manajemen keuangan dan investasi. Bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan adalah mengenal jasa keuangan dan investasi, membangun koperasi bersama, mengenal transaksi keuangan elektronik, dll.

#### 6. Literasi Budaya dan Kewarganegaraan

Literasi kebudayaan adalah pengetahuan tentang sejarah, kontribusi dan perspektif dari kelompok budaya yang berbeda.



Literasi kewarganegaraan merupakan pemahaman mengenai bentuk dan fungsi pemerintahan, kewarganegaraan serta partisipasi sosial dan politik individu. Sasaran dari literasi budaya dan kewarganegaraan adalah mengedukasi masyarakat terkait sejarah dan perspektif budaya serta kewarganegaraan. Bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan, antara lain:

a. Rembuk Budaya Lokal

Urun rembuk bersama komponen masyarakat untuk menghidupkan tradisi lokal yang dulu pernah ada di masyarakat untuk dikenalkan kembali kepada generasi penerus.

b. Gelar Budaya

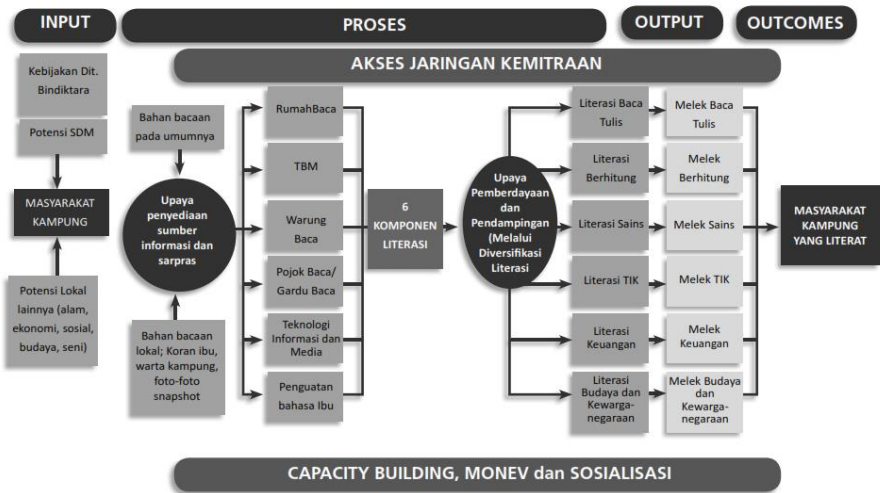
Kegiatan pagelaran budaya yang menampilkan kembali kekayaan tradisi/budaya lokal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Di beberapa daerah, gelar budaya bahkan dikembangkan menjadi potensi wisata.

c. Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan kebangsaan

Penyelenggara Kampung Literasi diharapkan bisa mengembangkan minimal 2 dari 6 komponen literasi.

k. *Pola Rintisan Kampung Literasi (Bagan)*

Untuk memahami proses rintisan Kampung Literasi, dapat diamati berdasarkan pola gambar di bawah ini.



## b) Desa Ramah Anak

### a. Latar Belakang

Konsep Desa Ramah Anak (DRA) bermula dari munculnya konsep Kota Ramah Anak (KRA). Gagasan Kota Ramah Anak diawali dengan penelitian mengenai *“Children’s Perception of the Environment”* oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota-Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program *Growing Up In Cities (GUIC)* – tumbuh kembang di perkotaan-yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah

dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul *“Growing Up In Cities”* 1977.

Pada masa ini, masalah-masalah kebutuhan perkembangan pada anak merupakan kebutuhan yang harus/mutlak terpenuhi sesuai dengan perkembangan, maka masyarakat harus paham akan kebutuhan perkembangan anak usia dini sehingga dapat menangani masalah- masalah yang timbul, baik masalah pemenuhan kebutuhan perkembangan yang umum ataupun masalah kebutuhan perkembangan yang bersifat khusus.

Bukan hanya itu, perlindungan anak juga menjadi perhatian utama dari pemerintah. Perlindungan anak dalam rumah tangga juga sudah di atur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 2 ayat (1) “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 4 “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan antara lain : (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga”.

Mengacu pada uraian di atas, maka dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang perlu keterlibatan pemerintah, masyarakat dan swasta melalui sebuah program yang namanya program desa ramah anak, karena anak adalah investasi yang sangat besar bagi pembangunan, jika anak usia dini sekarang bisa dibentuk sesuai kemampuan mereka, maka dimasa yang akan datang dapat menjadi sumberdaya pembangunan bangsa.

Untuk menghasilkan pengembangan program dimaksud kegiatan pengembangan program Desa Ramah Anak menjadi

program penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pada Anak Usia Dini.

*b. Tujuan Program*

Secara umum pengembangan Desa Ramah Anak bertujuan menciptakan model lingkungan yang mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak secara komprehensif. Secara khusus pengembangan program ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah, masyarakat, swasta, maupun lingkungan sekitar dalam mengembangkan Desa Ramah Anak.

*c. Gambaran Program*

Program ini menggunakan metode partisipatif dengan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat desa. Desa sebagai sasaran pelaksanaan program, memberi peluang pada seluruh unsur untuk mengetahui dan memahami peranan dan fungsinya dalam mengembangkan desa ramah anak.

Unsur-unsur terkait yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah

Lembaga pemerintah yang dimaksud dalam program ini adalah lembaga pemerintah yang berada pada tingkat pedesaan yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun dan ketua RT, lembaga pemerintah pada tingkat kecamatan dan kabupaten

2. Masyarakat

Lingkup masyarakat yang termasuk dalam pengembangan program ini adalah mereka yang mempunyai pengaruh langsung pada anak usia dini, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan orang tua anak.

3. Swasta

Pihak swasta yang diharapkan terlibat dalam pengembangan program ini adalah para pelaku industri rumah tangga maupun menengah serta perbankan yang ada di desa penyelenggara desa ramah anak.

4. Lingkungan sekitar

Lingkungan yang terkait dengan program desa ramah anak adalah lingkungan fisik yang terdiri dari lembaga pendidikan dan lingkungan non fisik berupa adat istiadat setempat.

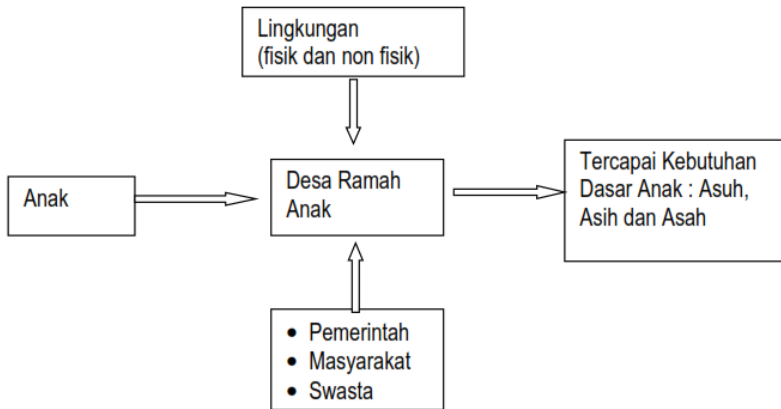
#### *d. Prinsip Penyelenggaraan Program*

Pengembangan program desa ramah anak dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menjadikan anak sebagai fokus. Tindakan yang diberikan dengan mengarahkan desa menjadi tempat pemenuhan kebutuhan dasar anak. Anak tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa tersebut apakah itu oleh pemerintah, swasta, masyarakat maupun lingkungan. Dalam kegiatan ini unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan lingkungan yang mempunyai peran utama dan anak sebagai obyek.

Adapun prinsip yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Desa sebagai sasaran pelaksanaan program
2. Anak sebagai fokus dari program
3. Pemerintah memfasilitasi dan terlibat langsung pada seluruh tahap tumbuh kembang anak
4. Pihak swasta mengambil bagian membantu penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak
5. Masyarakat sebagai orang yang paling dekat pada anak yang akan menjadi teladan, guru, pembimbing dan juga fasilitator untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.

Sedangkan alur penyelenggaraan program ditunjukkan sebagai berikut.



#### e. Proses Pelaksanaan Kegiatan

##### 1. Identifikasi potensi desa

Identifikasi potensi desa dalam program Desa Ramah Anak (DRA) dilakukan dalam kegiatan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini bertujuan melakukan identifikasi terhadap kemampuan atau kapasitas yang melekat pada komponen *governance* (pemerintah, masyarakat dan sektor swasta), yang dapat disinergikan untuk meningkatkan mengetahui sejauhmana kemampuan dan kapasitas desa dalam mendukung pelaksanaan Desa Ramah Anak. Kemampuan atau kapasitas dimaksud berupa kemampuan atau kapasitas dalam mewujudkan kesiapan masyarakat menerima Desa Ramah Anak, ketersediaan sumber pembiayaan program Desa Ramah Anak, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, atau pengembangan jaringan kemitraan untuk mendukung penyelenggaraan program Desa Ramah Anak. Kemampuan atau kapasitas dimaksud dimiliki oleh perseorangan atau pun oleh lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat.

Kunjungan lapangan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tiga komponen yakni

pemerintah, masyarakat, swasta dan pemilik lembaga pendidikan.

## 2. Tahapan dan dimensi desa antar komponen

Pengembangan program desa ramah anak yang berawal dari hasil identifikasi menyimpulkan empat tahapan dalam pengembangan DRA, yaitu: a. identifikasi kebutuhan program; b. persiapan pelaksanaan program; c. pelaksanaan program; dan d. evaluasi program. Keempat tahapan tersebut secara lebih rinci dideskripsikan dalam berbagai dimensi desa antar-pemangku kepentingan terkait seperti berikut.

### a. Identifikasi kebutuhan program

Identifikasi kebutuhan program bertujuan menetapkan jenis program yang akan dikembangkan kepada masyarakat. Penetapan jenis kegiatan merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan pengembangan program. Pada tahapan ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Koordinasi dalam rangka membangun desa melalui program DRA. Inisiasi dilakukan oleh mahasiswa KKN bekerja sama dengan KARANG TARUNA dan Kepala Desa;
- 2) Identifikasi kebutuhan program dan peluang pelaksanaannya, serta sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan Desa Ramah Anak;
- 3) Identifikasi jenis-jenis program yang akan ditawarkan kepada masyarakat;
- 4) Identifikasi calon penerima program Desa Ramah Anak;
- 5) Refleksi pelaksanaan identifikasi kebutuhan program dan penyusunan rencana persiapan penyelenggaraan program.

b. Persiapan pelaksanaan program

Tahapan persiapan pelaksanaan program merupakan tahapan untuk mempersiapkan semua komponen-komponen yang terkait dengan penyelenggaraan program Desa Ramah Anak. Pada tahap persiapan penyelenggaraan program ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Koordinasi dalam rangka membangun desa melalui program Desa Ramah Anak. Inisiasi dilakukan oleh mahasiswa KKN bekerja sama dengan karang taruna dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten;
- 2) Seleksi desa penyelenggara program Desa Ramah Anak;
- 3) Penyusunan draft Desa Ramah Anak;
- 4) Penyiapan sarana dan prasarana program Desa Ramah Anak;
- 5) Refleksi pelaksanaan persiapan penyelenggaraan program, dan penyusunan rencana penyelenggaraan program;

c. Pelaksanaan program

Pelaksanaan program merupakan inti dari rangkaian kegiatan dalam peprogram Desa Ramah Anak. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan program adalah:

- 1) Koordinasi dalam rangka membangun desa melalui program DRA. Inisiasi dilakukan oleh mahasiswa KKN bekerja sama dengan karang ta dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten;
- 2) Pelaksanaan proses Desa Ramah Anak;
- 3) Pemantauan proses Desa Ramah Anak;
- 4) Pendampingan pasca kegiatan;
- 5) Refleksi penyelenggaraan program dan penyusunan rencana evaluasi program.



#### d. Evaluasi program

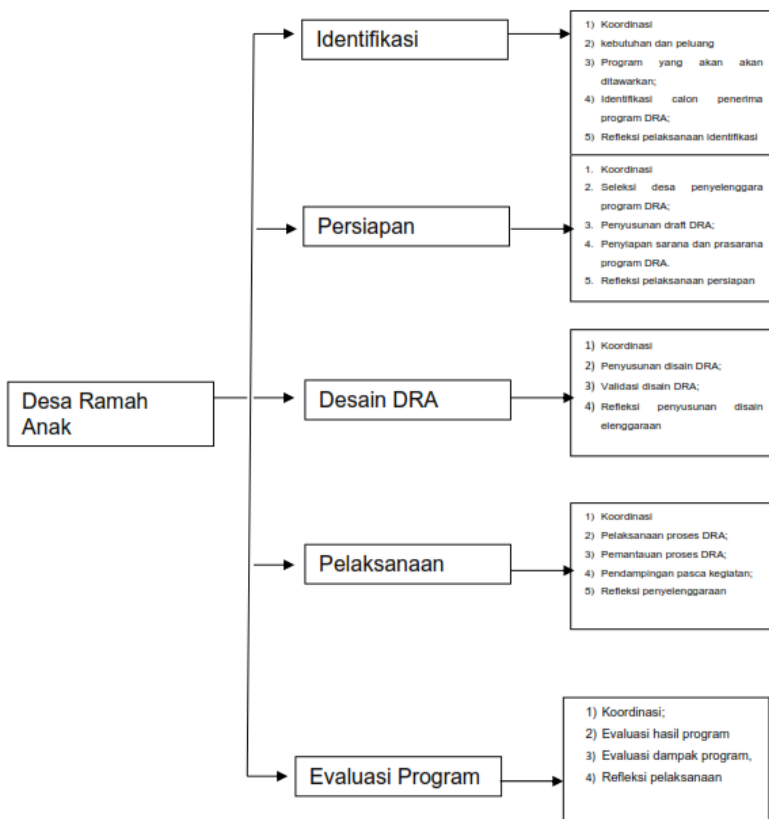
Evaluasi program dimaksudkan untuk menilai ketercapaian tujuan penyelenggaraan program Desa Ramah Anak dan menghimpun informasi untuk melakukan perbaikan program Desa Ramah Anak di masa yang akan datang. Kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi penyelenggaraan program Desa Ramah Anak, meliputi:

- 1) Koordinasi dalam rangka membangun desa melalui program Desa Ramah Anak. Inisiasi dilakukan oleh mahasiswa KKN bekerja sama dengan karang taruna dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten;
- 2) Evaluasi hasil program, untuk menilai sejauhmana hasil pelaksanaan program Desa Ramah Anak;
- 3) Evaluasi dampak program, untuk menilai sejauhmana peningkatan layanan ramah anak untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.
- 4) Refleksi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program dan penyusunan rencana perbaikan Desa Ramah Anak di masa yang akan datang.

#### f. *Kelayakan Desa Ramah Anak*

Potensi, tahapan dan dimensi desa yang telah teridentifikasi dalam kunjungan lapangan kemudian ditawarkan dalam *forum group duscussion* (FGD) untuk mengetahui kelayakan desa tersebut sebagai tempat pelaksanaan Desa Ramah Anak. Melalui FGD ini diharapkan pula diperoleh saran, masukan dan pendapat dari pihak terkait guna membangun konstruksi program Desa Ramah Anak.

#### g. *Skema Pelaksanaan Program Desa Ramah Anak*



*h. Indikator Desa Ramah Anak*

No.	Langkah –langkah	Kegiatan yang dilakukan	Indikator
1.	Identifikasi	a. Koordinasi b. Mencatat Kebutuhan dan peluang c. Program yang akan ditawarkan d. Identifikasi calon penerima program DRA	1) Ada hasil koordinasi 2) Ada kesepakatan semua komponen terkait 3) Jelas kebutuhan

		<p>e. Refleksi pelaksanaan identifikasi</p>	<p>dan peluang yang ada di daerah tsb (ada data tentang jumlah penduduk, jumlah anak, potensi sumber daya alam, dan SDM)</p> <p>4) Adanya desa sasaran program DRA</p> <p>5) Jelas program yang akan ditawarkan</p> <p>f. Ada hasil kesepakatan semua stakeholder</p>
2	Persiapan	<p>1) Koordinasi</p> <p>2) Seleksi desa penyelenggara program DRA</p> <p>3) Penyusunan Draft</p> <p>4) Penyiapan saran dan prasarana DRA</p> <p>5) Refleksi pelaksanaan persiapan</p> <p>6) Pembentukan Tim kerja</p> <p>7) Penyusunan rencana aksi</p>	<p>1) Ada hasil koordinasi</p> <p>2) Adanya desa sasaran</p> <p>3) Adanya Draft model DRA</p> <p>4) Adanya sarpras yang memadai untuk mendukung program DRA</p> <p>5) Ada hasil kesepakatan semua komponen</p>

			<p>6) Terbentuk tim kerja (semua komponen terlibat bekerjasama dalam pelaksanaan program DRA</p> <p>7) Ada kegiatan yang nyata</p>
3	Desain DRA	<p>1) Koordinasi</p> <p>2) Penyusunan desain DRA</p> <p>3) Validasi desain DRA</p> <p>4) Refleksi penyusunan desain penyelenggaraan</p>	<p>1) Ada hasil koordinasi</p> <p>2) Adanya Desain DRA</p> <p>3) Ada hasil validasi</p> <p>4) Adanya hasil kesepakatan mengenai desain penyelenggaraan</p>
4	Pelaksanaan	<p>1) Koordinasi</p> <p>2) Pelaksanaan proses DRA</p> <p>3) Pemantauan proses DRA</p> <p>4) Pendampingan pasca kegiatan</p> <p>5) Refleksi penyelenggaraan</p> <p>6) Rencana aksi</p>	<p>1) Ada hasil koordinasi</p> <p>2) Program terlaksana</p> <p>3) Ada hasil pemantauan</p> <p>4) Adanya pendampingan</p> <p>5) Adanya kesepakatan bersama penyelenggaraan program DRA</p> <p>6) Semua komponen bekerjasama dalam pelaksanaan pengembangan</p>

			DRA
5	Evaluasi program	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi</li> <li>2) Evaluasi hasil program</li> <li>3) Evaluasi dampak program</li> <li>4) Refleksi pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya hasil koordinasi</li> <li>2) Ada hasil evaluasi program</li> <li>3) Ada hasil evaluasi dampak</li> <li>4) Ada hasil kesepakatan mengenai hasil evaluasi</li> </ul>

#### Pemenuhan Hak-Hak Anak

No	Aspek	Indikator
1	Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap anak di desa/ kelurahan memiliki akta kelahiran</li> <li>2) Adanya forum anak sebagai wadah untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak</li> <li>3) Pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah, sehingga anak mengenal Tuhannya.</li> </ul>
2	Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya bina keluarga balita</li> <li>2) Anak di luar keluarga mendapatkan pengasuhan alternative</li> <li>3) Para orangtua mendapatkan pembinaan keterampilan pengasuhan anak (parenting)</li> </ul>
3	Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya penyuluhan pemberian ASI dari Dinas Kesehatan (posyandu)</li> <li>2) Adanya pemberian imunisasi secara berkala</li> <li>3) Adanya pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun</li> <li>4) Pemeriksaan ibu hamil</li> <li>5) Tersedianya sarana persalinan pada pelayanan kesehatan</li> <li>6) Adanya pelayanan tumbuh kembang anak melalui kartu menuju sehat (KMS)</li> </ul>

		7) Adanya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja
4	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya pengembangan PAUD jalur nonformal usia 4 – 6 tahun</li> <li>2) Memberikan penyuluhan kepada anak yang putus sekolah agar tetap melanjutkan pendidikannya pada jalur PNF</li> <li>3) Adanya perpustakaan desa</li> <li>4) Membiasakan penggunaan bahasa ibu</li> <li>5) Memperkenalkan adat istiadat, teknologi, pakaian, kesenian dll</li> <li>6) Memberikan pendidikan karakter (nilai – nilai luhur)</li> <li>7) Adanya sanggar budaya untuk aktifitas anak</li> <li>8) Menghidupkan permainan tradisional</li> <li>9) Penyediaan tempat bermain anak</li> </ol>
5	Perlindungan Khusus anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memastikan desa/kampung siaga anak</li> <li>2) Adanya penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik social</li> <li>3) Penyuluhan dan pencegahan kekerasan terhadap anak</li> <li>4) Penyuluhan dan pencegahan penyalagunaan NAFZA</li> <li>5) Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak</li> <li>6) Adanya pecegahan anak terhadap eksploitasi</li> </ol>

### c) Desa Wisata

#### a. Latar Belakang

Perubahan dari wisata massal menjadi wisata alternatif memberikan keuntungan bagi desa wisata sebagai pilihan dalam mengembangkan pariwisata. Desa wisata umumnya memiliki keragaman produk yang dapat ditawarkan pada wisatawan dengan produk utama yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Perubahan ini mengarah pada jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam, atau budaya local

dengan tujuan meningkatkan wawasan, petualangan, dan belajar seperti petualangan (adventure tourism), mendaki gunung (hiking), berjalan (trekking), dan juga wisata yang menawarkan pengalaman langsung seperti wisata pedesaan (*village tourism*).



Gambar 1. Tren Pariwisata

Desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan kearifan local kultural masyarakatnya dan juga dapat memicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan: Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan UUD RI 1945. Pemerintah tingkat desa

memiliki otonomi sendiri untuk mengelola sumber daya dan arah pembangunannya.

Salah satu model pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat dengan *Community Based Tourism* (CBT) adalah pengembangan desa wisata. Desa Wisata (Kampung Nagari, Gampong, atau sebutan lainnya) adalah Kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya Tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria:

- a. Memiliki potensi daya Tarik wisata (daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan/karya kreatif).
- b. Memiliki komunitas masyarakat.
- c. Memiliki potensi sumber daya manusia local yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata)
- d. Memiliki Lembaga pengelolaan
- e. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata
- f. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Desa wisata bisa saja terdiri dari lebih dari satu desa yang berdekatan sehingga menciptakan sebuah wisata berbasis pedesaan yang terintegrasi.

#### *b. Prinsip Pengembangan Desa Wisata*

1. Keaslian: atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut
2. Masyarakat setempat merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat: masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata.
4. Sikap dan Nilai: tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari.



5. Konservasi dan daya dukung: tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun social masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

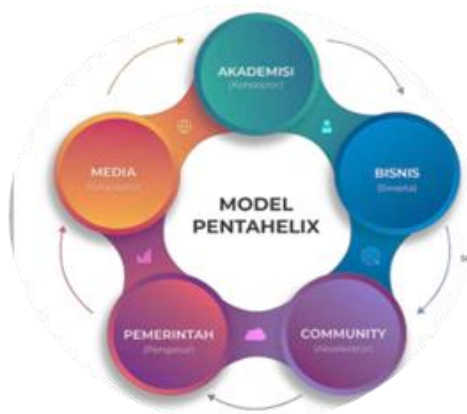
Desa wisata mampu mengurangi arus urbanisasi karena banyak aktivitas ekonomi di desa yang dapat diciptakan. Selain itu juga, desa wisata juga menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya local dan nilai-nilai kearifan local yang ada di masyarakat.

### *c. Jenis-jenis Desa Wisata*

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam  
Yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya Tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya.
2. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal  
Yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat sebagai daya Tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi, maupun bentuk aktivitas lainnya.
3. Desa Wisata kreatif  
Yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industry rumah tangga masyarakat local, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama.
4. Desa wisata berbasis kombinasi  
merupakan desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya Tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya dan kreatif.

### *d. Pentahelix Pengembangan Desa Wisata*

Pengembangan desa wisata harus terintegrasi dan berkolaborasi dengan 5 unsur penting (pentahelix), yaitu:



Gambar 2. Model Pentahelix

1. Akademisi

Peran akademisi di sini adalah berbagi informasi dengan pelaku stakeholder. Akademisi berperan sebagai konseptor, seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan ketrampilan pada sumber daya manusia.

2. Bisnis

Bisnis tersebut ialah pengelola, warung masyarakat, pelaku usaha yang berperan sebagai *enabler* yang menghadirkan fasilitas dan kualitas untuk kemajuan ekonomi daerah serta dapat membantu pengembangan wisata menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.

3. Komunitas

Merupakan orang-orang yang berperan sebagai akselerator. Bertindak sebagai pelaku, penggerak dan penghubung untuk membantu pengembangan pariwisata dalam keseluruhan proses sejak awal.

4. Pemerintah

Merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan pariwisata, berperan sebagai regulator

sekaligus berperan sebagai kontroler. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi public, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan.

5. Media

Media berfungsi sebagai pemberi informasi, Pendidikan, penghibur dan sebagai pengontrol social. Media merupakan perangkat promosi yang mencakup aktivitas periklanan, *personal selling*, *public relation*, informasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) dan *direct marketing* serta berperan kuat untuk mempromosikan dan membuat *brand image*.

e. Konsep Pembangunan Desa Wisata

Desa wisata Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 3 produk unggulan potensi yaitu budaya, alam dan kreatif. Roh desa wisata Indonesia sebagai implementasi keterhubungan multidimensi yang holistic harus mengedepankan konsep *See, Feel and Explore* sebagai desa wisata.



Gambar 3. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata



Gambar 4. Konsep Pembangunan Desa Wisata

#### f. Pengembangan Desa Wisata

Terdapat 5 indikator dasar dalam mengklasifikasikan desa wisata, yaitu jumlah kunjungan, industry pariwisata yang berkembang, kesiapan skill dan SDM, Diversifikasi produk dan aktivitas udaha serta amenities produk. Pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Rintisan

Penentuan klasifikasi desa wisata rintisan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata.
- b. Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas.
- c. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh.
- e. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).
- f. Memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata.
- g. Pengelolaan desa wisata masih bersifat local desa.

2. Berkembang  
Penentuan klasifikasi desa wisata berkembang dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah.
  - b. Sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata.
  - c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.
3. Maju  
Penentuan klasifikasi desa wisata maju dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya.
  - b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
  - c. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai.
  - d. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/keompok kerja local.
  - e. Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata.
  - f. Sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
4. Mandiri  
Penentuan klasifikasi desa wisata Mandiri dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri.

- b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia.
- c. Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN.
- d. Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sector dan pentahelix sudah berjalan baik.
- e. Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata.
- f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjaul secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi).

Penentuan klasifikasi Desa Wisata dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun oleh perangkat desa yang membidangi pariwisata Bersama dengan OPD yang membidangi pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

*g. Manfaat Pengembangan Desa Wisata*

1. Tingkat hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi tetap lestari.  
Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata dapat menciptakan lapangan kerja baru hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui fasilitas yang diperbaiki agar layak dikunjungi.
2. Manfaat perekonomian bagi masyarakat pedesaan.
3. Meningkatkan keberadaan industry kecil dan menengah.
4. Promosi produk lokal.

#### *h. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal*

Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal yaitu pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata ini dimiliki, dioperasikan, dikelola dan dikoordinasikan oleh komunitas, yaitu masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perlu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas.
2. Meningkatkan pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata kepada penduduk local.
3. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
4. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
5. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

# 8 KRITERIA CBT ASEAN + 1 DIGITALISASI

NO.	KRITERIA A	NO.	SUBKRITERIA
1.	Kepemilikan dan pengurusan oleh masyarakat	1.1	Terdapat pengelolaan yang efektif dan transparan
		1.2	legalitas lembaga/kelompok Desa Wisata
		1.3	Memiliki pengelolaan yang efektif dan transparan
		1.4	Memiliki kemitraan yang efektif
		1.5	BUM Desa sebagai badan usaha mengelola Desa Wisata dengan berkolaborasi bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
		1.6	Kepemilikan yang pengelolaannya melalui kerjasama pemerintah desa dengan pihak yang akan mengelola desa wisata
		1.7	Kepemilikan yang pengelolaannya membentuk lembaga baru yang mengelola dan mengembangkan desa wisata dengan melibatkan beberapa unsur
2.	Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial	2.1	Menjaga martabat manusia
		2.2	Pembagian biaya dan keuntungan yang adil
		2.3	Memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional
		2.4	Melestarikan sumber daya alam
3.	Kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan	3.1	Melestarikan sumber daya alam
		3.2	Aktifitas konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan



NO.	KRITERIA A	NO.	SUBKRITERIA
4.	Mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan pengunjung (wisatawan)	4.1	Terdapat interaksi antara tamu dan masyarakat lokal
		4.2	Keberlanjutan produk-produk wisata berbasis masyarakat
		4.3	Peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat desa oleh pemerintah desa
5.	Jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas	5.1	Kualitas dan keahlian pramuwisata desa wisata
		5.2	Memastikan kualitas perjalanan wisata
		5.3	Pemantauan kinerja dari jasa perjalanan wisata dan pramuwisata oleh pemerintah desa
		5.4	Jasa perjalanan wisata dan pramuwisata harus menerapkan standar kesehatan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Kualitas makanan dan minuman	6.1	Kualitas pelayanan makanan dan minuman
		6.2	Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas
7.	Kualitas akomodasi	7.1	Kualitas pelayanan akomodasi
		7.2	Memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas
8.	Kinerja Friendly Tour Operator	8.1	Komitmen kepada nilai-nilai ideal desa wisata
		8.2	Kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan alam
		8.3	Dukungan terhadap ekonomi lokal
		8.4	Mempromosikan indahnya penemuan, pengetahuan dan penghargaan
		8.5	Mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat
		8.6	Masyarakat lokal yang sadar wisata
		8.7	Masyarakat lokal yang memahami sapta pesona dan menerapkannya
9.	Pemanfaatan Teknologi	9.1	Menerapkan teknologi sebagai media penyebaran informasi dan promosi
		9.2	Menerapkan teknologi dalam pengelolaan desa wisata

Sumber: Adaptasi 8 kriteria CBT ASEAN

Gambar 5. Kriteria CBT ASEAN

### *i. Strategi Pengembangan Desa Wisata*

Desa wisata sebagai satu kesatuan ekosistem memerlukan satu pemahaman yang terintegrasi mengenai bagaimana desa mengeksplorasi kenunikan, kelebihan serta melihat kekurangan untuk menjadi kekuatan atraksi sebagai desa wisata. Identifikasi kelemahan kekurangan serta menetapkan produk unggulan desa sebagai desa wisata dengan potensi pilihan utama sebagai prioritas penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep explorasi diri dari desa sebagai ekosistem yang terdiri dari komponen:

#### 1. SDM Unggul

Peningkatan skill dan pengetahuan masyarakat desa/komunitas penggerak desa sebagai peran utama yang memiliki desa sebagai host atau tuan rumah terkait desa wisata sebagai satu kesatuan ekosistem.

#### 2. Atraksi (Daya Tarik)

Atraksi atau potensi atraksi sebagai satu penawaran “*Experience*” dengan kata lain pengalaman berwisata bagi wisatawan atau tamu yang berkunjung menikmati alam, budaya serta kreativitas proses berkarya dari masyarakat desa. Atraksi dibagi menjadi 3 kategori:

- a. Alam. Keindahan bentang alam, pemandangan, fauna dan flora, pesisir dan bentang laut dengan keindahan bawah lautnya. Aktivitas lain seperti menjelajah atam, bersepeda gunung, menunggang kuda, memanjat tebing, menyelam dan snorkeling, safari, melakukan pendakian, berkemah, geopark, berkunjung ke taman nasional dan lain sebagainya.
- b. Budaya. Sejarah, seni dan kerajinan, acara dan pertunjukan masyarakat local, masakan khas dan aktivitas lain seperti menghadiri festival, Heritage, upacara adat, belajar tarian, sejarah dan warisan budaya.

- c. Kreatif. Mengkombinasikan beberapa kategori seperti membatik dengan motif potensi alam, pembuatan pewarna alami untuk batik dll.
- 3. Aktivitas  
Aktivitas keseharian sebagai suatu proses interaksi budaya dan pengalaman pertukaran budaya menjadikan kegiatan berwisata membuahakan pengalaman berwisata yang tidak terlupakan.
- 4. Amenitas  
Amenitas sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan wisatawan untuk dapat menikmati atraksi dengan pengalaman yang maksimal. Kelengkapan sarana prasarana sebagai infrastruktur dasar seperti layanan umum, transportasi public dan jalan. Layanan langsung bagi wisatawan seperti informasi, rekreasi, pemandu wisata, operator wisata, catering dan fasilitas belanja.
- 5. Aksesibilitas  
Aksesibilitas atau kemudahan yang diberikan kepada wisatawan untuk dapat menikmati desa sebagai destinasi wisata yang ramah dan mudah bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisatanya dengan nyaman dan nyaman.

*j. Branding, Advertising and Selling*

*1. Branding*

Pembuatan slogan/tagline desa wisata sesuai dengan karakteristik dan konsep desa wisata yang ingin dibentuk sebagai ciri khas dari desa wisata yang dapat mudah diingat oleh wisatawan.

*2. Advertising*

Promosi desa wisata kepada wisatawan, baik dari menggunakan media cetak maupun online untuk menarik minat wisatawan agar mengunjungi desa wisata.

*3. Selling (Misi Penjualan)*

Dapat dilakukan dengan mengikuti event seperti *travel*

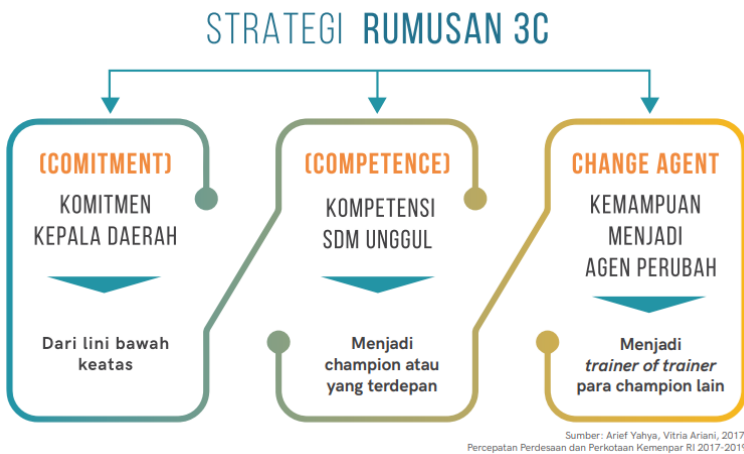
*fair, bazar*, pameran dengan menawarkan atraksi dan produk wisata yang ada di desa wisata. Selain itu desa wisata dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi desa wisata melalui:

- e. Penggunaan Media Sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.
- f. Menentukan segmentasi wisatawan yang ingin dituju, umumnya berdasarkan umur dan asal wisatawan. Sebagai contoh: Youtube dan Facebook ditujukan bagi keluarga dan wisatawan secara general, umumnya yang dipasarkan adalah atraksi menyenangkan. Instagram dan Tiktok ditujukan bagi wisatawan muda dan yang dipasarkan adalah pemandangan yang indah, pengalaman menegangkan dll. Selain itu terdapat platform Desa Wisata dan Website Desa yang bisa memuat informasi lengkap tentang desa wisata.
- g. Menggunakan media Gambar dan Video yang menarik.
- h. Menggunakan Bahasa persuasive, menarik minat pembaca untuk mengetahuinya lebih jauh.
- i. Pada segi penjualan, digitalisasi dapat dimanfaatkan dengan mendaftarkan atraksi desa wisata ke dalam marketplace atau website yang menjual atraksi wisata seperti Traveloka, Agoda dan lain-lain.
- j. Membuat Website desa wisata, dapat memanfaatkan halaman blog gratis seperti blogspot untuk dapat menuliskan secara lengkap tentang desa wisata.



Gambar 6. Program Promosi Desa Wisata

Pengembangan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari penerapan strategi rumusan 3C yang terdiri dari komitmen pemangku jabatan di daerah dari lini bawah kepala desa sampai dengan gubernur yang digambarkan sebagai CEO *Comitment*. Setelah itu penting adanya peningkatan kapasitas pelaku desa wisata dan Masyarakat yaitu digambarkan sebagai *Competence* yang melahirkan *Champion* atau SDM desa wisata yang unggul dan mumpuni. Para SDM ini yang nantinya berperan sebagai *change agent* atau agen perubah desa menjadi *trainer of trainer* dari *champion* baru yang akan dilahirkan di desa-desa yang menjadi binaan mereka.



Gambar 7. Strategi Rumusan 3C

k. *Implementasi Program Desa Wisata*

# IMPLEMENTASI PROGRAM

NO.	ASPEK	ATRAKSI
<b>Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas (A3)</b>		
1	<b>RINTISAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengidentifikasi dan menginventarisir potensi dan karakteristik desa dari semua aspek</li><li>2. Mensosialisasikan potensi kepada seluruh masyarakat</li><li>3. Menyusun rencana kerja pengembangan desa wisata</li><li>4. Merintis pengembangan fasilitas dan sarana prasarana</li></ol>
2	<b>BERKEMBANG</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementasi rencana pengembangan potensi dan karakteristik desa menjadi daya tarik wisata utama dan pendukung</li><li>2. Menyusun paket wisata berdasarkan potensi dan karakter desa</li><li>3. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana mendukung wisata</li></ol>
3	<b>MAJU</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan inovasi terhadap produk yang ada</li><li>2. Memperkaya produk yang ada dengan produk baru yang sesuai dengan karakter kebutuhan pasar</li><li>3. Melengkapi fasilitas pendukung yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan wisata</li></ol>
4	<b>MANDIRI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan inovasi/diversifikasi produk lebih dari satu berbasis kewirausahaan mandiri masyarakatnya sesuai dengan pasar yang tepat</li><li>2. Melakukan pengembangan produk wisata yang terintegrasi dengan destinasi lain</li><li>3. Mengimplementasikan daya dukung destinasi pada pengelolaan kunjungan wisatawan sesuai dengan konsep pariwisata berkelanjutan</li></ol>

Gambar 8. Implementasi Program Desa Wisata Aspek Atraksi

NO.	ASPEK	AMENITAS
<b>Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas (A3)</b>		
1	<b>RINTISAN</b>	<p>Peningkatan kebersihan desa wisata dan penyediaan sarana prasarana umum seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Listrik atau sumber penerangan lainnya</li> <li>2. Ketersediaan air bersih</li> <li>3. Jaringan telekomunikasi atau sinyal telepon selular</li> <li>4. Fasilitas keamanan</li> <li>5. Kios kelontong, warnet, wartel</li> <li>6. Fasilitas kesehatan</li> <li>7. Fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, tempat sampah</li> <li>8. Fasilitas ibadah</li> <li>9. Fasilitas rekreasi, fasilitas bermain, fasilitas olahraga, fasilitas pejalan kaki</li> <li>10. Fasilitas lahan parkir</li> </ol>
2	<b>BERKEMBANG</b>	<p>Penyediaan fasilitas pariwisata yang diperlukan sebagai contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas pusat informasi pariwisata desa/kawasan pedesaan terkait dapat memanfaatkan kantor/bangunan desa/homestay</li> <li>2. Satgas wisata</li> <li>3. Tempat penjualan cinderamata</li> <li>4. Pelayanan penyediaan makanan dan minuman seperti restoran oleh warga setempat dengan menu minimal makanan khas</li> <li>5. Penyediaan akomodasi seperti homestay/losmen</li> </ol>
3	<b>MAJU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi Sumber Daya alam dan budaya di desa wisata dan menerapkan konsep keberlanjutan</li> <li>2. Peningkatan jumlah rumah penduduk yang dipakai sebagai homestay</li> <li>3. Pembangunan TIC (<i>Tourism Information Center</i>)</li> <li>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas toilet</li> <li>5. Peningkatan kapasitas lahan parkir</li> <li>6. Penyediaan fasilitas penyangga kebutuhan khusus, orang tua, dan anak-anak di pusat desa atau kawasan pedesaan</li> </ol>
4	<b>MANDIRI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan amenitas sebagai bagian dari atraksi dengan desain yang berkearifan lokal</li> </ol>

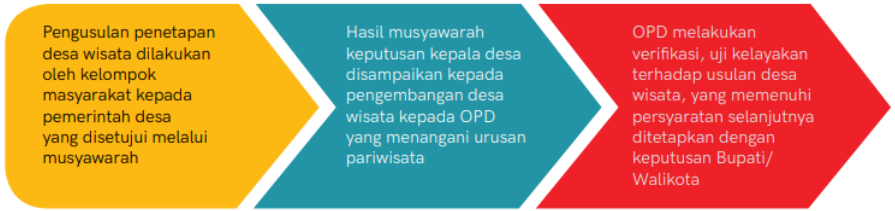
NO.	ASPEK	AKSESIBILITAS
Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas (A3)		
1	RINTISAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan lingkungan desa wisata</li> <li>2. Perkerasan jalan</li> <li>3. Pembuatan dermaga/tempat berlabuh</li> <li>4. Pembuatan jembatan titian</li> </ol>
2	BERKEMBANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan akses jalan lingkungan</li> <li>2. Pemasangan rambu penunjuk arah</li> </ol>
3	MAJU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan angkutan wisata di dalam dan menuju ke desa wisata</li> </ol>
4	MANDIRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan angkutan wisata ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal</li> <li>2. Akses desa wisata ramah lingkungan dan aman bagi anak serta penyandang disabilitas</li> <li>3. Pengembangan akses melalui digitalisasi</li> </ol>
NO.	ASPEK	SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT
Sumber Daya Manusia, Manajemen, dan Industri (SMI)		
1	RINTISAN	Membangun/membentuk sumber daya manusia lokal menjadi kelompok masyarakat yang mau bekerja/berpartisipasi dalam pembangunan desanya
2	BERKEMBANG	Memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat dengan berbagai macam keterampilan sesuai dengan karakter dan potensi produk yang dimiliki desa
3	MAJU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan kelompok masyarakat yang mandiri dan mampu membangun tim kerja yang kuat</li> <li>2. Membangun kerja sama antara kelompok masyarakat dengan pihak lainnya</li> </ol>
4	MANDIRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam hal pengembangan produk dan pengelolaan desa wisata dari hulu ke hilir</li> </ol>

Gambar 9. Implementasi Program Desa Wisata Aspek Amenitas, Aksesibilitas dan SDM

### I. Penetapan Desa Wisata

Penetapan desa wisata melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut:





Gambar 10. Tahapan Penetapan Desa Wisata

Verifikasi dan uji kelayakan terhadap usulan Desa Wisata dilaksanakan secara kolaboratif lintas organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:

1. OPD yang menangani bidang pariwisata
2. OPD yang menangani bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada skema perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pengembangan desa wisata yang potensial menjadi target program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan peran Desa sebagai Desa Wisata.

#### *m. Kelembagaan Desa Wisata*

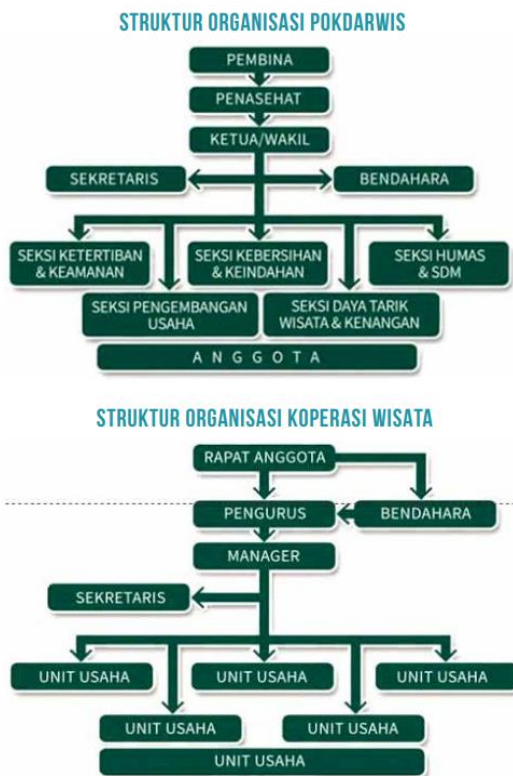
Dalam perkembangannya, pengelolaan desa wisata dapat dilakukan dengan 3 lembaga pengelola yang kesemuanya berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. **Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)**  
Kelompok ini dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata setempat sebagai penggerak kegiatan sadar wisata. Di dalam pokdarwis aka nada beberapa kelompok kerja kegiatan pariwisata yang ada di satu destinasi atau satu desa yang

memiliki destinasi wisata. Anggota pokdarwis adalah pelaku-pelaku kegiatan pariwisata.

b. Koperasi

Desa wisata juga dapat dikelola oleh koperasi, dimana koperasi didirikan sedikitnya oleh 20 anggota yang membentuk kepengurusan koperasi dan dikukuhkan oleh Dinas Koperasi setempat menjadi badan hukum yang berkewajiban mengelola kegiatan dan mendapatkan keuntungan SHU dan dipertanggungjawabkan pada RAT koperasi. Kepengurusan koperasi dapat diperbarui secara periodic atau sesuai usulan dalam RAT.



Gambar 11. Struktur Organisasi Pokdarwis dan Koperasi Wisata

c. BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa. Kelembagaan yang dibentuk menyerupai perusahaan, dimana sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa dengan mengangkat direksi untuk menjalankan unit usaha di desa dengan menggunakan skema penyertaan modal dan asset desa. Di antara sekian banyak usaha yang bisa dilakukan BUMDesa, salah satunya adalah usaha pariwisata untuk desa yang memiliki potensi dan produk wisata di desa tersebut.



Gambar 12. Struktur Organisasi BUM Desa

n. Pendanaan Desa Wisata

Sumber pendanaan pengembangan Desa Wisata antara lain dapat diperoleh dari:

1. Penganggaran dan pembiayaan Desa

Wisata yang dikelola desa berdasarkan kewenangannya ditetapkan dalam APBDesa yang sumber pendanaannya

ditentukan oleh Desa dalam Musyawarah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan bidang lainnya yang mendukung kemajuan dari Desa Wisata tersebut.

2. Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan di Desa, yaitu: Pembangunan sarana dan prasarana penunjang desa wisata, pemberdayaan masyarakat desa seperti pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran wisata.

o. Tahapan Penetapan Penggunaan Anggaran Desa

**Tahap I: Musyawarah Desa**

1. Masuk dalam pembahasan yang dilaksanakan oleh BPD dengan Kepala Desa dan masyarakat merumuskan dan menentukan wisata yang merupakan kewenangan desa.
2. Pembahasan pada musyawarah desa yaitu meenyepakati bahwa Desa Wisata merupakan program prioritas sesuai kewenangan pembagian porsi anggaran desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disepakati Bersama dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan teranggarkan dalam APBDEsa termasuk menentukan sumber pendapatan yang digunakan.
3. Hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah desa paling sedikit meliputi:
  - a. Pencermatan ulang RPJMDesa
  - b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya
  - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya
  - d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
4. Hasil Musyawarah desa dituliskan dalam Berita Acara
5. Musyawarah Desa tentang Perencanaan diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan Ketika ada kebutuhan strategis lain

6. Kebutuhan Desa Wisata masuk prioritas program dan kegiatan melalui RPJMDesa dan RKPDesa.
7. Desa menerapkan Perdes tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata di Desa tersebut.

## **Tahap II: Penyusunan Rancangan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa**

1. Hasil Musyawarah Desa menjadi acuan Kepala Desa untuk memasukkan Desa Wisata menjadi kegiatan Prioritas Desa dalam RKPDesa dan apabila menjadi sesuatu yang sangat strategis dapat direvisi RPMJDesa dengan memprioritaskan Desa Wisata.
2. Sebagai tindaklanjut mempersiapkan RKPDesa Kades membentuk tim Analisis Kelayakan wisata dan tim Penyusunan RKPDesa untuk mensinkronkan dan mensinergikan kebutuhan serta strategi dan proses pengelolaan yang akan dimasukkan dalam RKPDesa dan dianggarkan dalam APBDDesa.
3. Selanjutnya draft hasil analisis dan hasil penyusunan RKPDesa dibahas terpisah dan dilaksanakan pada kualitas kebutuhan.
4. RKPDesa yang disusun oleh Desa kemudian dilanjutkan untuk dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat.
5. Untuk analisis kelayakan yang dilakukan oleh tim kelayakan dibahas dalam musyawarahDesa dengan agenda pembahasan pembacaan dan publikasi kelayakan wisata yang dikelola Desa dengan mengundang atau melibatkan tim verifikasi uji kelayakan oleh OPD bidang pariwisata dan bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Draft RKPDesa dibahas dalam Musrenbangdesa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan agenda pembahasan dengan BPD dan masyarakat, membahas kesepakatan program Desa Wisata yang menjadi agenda prioritas, dan mengundang juga unsur OPD yang akan

mensinkronisasikan program Desa Wisata yaitu Bappeda, OPD bidang Pariwisata, OPD bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan OPD bidang komunikasi dan informasi serta digitalisasi.

7. Pelaksanaan musyawarah Desa membahas kelayakan wisata yang dilakukan oleh Tim Desa, dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbangdes.
8. Penetapan dokumen RKPDesa memastikan bahwa kegiatan Desa Wisata sudah menjadi kegiatan prioritas yang dianggarkan melalui APBDesa.
9. Kepala Desa berkewajiban untuk mempublikasikan kegiatan Desa Wisata kepada masyarakat melalui media publikasi RKPDesa atau dengan publikasi lainnya.

### **Tahap III: Penyusunan Rancangan APBDesa**

1. Penentuan anggaran berpedoman pada Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.
2. Acuan nilai standar biaya dan besaran anggaran harus berdasarkan peraturan di Daerah yang mengatur standar biaya di Desa dan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa.
3. Untuk Rancangan Anggaran Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa berpedoman kepada RKP Desa yang telah disusun.
4. Kepala Desa wajib mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa tentang APBDesa
5. Masyarakat Desa berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila RAPBDesa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa.
6. Apabila dalam penganggaran dan pembiayaan Desa Wisata, ada sumber pendapatan lain yaitu:
  - a. CSR (*Corporate Social Responsibility*) : pendanaan dari perusahaan bisnis untuk berkontribusi kepada

masyarakat dan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.


- b. Dana Hibah
- c. Pendanaan model Bapak Asuh
- d. Pendanaan lain yang bersifat tidak mengikat lainnya

### Tahap IV: Tinjauan RAPBDesa dilakukan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku

Tinjauan yang dilakukan Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Wisata menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Kinerja BPD serta laporan amsyarakat yang ditindaklanjuti sebagai pemantauan dan pembinaan dari Bupati/Wali kota.

**FOKUS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021  
UNTUK MEWUJUDKAN SDGs DESA**

Seluai Permendesa No. 13 Tahun 2020  
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021  
(Tercantum dalam Pasal 5 dan 6 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa)



1. **Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa**
  - Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUM Desa/ BUM Desma (SDGs Desa 8)
  - Penyediaan listrik desa (SDGs Desa 7)
  - Pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUM Desa/ BUM Desma (SDGs Desa 1-2)
2. **Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa**
  - Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)
  - Pengembangan Desa Wisata (SDGs Desa 8)
  - Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa (SDGs Desa 2)
  - Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)
3. **Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman COVID-19** (SDGs Desa 1 dan 3)

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 FOKUS PADA SDGS DESA**

Seluai Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021  
(Implementasi Perpres No. 89 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan  
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)



Gambar 13. Fokus Penggunaan Dana Desa 2021

## d) Desa Preneur

### a. Latar Belakang

Sejak kampanye revolusi hijau mencapai puncak stagnasinya, orientasi pembangunan ekonomi terpusat di wilayah urban. Akibatnya, kantong-kantong kemiskinan menumpuk di perdesaan. Ratusan desa di sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang. Hanya saja seiring dengan perkembangan wilayah, warga desa dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, kebanyakan melakukan urbanisasi ke perkotaan untuk mencari kerja. Urbanisasi tentu hanya memindahkan persoalan kemiskinan dari desa ke kota. Padahal, jika mau, sumber daya ekonomi desa sebenarnya dapat dioptimalkan oleh masyarakatnya. Karakter masyarakat perdesaan yang tahan kemalangan misalnya merupakan modal bagi lahirnya wirausaha desa. Kita tahu syarat kepribadian seorang *entrepreneur* sukses adalah mau bekerja keras dan tahan banting.

Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rustiadi dalam Bachrein, 2010). Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan



pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan (Ansari, 2013). Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.

Upaya untuk mendorong kehidupan wirausaha di desa adalah mengembangkan kampanye program kegiatan yang memiliki dimensi menggali potensi enterpreuner spirit pada tataran desa. Hal itu kemudian dikenal sebagai Desa Preneur. Adapun konsep Program Desa Preneur diinisiasi sejak tahun 2016, dan dilaksanakan tahun 2017 dengan menggunakan APBD. Desa Preneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan *softskill* dari para pelaku usaha, program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Desa Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Lembaga ekonomi desa, seperti: UMKM, koperasi, hingga BUMDES harus terlibat aktif. Mereka dapat membentuk konsorsium bagi pemasaran bersama barang dan jasa yang diproduksi warga. Strategi pemasaran diarahkan pada pembentukan sekaligus penguatan *branding* produk barang atau jasa yang potensial desa.

Dukungan lembaga, seperti: koperasi, BUMDES dan perbankan hingga CSR; diharapkan menjadi mediator manakala ada kelompok usaha skala kecil yang memiliki produk barang atau

jasa berorientasi ekspor. Peran lain dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan *quality control* bagi produk yang dihasilkan. Lembaga tersebut juga diharapkan berkontribusi mengatasi persoalan klasik yang selalu dihadapi usaha mikro dan kecil yaitu ketidakmampuan mengelola keuangan usaha dengan baik. Pada saat yang sama, secara kelembagaan mereka secara profesional dapat menjadi penyalur kredit usaha rakyat.

Selain itu, dukungan pemasaran secara digital merupakan terobosan yang harus diupayakan bagi wirausahawan desa dalam memasarkan produknya menembus ruang dan waktu. Branding produk hingga pencantuman merek dan tatakelola promosi yang berkelanjutan; menjadi strategi yang tidak boleh dikesampingkan. Pengembangan *marketplace* yang terintegrasi atau dilakukan secara mandiri adalah peluang baru yang dapat menjadi pilihan dalam pengembangan desa preneur untuk terus menumbuhkan kehidupan kewirausahaan yang tangguh penuh inovasi dan kreatifitas untuk mewujudkan peradaban baru demi kemuliaan martabat manusia Jogja.

Pengembangan desa preneur sangat diperlukan dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kampanye desa preneur tidak hanya dibatasi melalui wilayah perdesaan saja, melainkan juga dapat dilakukan pada wilayah perkotaan yang memiliki potensi dikembangkan menjadi wilayah *entrepreneurship* yang dapat menjadi contoh pengembangan wilayah melalui pengembangan wirausaha secara massif. Desa preneur sekaligus menjadi branding dalam pengentasan kemiskinan dan kampanye pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi ekonomi / potensi local secara berkelanjutan, baik di desa maupun di kota.

Desa Preneur adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk menggeliatkan dinamika wirausaha ekonomi berbasis potensi maupun kearifan lokal, melalui unit usaha untuk dapat dikelola menjadi berkualitas global dengan penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan.

### b. Maksud dan Tujuan

Desa Preneur dikembangkan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan dinamika entrepreneurship dan membantu pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Desa Preneur dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi usaha ekonomi secara berkelanjutan.
2. Peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas sumberdaya manusia para pelaku UMKM

### c. Semangat / Tata Nilai

Desa Preneur dikembangkan dengan semangat kegotongroyongan, partisipatif, efektif-efisien, kreatif-inovatif, kemitraan usaha, dan berpijak pada prinsip akuntabilitas serta berkelanjutan.

### d. Pelaksanaan Kegiatan

#### 1. Fokus dan Lokus

Desa Preneur difokuskan pada pengembangan dinamika wirausaha dalam kehidupan perdesaan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Dilakukan oleh manajemen profesional yang berorientasi non-profit dalam melakukan pendampingan potensi desa melalui pengembangan kapasitas masyarakat agar dapat berdaya dan memiliki semangat wirausaha.
- b) Pemetaan potensi usaha desa
  - **Servig**: kelompok wirausaha menjalankan "bisnis sosial" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat contoh jenis usaha *Servig* yaitu usaha budidaya ikan, usaha

penggilingan padi, usaha jasa buruh tanam/panen, usaha brigade semprot hama, usaha listrik desa, lumbung pangan, dll.

- **Banking:** kelompok wirausaha menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha *Banking* yaitu: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dan sebagainya.
- **Renting:** kelompok wirausaha menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, seperti: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.
- **Brokering:** kelompok wirausaha menjadi “*lembaga perantara*” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Contoh jenis usaha *Brokering* yaitu: jasa pembayaran listrik, PAM, telekomunikasi, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.
- **Trading:** kelompok wirausaha menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha *Trading* antara lain: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi

pertanian, dll.

- **Holding**: kelompok wirausaha sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh suatu manajemen tatakelola usaha tertentu (BUMDES, koperasi, usaha profesi, kelompok ekonomi, dan sejenisnya) agar tumbuh usaha bersama.

Untuk itu, syarat fokus keberhasilan pengembangan desa preneur, harus memperhatikan terwujudnya situasi:

- a) Kelompok dan keanggotaan wirausaha desa  
Kelompok wirausaha di dalam sebuah desa preneur terdiri dari beberapa kelompok usaha yang terdiri dari unsur warga desa (baik terdiri dari pemuda, petani, perempuan desa, wirausahawan desa, dan pekerja potensial) yang memiliki peran, baik di tingkat perencanaan, implementasi dan evaluasi.
- b) Kapasitas dan kualitas produk/jasa  
Kelompok usaha dalam desa preneur menjamin produk/jasa yang dihasilkan mencukupi dalam hal jumlah dan menjamin produk/jasa secara kualitas dengan memperhatikan selera pasar untuk menumbuhkan daya saing dalam pasar.
- c) Tata Kelola keuangan dan administrasi  
Desa Preneur menjadi tata kelola usaha, baik administrasi keuangan berjalan secara inklusif.
- d) Pembinaan dan pendampingan desa  
Desa Preneur menyediakan mekanisme pembinaan dan pendampingan bagi kelompok usaha warga desa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
- e) *Benchmarking*, Pemasaran dan Promosi

Desa Preneur melakukan *benchmarking* terhadap produk-produk unggulan dan melakukan promosi dan pemasaran baik *offline* maupun *online*.

f) Keluasan dampak dan Keberlanjutan

Desa Preneur memiliki dampak dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa melalui pemerataan ekonomi. Desa Preneur juga memastikan keberlanjutan usahanya.

Adapun **lokus** desa preneur adalah desa atau kelurahan di wilayah Lamongan dan Tuban yang:

1. Wilayahnya memiliki potensi usaha, baik barang atau jasa, yang diusahakan oleh sekurangnya 10 orang, baik dilakukan secara personal maupun kelompok.
2. Wilayahnya berada pada kondisi salah satu atau lebih kondisi pada : wilayah kecamatan kantong kemiskinan (sesuai kebijakan Pemerintah Daerah), atau memiliki status desa budaya (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Kebudayaan), atau memiliki status desa prima (ditetapkan sesuai kebijakan DP3AP2), atau memiliki status desa wisata (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Pariwisata), atau memiliki status desa rawan pangan (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan), atau ditetapkan tersendiri oleh Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM.

Penetapan lokus desa preneur dimaksudkan adanya integrasi penanganan wilayah secara terintegrasi lintas sektoral, melalui sentuhan skema pemberdayaan yang sudah dilakukan sektor lainnya, dengan memperhatikan adanya keterpaduan koordinatif antara pemangku kepentingan sesuai kewenangannya. Lokasi desa preneur juga dapat ditetapkan dengan memperhatikan orientasi kebijakan pada tataran Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga dan juga kebijakan strategis yang perlu diambil terkait dengan kerjasama tertentu dengan lembaga BUMN/BUMD/swasta yang memiliki irisan kepentingan yang sama dalam memaknai pemberdayaan masyarakat melalui skema desa

preneur, apabila ditemukan kondisi diluar prasyarat penentuan lokus desa preneur sebagaimana tersebut diatas.

*e. Tahapan Pelaksanaan*

Setiap tahapan dilakukan dengan pendampingan berbasiskan kelompok usaha yang ada pada setiap desa, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tahapan		Tahun ke-	Definisi
UTAMA	Embrio/ Penumbuhan	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan tahap awal, atau tahap pengenalan atau pendalaman terhadap potensi desa</li> <li>• Dilakukan sosialisasi sekaligus pemahaman tentang dinamika tatakelola wirausaha</li> <li>• Sudah teridentifikasi potensi kelembagaan)</li> </ul>
	Pengembangan	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan tahap pengembangan usaha melalui manajemen pemasaran dan strategi usaha yang Efektif</li> </ul>
	Maju	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• merupakan tahap lanjut yang diorientasikan pada promosi usaha dan perluasan jejaring/kemitraan</li> </ul>
LANJUT	Pelepasan	4 atau 5	Tidak ada intervensi sama sekali
	Evaluasi/ Pembinaan	5 atau 6	Pembinaan pasca tahun ke-4/5 untuk mengetahui dampak usaha terhadap perekonomian wilayah/desa dan keberlanjutan usaha untuk dilakukan kebijakan selanjutnya

*f. Materi Tahapan*

Tahapan	Materi Utama yang harus disampaikan
<b>Embrio/Penumbuhan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen dasar untuk tatakelola kewirausahaan, yakni: manajemen perencanaan usaha, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen sumberdaya manusia, termasuk : leadership</li> <li>Kapasitas dan kualitas produk yang diminati pasar dan jeli terhadap peluang pasar</li> <li>Karakter pasar potensial yang akan menjadi sasaran</li> </ul>
<b>Pengembangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen pemasaran : sistem pemasaran yang baik</li> <li>Daya tarik produk : branding, merek, daya saing, sertifikasi, cara promosi/pengembangan digitalisasi usaha</li> </ul>
<b>Maju</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan mitra dan jejaring bisnis</li> <li>Pelaksanaan pameran usaha</li> </ul>

*g. Indikator Keberhasilan Tahapan*

No	Instrumen	Indikator		
		Embrio/ Penumbuhan	Berkembang	Maju
1	Produk Usaha	a. Masih berupa potensiyang dapat dikembangkan b. Pemanfaatan potensimasih sebatas digunakan dalam lingkup kecil (dusun)	a. Potensi sudah mulai dikelola dan difasilitas. b. Munculnya aktivitas usaha atas produk secaramassif dalam lingkup desa. c. Produk mulai dikenalkan terhadap kualitas usaha (merek, sertifikasi, kemasan, higienitas, dsb)	a. Produk sudah memiliki kualifikasi usaha (merek atau sertifikat atau daya tarik spesifik local yang bersifat global). b. Terdapat aktivitas usaha atas produk hingga luar lingkupdesa secara berkelanjutan c. Produk sudah dipasarkan hingga keluar



			d. Produk sudah mulai dipasarkan melalui media yang ada (konvensional atau digital)	wilayah desa
2	Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Kesadaran masyarakat terhadap potensi usaha belum tumbuh/ masih rendah.</p> <p>b. Pola pikir masyarakat tentang jiwa wirausaha mulai tersadarkan</p> <p>c. Sudah terbentuk kelompok usaha</p>	<p>a. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan atas produk secara berkelanjutan</p> <p>b. Kesadaran masyarakat terhadap potensi usaha sudah tumbuh.</p> <p>c. Kapasitas masyarakat untuk berkelompok/b erorganisasi dgn baik sudah muncul</p> <p>d. Kemauan untuk melakukan usaha secara konvensional maupun digital sudah terfasilitasi</p>	<p>a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi usaha strategis.</p> <p>b. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan usaha melalui kelompok usaha yang berorientasi pasar.</p> <p>c. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi maupun social terkait tatakelola usaha, baik konvensional maupun digital</p>
3	Pemasaran dan promosi	<p>a. Belum ada/ masih sedikit sekali produk yang dihasilkan/di pasarkan</p> <p>b. Belum adanya media</p>	<p>a. Sudah mulai dikenal dan sudah ada transaksi yang cenderung masif</p> <p>b. Sudah mempunyai media promosi</p>	<p>a. Sudah menjadi produk usaha yang dikenal.</p> <p>b. Mampu melakukan promosi dan pemasaran serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar.</p>

		promosi	(brosur, marketplace)	
4	Kelembagaan dan SDM	<p>a. Belum memiliki pengorganisasi anusaha.</p> <p>b. Masih secara spontandalam menerima pesanan usaha.</p> <p>c. Belum adanya pengembangan kualitas dalam bidang kewirausahn</p>	<p>a. Memiliki kelompok usaha ekonomi.</p> <p>b. Masih perlu pendampingan dari pihakterkait (pemerintah/ pemda/ pemkab, perbankan, swasta)</p>	<p>a. Masyarakat sudah mulai mandiri dan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan</p> <p>b. Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (perbankan, swasta, pemkab)</p>

*h. Outcomes, Benefits, dan Impact yang Diharapkan*

1. Hasil (*Outcomes*) Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa yang berkelanjutan pada semua elemen desa yaitu pemerintah, lembaga dan usaha masyarakat.
2. Manfaat (*Benefit*)  
Adanya produk strategis desa yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan terus berkembang, sehingga kesejahteraan warga desa tercapai dengan berpijak pada kearifan lokal.
3. Dampak (*Impact*)  
Melalui peningkatan pendapatan maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat sehingga menumbuhkan perekonomian desa, akhirnya target penurunan kemiskinan dapat tercapai dan jurang ketimpangan pendapatan semakin sempit.

### *i. Kerjasama Pelaksanaan*

1. Pelaksanaan pengembangan desa preneur menjadi kewenangan Dinas Koperasi UKM setempat dapat dikonsolidasikan dengan pihak lain, yang memiliki konsep yang senada meskipun dengan branding yang berbeda. Meski demikian, identitas desa preneur adalah semangat utama dalam mengkampanyekan program ini meskipun dalam pelaksanaan yang dilakukan secara kemitraan dapat menggandeng konsep serupa memiliki tahapan yang sama dan tujuanakhir yang sama, seperti: Gerakan Global Gotong Royong (G2R) Tetra Preneur, Pemberdayaan Kiblat Papat Limo Pancer Adiluhung Kawentar (K45AK), dan sejenisnya.
2. Adapun terkait dengan pelaksanaan di lapangan, upaya kampanye desa preneur dapat bekerjasama dengan pendamping desa wisata atau desa budaya atau desa prima atau desa mandiri pangan/rawan pangan atau pendamping lainnya, dalam rangka koordinasi untuk efektifitas/efisiensi pelaksanaan kegiatan yang lebih mudah.

### **e) Desa Anti Korupsi**

#### *a. Latar Belakang*

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, hingga pemberdayaan masyarakat Desa. Masing-masing lembaga Desa memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa, seperti:

1. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut.
2. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

Peranan LPMD yang optimal menjadi sangat penting terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa khususnya dalam perencanaan pembangunan desa (musdes dan musrenbangdes) serta dalam mengawal usulan perencanaan pembangunan desa sesuai usulan masyarakat, peraturan perundang-undangan dan pro swadaya pro partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa dan musrenbang desa.

Peran LPMD adalah:

1. Penyadaran masyarakat melalui sosialisasi agar penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyadaran masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi, swadaya dan gotong royong berkaitan dengan usulan kegiatan pembangunan desa pro swadaya dan pro partisipasi.
3. Melakukan kajian keadaan desa (musyawarah RT/RW/Dusun), yang meliputi penyelarasan data, penggalian gagasan dan penyusunan laporan berdasarkan lima bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Inventarisasi jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (apakah berupa uang, barang, tenaga atau lainnya) sebagai bahan masukan bagi Kepala seksi/kepala urusan (pelaksana kegiatan anggaran).

Tingginya tingkat kompleksitas peran dan keterlibatan yang diemban LPMD pada proses pembangunan desa, berimplikasi pada kesiapan sumberdaya yang mumpuni. Sejalan dengan adanya Permendagri 20 Tahun 2108 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

*b. Regulasi yang Mengatur Upaya Pencegahan Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Beberapa regulasi upaya pencegahan Korupsi pada penyelenggaraan pemerintah desa adalah;

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
13. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
14. Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kapasitas menurut Morgan dalam Soeprpto (2010:10), "*adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu*".

Lebih lanjut, Syarif (1991: 8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan /kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan. Dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa seperti:

1. Kemampuan Dasar, meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi.
2. Kemampuan Manajemen, meliputi: manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan publik, kemampuan manajemen, manajemen asset, dan manajemen keuangan.
3. Kemampuan Teknis, meliputi: penyusunan kemampuan teknis; administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan desa, dan pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung

dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan Undang-Undang Desa dapat berjalan secara optimal. Kapasitas dimaksud diantaranya:

1. Pengetahuan terhadap isi Undang-Undang Desa.
2. Keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif serta pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Terkait aliran dana desa, jika sudah dicairkan hingga ke tingkat kabupaten kemudian disalurkan ke desa, maka Kemendagri akan mengatur penggunaan anggaran tersebut. Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa.

Sebagai contoh, pelatihan yang pernah diikuti oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga antara lain pelatihan keuangan desa, diklat manajemen pemerintah desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan bimtek kearsipan, pelatihan pengembangan ekonomi desa, pelatihan tata cara pemberdayaan badan usaha milik desa dan koperasi desa.

Dalam melaksanakan tugasnya banyak faktor yang mempengaruhi kapasitas aparatur desa, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi.



Kunarjo (2002:23-24) pada dasarnya perencanaan pembangunan mempunyai beberapa prasyarat sebagai berikut: (1) Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan; (2) Perencanaan harus konsistensi dan realistis; (3) Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang berkesinambungan; (4) Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan; (5) Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi; (6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi.

Kompetensi dari aparat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi yang baik, cenderung menghasilkan perubahan-perubahan yang positif baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Diharapkan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia dari sudut kompetensi ini maka sebagian besar alasan keterlambatan dalam hal pertanggungjawaban desa akan berangsur berkurang.

*c. Kapasitas dan Perilaku Aparat dalam Upaya Mencegah Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Sikap kerja harus sesuai dan konsisten dengan tuntutan Undang-Undang Desa, yang tercermin dari komitmen dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintah dan masyarakat desa. Selain itu memandirikan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan pasal-pasal yang mengatur pengertian tindak pidana korupsi.

Pengertian sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Pasal 21 sampai 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto (2014) :

1. Kesalahan karena tidak mengerti mekanisme
2. Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi
3. Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa
4. Pengadministrasian laporan keuangan: *Mark-up* dan *Mark-down, double counting*
5. Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
6. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan
7. Penyelewengan aset desa. Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis properti;

Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Pemerintah Desa sebagai Eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa harus berhati-hati, disiplin mengikuti dan memahami semua aturan, harus transparan, akuntabel serta bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat

penting terutama mencegah terjadinya tipikor. Pengendalian dan pengawasan yang baik akan "mengurangi kemungkinan tindakan kecurangan".

3. Masyarakat Desa, dalam hal ini masyarakat selaku *stakeholder* harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa.

Apabila semua lapisan desa berperan dengan baik, maka pengelolaan keuangan bisa dijaga. Koordinasi baik dilingkungan desa harus bersinergi disetiap lapisan, baik itu antara pemerintah pusat dengan daerah maupun pemerintah daerah ke pemerintah desa dan sebaliknya. *Andrew Haynes dalam Halif (2012), mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya.* Di lansir dari Indonesian *Corruption Watch* tahun 2018 modus korupsi dana desa oleh Pemerintah Desa antara lain sebagai berikut;

1. Penggelembungan Anggaran. Salah satu modus korupsi adalah penggelembungan anggaran (*mark up*), khususnya pada pengadaan barang dan jasa
2. Kegiatan/ Proyek Fiktif. Dalam modus ini, Pemerintah Desa seringkali membuat proyek/kegiatan fiktif yang dalam pelaksanaan sebenarnya tidak ada (fiktif). kegiatan/proyek fiktif tersebut dimaksudkan agar memperoleh pencairan dari dana desa untuk keuntungan pribadi.
3. Laporan Fiktif. Dalam modus ini, laporan yang dibuat tidak sebagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan/proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebenarnya
4. Penggelapan. Modus ini serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya perolehan barang itu

bukan karena kejahatan melainkan secara sah (Hamzah, 2010).

5. Penyalahgunaan Anggaran. Penyalahgunaan anggaran merupakan modus terakhir dalam korupsi dana desa.

Bentuk dari penyalahgunaan anggaran adalah dana yang telah diperuntukan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, khususnya pada 2 (dua) tahapan tersebut disebabkan oleh adanya 3 (tiga) faktor penyebab rentannya korupsi terhadap dana desa.

1. Lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa. Hal diatas berkaitan erat dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran lembaga didalam mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.436 desa.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantif melainkan semu, sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017).
3. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feodalisme di desa-desa menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa.

## f) **Smart Village**

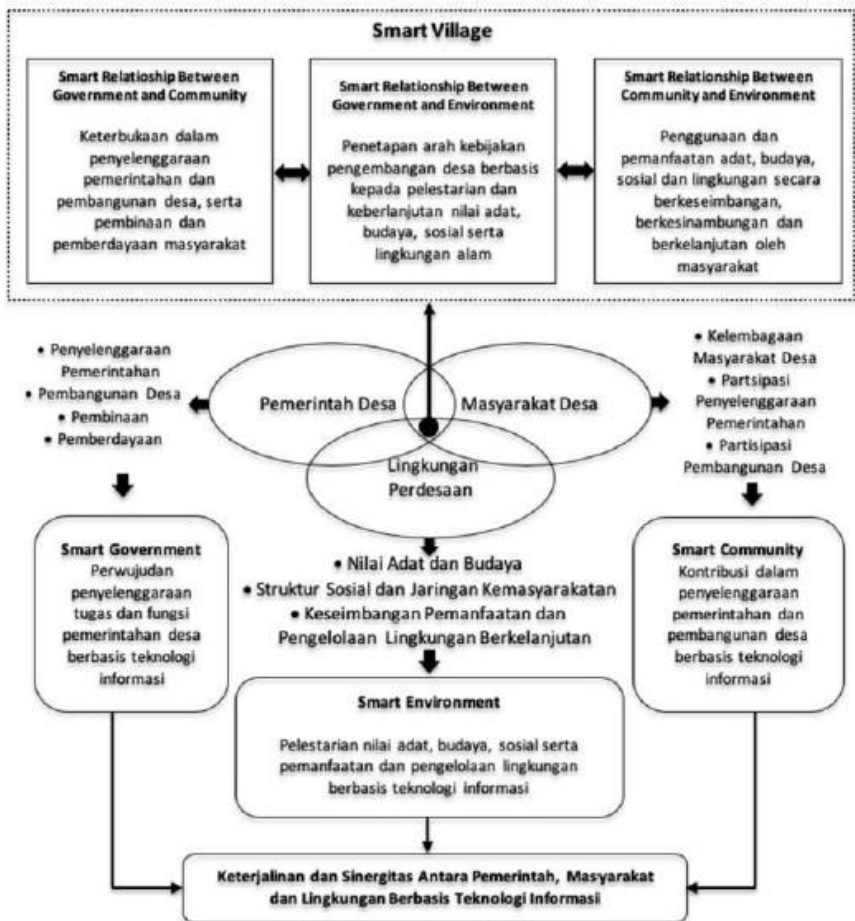
### a. *Latar Belakang*

Konsep *smart village* dipahami oleh para ahli sebagai integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat perdesaan, sehingga menghasilkan kemanfaatan dan kesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat perdesaan. Meskipun demikian, secara konseptual terdapat beberapa perbedaan dimensi *smart village* yang diungkapkan oleh para ahli Dimensi sumber daya, institusi dan teknologi menjadi dimensi yang mendasar bagi terlaksananya *smart village*, sedangkan layanan digital, rantai layanan dan keberlanjutan menjadi dimensi pembeda yang diungkap oleh para ahli tersebut. Kesamaan pemahaman tersebut didasarkan kepada pemahaman bahwa dalam penerapan teknologi informasi dibutuhkan adanya kapabilitas dari institusi sebagai pemegang otoritas dan dukungan kapasitas sumber daya. Dikaitkan dengan konteks desa-desa di Indonesia, maka pemahaman para ahli tersebut harus dipahami secara kaku, tetapi harus menjadi sebuah kesatuan. Institusi harus dipahami sebagai lembaga negara formal bagian dari struktur pemerintahan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah desa sebagai struktur terendah pemerintahan (Kushandajani, 2015; Sajangbati, 2015).

Institusi dilekatkan kepada adanya kewenangan yang diberikan dalam menyusun instrumen kebijakan pengembangan *smart village*. Dimensi sumber daya tidak bisa dipahami secara sempit berupa sumber daya manusia semata, dikarenakan sumber daya dalam konteks desa di Indonesia terdiri dari sumber daya manusia berupa masyarakat perdesaan dan aparaturnya pemerintah desa/institusi dan sumber daya lainnya, yaitu sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya sosial (*social capital*) dan sumber daya budaya (*cultural capital*) (Hatu, 2011; Ramadan & Usman, 2015; Sabardi, 2013). Dikaitkan dengan pengaturan mengenai desa, maka masyarakat merupakan kesatuan hukum yang ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan desa (Silahuddin, 2015).

Atas dasar ini maka masyarakat merupakan satu kesatuan yang terpisah dari pemerintah desa, dalam konteks pengembangan *smart village*, maka masyarakat menjadi dimensi yang bersifat mandiri. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka terdapat dua pemangku kepentingan dalam konteks desa-desa di Indonesia, yaitu pemerintah desa sebagai institusi negara dan masyarakat perdesaan. Kaitannya dengan pengembangan *smart village* maka kedua pemangku kepentingan tersebut merupakan dimensi yang utama yang menjadi dasar terlaksananya *smart village*. Sumber daya lainnya yang ada di desa, yaitu sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya sosial (*social capital*) dan sumber daya budaya (*cultural capital*) dijadikan bagian untuk menunjang kehidupan masyarakat desa dan pemerintahan desa (Agusta, 2007; Angkasawati, 2015; Haryanto, 2013). Dalam konteks ini sumber daya tersebut diintegrasikan menjadi lingkungan perdesaan.

Teknologi informasi dalam konteks *smart village* dijadikan unsur yang mendorong keterjalinan antara pemerintah desa, masyarakat dan lingkungan perdesaan sehingga akan mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan kehidupan perdesaan yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi. Adapun penjelasannya dapat dilihat dalam Gambar 1.



Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan perdesaan merupakan elemen pembentuk *smart village* yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Namun, ketiga elemen tersebut menjadi bagian integral yang saling memengaruhi, sehingga penerapan konsep *smart village* harus didasarkan kepada akomodasi dari ketiga elemen tersebut termasuk di dalamnya

karakter, peran, dan fungsi yang dijalankan dari masing-masing elemen.

### **Smart Government**

Pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2014) memiliki kedudukan sebagai bentuk pemerintahan gabungan antara *self-governing community* dengan *local-self government* (Eko, 2015). Kenyataan ini mengandung artian bahwa dalam struktur desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari unsur masyarakat yang dasar dan orientasi kebijakan pemerintah desa yang dilaksanakan sepenuhnya ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks praktis, hal tersebut diwujudkan ke dalam 4 (empat) fungsi pemerintah desa, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Kushandajani, 2015). Keempat fungsi tersebut sepenuhnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintah desa sebagai struktur organisasi pemerintah terendah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri termasuk di dalamnya pelayanan publik kepada masyarakat (Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin, 2016).

Dalam konteks *smart village*, adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa akan dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara efektif dan transparan kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi secara umum dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pemerintah desa. Pembangunan desa menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terjadi reposisi kewenangan penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa.



Dalam proses pembangunan desa, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dan menjadi bagian dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa. Teknologi informasi menjadi alat selain untuk mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa, juga menjadi media untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan desa. Teknologi informasi mempertemukan berbagai kepentingan untuk bisa dirumuskan secara bersama-sama menjadi sebuah kebijakan pembangunan desa.

Proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekalipun dalam tataran konseptual memiliki karakter dan pendekatan yang mandiri. Sementara itu dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu keharusan di mana masyarakat merupakan bagian dari desa yang tidak hanya dijadikan sebagai objek berbagai kebijakan tentang desa, tetapi juga sebagai subjek yang mampu aktif terlibat dan turut menentukan kebijakan tentang desa. Adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan proses pembinaan dan pemberdayaan menjadi proses yang tidak lagi dilakukan secara tradisional. Teknologi informasi menjadi media bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk saling menemukenali masalah, tuntutan, dan keinginan masing-masing. Di sisi lain, teknologi informasi dapat dijadikan agenda pengembangan dalam pembinaan dan pemberdayaan sebagai bagian produktivitas masyarakat untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat.

### ***Smart Community***

Masyarakat memiliki peran penting dalam konteks *smart village*. Masyarakat tidak hanya sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga sebagai sebuah kesatuan yang memiliki kehendak dan tujuan untuk menentukan arah kehidupannya. Atas dasar itulah, maka masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik

mengenai kedudukan dan perannya di desa. Masyarakat harus menjadi bagian yang aktif dalam proses pengembangan desa sehingga akan menjadi pihak yang menerima manfaat. Realitasnya, masyarakat dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dan masalah, baik yang berasal dari internal seperti rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan, maupun yang berasal dari eksternal. Kondisi tersebut berimplikasi kepada rendahnya kesadaran masyarakat akan peran yang harus dijalankan dalam struktur desa, sehingga masyarakat dalam banyak kasus menjadi pihak yang pasif dan tidak menerima manfaat dari adanya pengembangan desa.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi harus disikapi oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk mengoptimalkan peran serta dan kontribusinya dalam pengembangan desa. Teknologi informasi hadir sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat yang dituntut berkontribusi dalam pengembangan desa. Implikasinya, masyarakat harus memiliki sikap terbuka dan mengadopsi teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks sosial dan pemerintahan desa. Dengan begitu masyarakat tidak hanya akan diuntungkan dari adanya teknologi informasi, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas masyarakat akan menerima keuntungan dari adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks sosial dan pemerintahan di desa.

### ***Smart Environment***

Lingkungan perdesaan dalam konteks *smart village* tidak hanya diartikan sebagai lingkungan alam yang ada di desa, melainkan keseluruhan elemen yang membentuk satu tatanan sosial dan alam yang mencirikan karakter dari desa. Lingkungan perdesaan dalam tatanan sosial terdiri dari adat, budaya dan struktur sosial. Dikaitkan dengan konteks *smart village*, pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan baik dalam

tataran lingkungan sosial maupun dalam tataran lingkungan alam. Dalam tataran sosial, pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat nilai adat, budaya dan struktur sosial yang ada, seperti pendataan, pendokumentasian serta pemanfaatan nilai adat dan budaya yang didasarkan kepada teknologi informasi yang ada. Teknologi informasi juga digunakan untuk mengkreasi nilai adat dan budaya agar lebih bisa dikontekstualisasikan dengan keadaan saat ini tanpa menghilangkan esensi dari adat dan budaya tersebut. Di sisi lain, nilai adat dan budaya dapat dijadikan penangkal nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai adat dan budaya yang ada di desa.

Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam konteks tatanan sosial di desa, maka akan menciptakan kelestarian struktur sosial yang selama ini ada. Bahkan, nilai adat dan budaya yang terdapat di dalam struktur sosial tersebut dapat dikembangkan, dilestarikan sesuai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang. Konteks pemanfaatan teknologi informasi dalam tatanan alam dapat digunakan dalam identifikasi potensi alam serta pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan teknologi informasi jangan merusak tatanan alam yang ada, tetapi harus berperan untuk memberikan cara dan pengetahuan kepada masyarakat untuk memanfaatkan alam secara proporsional, seperti pemanfaatan teknologi informasi bidang pertanian berupa tersedianya informasi pertanian yang tepat waktu dan relevan bagi petani di desa agar para petani dapat menentukan rencana pola tani, pemanfaatan teknologi tersebut pada akhirnya selain akan meningkatkan keterampilan para petani, juga akan meningkatkan produktivitas pertanian yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

### ***Smart Relationship* antara *Smart Government* dan *Smart Community***

Struktur desa menempatkan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perkembangan dan kemajuan desa, sehingga hampir seluruh kebijakan yang menyangkut desa akan senantiasa memperhatikan keberadaan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan desa, masyarakat menjadi dasar dan tujuan dari penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan desa tersebut. Hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi suatu keharusan. Hubungan tersebut harus terjalin dalam berbagai aspek yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus mampu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Teknologi informasi dijadikan sebagai media untuk menghubungkan keduanya. Di satu sisi, teknologi informasi dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai media untuk menyampaikan berbagai layanan kepada masyarakat baik itu layanan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai alat yang mampu mempermudah pembinaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi secara baik oleh pemerintah desa tidak hanya akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa dikarenakan teknologi menjadi alat untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa, tetapi juga pemanfaatan teknologi informasi pada akhirnya akan mampu menciptakan penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintah desa secara transparan dan akuntabel. Di sisi yang lain, penggunaan teknologi informasi dalam proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat akan mampu memperkuat kelembagaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki keberdayaan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dan mampu melihat kinerja pemerintah

desa. Dengan begitu, pemanfaatan teknologi informasi akan mendorong masyarakat untuk bisa menilai kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Lebih dari itu, adanya kelembagaan masyarakat yang kuat akan mampu berkontribusi dalam pengembangan desa ke arah yang baik dan lebih lebih maju. Pemanfaatan teknologi informasi pada akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam menciptakan penyelenggaraan peran dan fungsi secara transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan kelembagaan masyarakat yang kuat yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan desa. Implikasinya, tidak hanya akan menciptakan pemanfaatan teknologi yang efektif, tetapi juga mampu melahirkan keterjalinan hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menciptakan pengembangan dan kemajuan desa.

### ***Smart Relationship antara Smart Governmnet dan Smart Environment***

Hubungan antara pemerintah dengan lingkungan perdesaan dalam konteks *smart village* didasarkan kepada pemahaman bahwa pemerintah harus memahami, mengakui dan mengakomodasi karakteristik dari lingkungan perdesaan. Hal ini penting mengingat penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa akan selalu berkaitan dengan lingkungan perdesaan. Selain itu, keberhasilan pembangunan desa yang saat ini merupakan kewenangan pemerintah desa tidak akan berjalan dengan baik apabila karakteristik dari lingkungan perdesaan tidak diakomodasi di dalamnya. Atas dasar tersebut maka menjadi penting adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan lingkungan perdesaan seperti terpapar di Gambar 2.



Gambar 2. Hubungan antara Pemerintah dengan Lingkungan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi

Adanya kewenangan perencanaan pembangunan desa berskala lokal menuntut proses yang efektif. Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan sebagai sarana untuk mempermudah proses perumusan arah dan tujuan pengembangan desa. Teknologi informasi digunakan untuk proses identifikasi karakter lingkungan perdesaan, sehingga akan melahirkan gambaran yang menyeluruh mengenai nilai adat, budaya, sosial dan lingkungan alam yang menjadi potensi desa untuk bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pembangunan. Dengan begitu, proses penyusunan kebijakan mengenai arah dan tujuan pengembangan desa akan melahirkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan karakter lingkungan perdesaan. Terwujudnya arah dan tujuan pengembangan desa

yang berbasis kepada lingkungan pada hakekatnya merupakan cerminan dari adanya usaha untuk menjadikan lingkungan perdesaan sebagai bagian dari desa yang harus senantiasa diakomodasi dalam setiap pengambilan kebijakan tentang desa.

Keluaran dari pengembangan desa berbasis lingkungan perdesaan, yaitu lahirnya pengembangan desa yang berkarakter, di mana satu desa akan memiliki perbedaan karakter dibanding dengan desa lainnya. Keadaan ini menjadi penting selain menjaga konsistensi keberlangsungan nilai adat, budaya, sosial dan lingkungan alam yang ada juga akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan sebagai *social capital* yang mampu mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan. Pemahaman tersebut di atas mendorong adanya upaya untuk tetap menjaga keterjalinan yang baik antara pemerintah dengan lingkungan perdesaan. Adanya pemanfaatan teknologi informasi harus dijadikan salah satu cara untuk mempererat hubungan tersebut, sehingga selain akan menciptakan kelestarian lingkungan berbasis pemanfaatan teknologi informasi, juga akan menciptakan kondisi lingkungan yang mendorong penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif guna mewujudkan pembangunan desa.

### ***Smart Relationship antara Smart Community dan Smart Environment***

Hubungan antara masyarakat dengan lingkungan perdesaan dalam konteks *smart village* didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, lingkungan perdesaan merupakan bagian integral dari masyarakat desa, adanya nilai adat dan budaya merupakan cerminan dan perwujudan dari suatu masyarakat. Kedua, struktur sosial masyarakat yang ada dibentuk atas dasar nilai adat dan budaya yang menjadi pedoman kehidupan bersama. Ketiga, konteks pemanfaatan sumber daya alam yang lestari, merupakan pelaksanaan nilai adat dan budaya serta bentuk dari perwujudan komitmen masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial dan lingkungan alam. Praktik kehidupan masyarakat adalah satu kesatuan antara masyarakat, adat,

budaya serta lingkungan alam yang terkonstruksikan menjadi sebuah identitas dari suatu desa tertentu. Lebih jauh lagi, keterjalinan tersebut akan turut pula menentukan arah kebijakan pembangunan desa.

Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dan lingkungan perdesaan mempengaruhi arah kebijakan dan pola pembangunan desa di desa-desa yang ada di daerah suku Baduy. Suku Baduy secara konsisten menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Tidak hanya dipraktikkan dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan sehari-hari secara arif dan bijak, tetapi juga turut menentukan pola arah pembangunan. Pembangunan ditunjukkan tidak hanya untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi juga ditujukan untuk keberlanjutan dan kesejahteraan generasi yang akan datang (Suparmini, Setyawati, & Sumunar, 2013; Zid et al., 2017). Dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi di tengah masyarakat perdesaan, maka menjadi penting untuk tetap mengedepankan nilai-nilai lingkungan perdesaan. Hal ini sebagai komitmen bahwa teknologi informasi bisa sejalan dengan pelestarian nilai adat, budaya, sosial dan lingkungan alam yang ada di perdesaan, sehingga akan menciptakan keseimbangan di antara keduanya, pemahaman tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 3.



Gambar 3. Hubungan Antara Masyarakat dengan Lingkungan



### Perdesaan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi

Konteks pemanfaatan teknologi informasi dikaitkan dengan nilai adat dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat perdesaan ditujukan kepada penguatan dan pelestarian nilai adat dan budaya agar tetap lestari dan dimungkinkan untuk dikembangkan agar sesuai dengan konteks kekinian. Dengan begitu perkembangan teknologi informasi sejalan dengan pengembangan nilai adat dan budaya serta memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dalam konteks lingkungan alam, teknologi informasi mendukung masyarakat memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber mata pencaharian dan sarana aktivitas lain yang diorientasikan untuk menciptakan suatu pengelolaan yang menjunjung tinggi nilai kelestarian dan keseimbangan. Hal ini ditujukan agar potensi alam yang ada di desa digali secara wajar.

Teknologi informasi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan alam agar tetap lestari. Dengan begitu, lingkungan alam akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Atas dasar pemahaman tersebut, maka konsep *smart village* harus selalu mengutamakan keterjalinan antara masyarakat dengan lingkungan perdesaan secara harmonis. *Smart village* dalam konteks relasi di antara kedua elemen ini ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan perdesaan, serta pemanfaatan teknologi yang ditujukan untuk mendorong pengembangan kelestarian lingkungan perdesaan. Adapun *output* yang dihasilkan dari sinergi antara masyarakat dan lingkungan dalam konteks pengembangan *smart village*, yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk mendorong pelestarian dan pengembangan lingkungan perdesaan yang berkeselimbangan, berkesinambungan dan berkelanjutan.

### **C. Sifat Kegiatan Mahasiswa dalam Program KKN UNISDA**

#### **1. Kolaboratif**

Kolaboratif adalah bekerja sama dengan satu atau lebih unsur lain untuk menyelesaikan proyek atau tugas atau mengembangkan ide atau proses tertentu. Dalam hal ini, kegiatan KKN yang dianjurkan tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi melibatkan peran aktif dari *stake holder* lainnya seperti pemerintah desa, warga masyarakat, sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lain.

#### **2. Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan sifat pemberdayaan ini, diharapkan program KKN yang dilakukan nantinya akan tetap dilanjutkan oleh masyarakat secara mandiri, meskipun program KKN telah selesai.

#### **3. Monodisipliner**

Program kegiatan KKN yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kompetensi bidang ilmunya masing-masing. Program monodisipliner adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN Unisda sesuai dengan kompetensi bidang ilmu masing-masing dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas program tersebut baik secara ilmiah maupun operasional.

#### **4. Multidisipliner**

Program kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dapat berasal dari berbagai bidang keilmuan.

### **D. Jenis Kegiatan dan Alokasi Waktu dalam Program KKN**

#### **1. Jenis Kegiatan KKN**

Kegiatan individual mahasiswa KKN dikelompokkan menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu:

i. Kegiatan Pokok

Kegiatan Pokok dapat dikategorikan menjadi dua yakni kegiatan pokok tema dan kegiatan pokok nontema. Kegiatan pokok tema adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN sesuai dengan tema yang dilaksanakan. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut baik secara ilmiah maupun operasional. Kegiatan pokok nontema adalah kegiatan pokok di luar tema yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Jumlah kegiatan pokok tema dan nontema, minimal 5, dan salah satu di antara yang harus bersifat interdisipliner sesuai dengan tema.

ii. Kegiatan Bantu

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan membantu pelaksanaan kegiatan pokok mahasiswa peserta KKN yang lain dalam 1 unit atau subunit secara operasional, tetapi secara ilmiah tidak terkait dalam pola kerja interdisipliner. Kegiatan bantu pokok tema berlaku untuk 1 unit, sedangkan kegiatan bantu pokok non tema berlaku untuk 1 subunit.

2. Alokasi Waktu (Jam Kerja Efektif Mahasiswa)

Alokasi waktu mahasiswa dalam mata kuliah KKN dengan bobot 4 SKS adalah 480 jam efektif, terdiri atas 96 jam untuk kegiatan pra-pelaksanaan yang diselenggarakan di kampus dan 384 jam untuk pelaksanaan kegiatan KKN selama tinggal di lokasi KKN (1 bulan). Kegiatan pra-pelaksanaan terdiri dari diklat materi umum, diklat dari dosen dan mitra tentang tema, konsolidasi unit, bakti kampus, dan kegiatan lainnya sebelum penerjunan. Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan KKN terdiri dari minimal 200 jam untuk kegiatan pokok dan minimal 88 jam untuk kegiatan bantu (kegiatan membantu pelaksanaan program pokok

peserta KKN dalam satu unit). Waktu pelaksanaan kegiatan pokok digunakan minimal 140 jam untuk pelaksanaan kegiatan pokok tema dan maksimum 160 jam untuk kegiatan pokok nontema sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing. Dalam keadaan tertentu seorang peserta KKN dimungkinkan untuk membantu pelaksanaan program pokok di luar unit dengan persetujuan kedua DPL bersangkutan.

## **E. Pendanaan**

Keberhasilan suatu kegiatan bergantung pada beberapa faktor, di antaranya adalah dana. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KKN bersumber dari mahasiswa peserta KKN, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan dari sumber lain yang sah. Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN.

## **F. Sosialisasi**

### **1. Internal**

Sosialisasi internal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang lingkup tema KKN akan dilaksanakan kepada semua pihak di lingkungan Unisda. Sehubungan dengan hal itu, semua wakil dekan dan semua ketua program studi di lingkungan Unisda menjadi penghubung antara Pusat Layanan KKN dengan mahasiswa.

### **2. Eksternal**

Sosialisasi eksternal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan KKN kepada Pemda dan instansi lain maupun stakeholders lainnya yang akan menjadi mitra kegiatan KKN agar dapat mempersiapkan pelaksanaan KKN di wilayahnya. Kerja sama ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

## **G. Kerjasama**

KKN hanya akan berhasil apabila ada kerja sama yang baik antarmitra Unisda maupun antara Unisda dengan pihak Pemda

maupun instansi mitra lainnya. Kerja sama yang harmonis akan membantu menciptakan kelancaran komunikasi dan penyelesaian permasalahan yang menjadi bidang kegiatan KKN.

Kerja sama ini juga membuka jalan rintisan menuju tercapainya tujuan dan sasaran KKN sebaik-baiknya. Kerja sama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MoU antara Unisda (LPPM) dengan mitra kerja. Di antara MoU yang telah ditandatangani antara Unisda dengan mitra adalah Pemda Lamongan.

## **H. Tata Tertib Peserta KKN**

Tata tertib peserta KKN disusun sebagai pedoman mahasiswa KKN untuk dapat berbuat, bertindak, dan berperilaku demi kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan tugas di lapangan. Tata tertib ini mengatur kegiatan mahasiswa saat prapelaksanaan dan selama pelaksanaan KKN.

### **1. Selama Pelaksanaan KKN**

Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa wajib

- a. menjaga nama baik almamater;
- b. mengikuti seluruh prosesi penerjunan dan penarikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. menetap di lokasi kerja KKN. Mahasiswa peserta KKN berhak meninggalkan lokasi kerja KKN, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) harus menggunakan surat izin meninggalkan lokasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - 2) setiap surat izin meninggalkan lokasi berlaku maksimal 2 X 24 jam secara berurutan dengan total waktu izin selama waktu pelaksanaan tugas KKN maksimal 5 X 24 jam;
  - 3) dalam hal khusus, izin meninggalkan lokasi kerja KKN hanya diberikan oleh Panitia KKN.
- d. melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi;

- e. menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di dusun (desa) lokasi KKN;
- f. membina kerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait;
- g. menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut mahasiswa KKN (topi, jaket, surat izin meninggalkan lokasi). Atribut tersebut tidak boleh hilang atau diberikan/dipindahtangankan kepada orang lain. Kehilangan salah satu atribut harus segera dilaporkan kepada Panitia KKN;
- h. menjaga seluruh barang/harta pribadi yang dibawa ke lokasi KKN. Segala kerusakan dan kehilangan barang/harta pribadi di lokasi menjadi tanggung jawab tiap-tiap mahasiswa.

Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa dilarang

- a. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater;
- b. melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan/atau Pilkades, serta melakukan tindakan asusila;
- c. melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung;
- d. menggunakan kendaraan roda empat (mobil) atau barang mewah lainnya untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pelaksanaan KKN;
- e. membawa keluarga atau teman ikut menginap di pondokan tanpa izin dari Panitia KKN dan Kepala Desa;
- f. menggunakan wewenang/pangkat/jabatan di luar status peserta KKN;
- g. membuat atau menggunakan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Panitia KKN maupun institusi Unisda;
- h. mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan Panitia

KKN dan Kepala Desa.

## **2. Sanksi Akibat Pelanggaran Tata Tertib**

Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam bentuk-bentuk berikut:

- iii. Peringatan,  
Sanksi berupa peringatan diberikan kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran berikut:
  - 1) Tidak mengikuti kegiatan suvei ke kolasi KKN secara penuh dan sungguh-sungguh;
  - 2) Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan atau mengisi presensi harian melebihi hari yang sedang berjalan.
  - 3) Meninggalkan lokasi tanpa izin selama kurang dari 24 jam;
  - 4) Surat izin meninggalkan lokasi tidak diisi lengkap (belum ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Kepala Desa/Dusun);
  - 5) Tidak mengikuti upacara pelepasan di kampus, penerimaan, atau penutupan tanpa izin.
- iv. Pengurangan nilai, dan  
Sanksi berupa pengurangan nilai diberikan kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran berikut:
  - 1) Telah diberi peringatan, tetapi masih melakukan pelanggaran;
  - 2) Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kkn setelah tinggal selama 7 hari;
  - 3) Membawa kendaraan roda empat dan/atau benda mewah lainnya untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kkn;
  - 4) Meninggalkan lokasi kerja tanpa izin selama lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam;
  - 5) Membawa keluarga atau teman ikut menginap di lokasi kkn tanpa izin dari kepala desa, dosen pembimbing, atau panitia kkn;

- 6) Tidak bisa bekerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kkn.
- v. Pengguguran sebagai Peserta KKN (Tidak Lulus KKN)
- Sanksi berupa pengguguran sebagai peserta KKN diberikan kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran berikut:
- 1) telah diberi peringatan dan pengurangan nilai, tetapi masih melakukan pelanggaran;
  - 2) melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater;
  - 3) meninggalkan lokasi KKN lebih dari 5 X 24 jam selama waktu pelaksanaan KKN;
  - 4) meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 X 24 jam secara berurutan tanpa surat izin meninggalkan lokasi;
  - 5) mencari sponsor/bantuan tanpa prosedur yang diizinkan oleh Panitia KKN;
  - 6) melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur dalam Pilkada dan atau Pilkades dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi KKN maupun di luar lokasi kerja KKN.
  - 7) melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/ penipuan administratif yang berupa hal-hal berikut:
    - a) pemalsuan tanda tangan pada surat izin meninggalkan lokasi;
    - b) pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya;
    - c) pemalsuan dan/atau penipuan identitas;
    - d) pembuatan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Panitia KKN Unisda atau instansi Unisda dalam menjalin kerja sama



dengan pihak luar.

### **I. Tahapan Kegiatan KKN**

Kegiatan KKN Unisda Lamongan dibagi atas beberapa tahap berikut: (1) tahap persiapan, (2) tahap pendidikan dan pelatihan, (3) tahap pelaksanaan, dan (4) tahap pelaporan dan penilaian.

## **BAB IV**

### **PERSIAPAN KKN**

#### **A. Pembentukan Panitia KKN**

Agar KKN Unisda Lamongan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk panitia KKN. Panitia KKN Unisda ditetapkan oleh Rektor Unisda Lamongan atas usulan LPPM Unisda Lamongan. Panitia KKN 2022 Unisda Lamongan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unisda Lamongan Nomor: 032/U/A.5/VI/2022/SK tanggal 18 Juni 2022.

#### **B. Survei Lokasi KKN**

Sebelum ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan KKN, panitia KKN perlu melakukan survei lokasi. Hal-hal yang perlu diobservasi panitia KKN untuk menentukan calon tempat lokasi KKN adalah

1. Kondisi umum masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan;
2. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN;
3. Hasil koordinasi dengan penduduk setempat;
4. Kesesuaian tema kkn dengan kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil survei lokasi yang dilakukan panitia, Lokasi KKN 2022 ditetapkan di Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Widang dan Kecamatan Plumpang.

#### **C. Sosialisasi Internal**

Setelah menentukan lokasi KKN, panitia KKN melakukan sosialisasi kepada dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa. Sosialisasi ini dapat dilakukan pada saat kegiatan diklat (pendidikan dan pelatihan).

#### **D. Perizinan**

1. Panitia KKN mengajukan permohonan izin secara tertulis

(proposal) kepada Pemda Kabupaten sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.

2. Panitia KKN membuat dan menyampaikan surat rencana kegiatan dan pemberangkatan mahasiswa KKN ke Bupati dengan tembusan ditujukan kepada Bappeda, Kesbanglinmas, Camat, Kades, dan instansi pemda lain yang terkait. Penyampaian surat tersebut di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab Panitia KKN, sedangkan di tingkat desa/dusun menjadi tanggung jawab DPL.

#### **E. Pendaftaran Peserta KKN**

Peserta KKN terbuka bagi semua mahasiswa Unisda Lamongan yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKN. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KKN dengan memenuhi prosedur persyaratan tertentu. Persyaratan mahasiswa peserta KKN Unisda Lamongan sebagai berikut:

1. Memprogram KKN pada semester VI atau VIII pada KRS;
2. Diizinkan dan dikirim oleh fakultas;
3. Membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKN;
4. Mengisi biodata disertai pas foto 3x4 cm sebanyak 2 lembar untuk kepentingan administrasi (di belakang foto ditulis NAMA, NIM, dan Prodi);
5. Membayar biaya KKN.

Adapun prosedur pendaftarannya diatur sebagai berikut.

1. Mahasiswa calon peserta KKN yang telah memenuhi persyaratan beban SKS mendaftarkan diri di BAUK Unisda, mengikuti seluruh rangkaian diklat.
2. Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan dan terdaftar sebagai peserta Program KKN akan diumumkan dan berhak mengikuti program KKN. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tidak berhak mengikuti program KKN dan berkas administrasinya dikembalikan ke fakultas/prodi

masing-masing. Calon peserta KKN 2022 Unisda Lamongan berjumlah 420 mahasiswa yang berasal dari 8 Fakultas.

#### **F. Jadwal Kegiatan**

Acara Acara kegiatan KKN 2022 Unisda Lamongan dijadwalkan sebagai berikut:

1. Pendaftaran KKN  
Tanggal: 20 Juni – 08 Juli 2022
2. Pemetaan Desa dan Perizinan (Panitia)  
Tanggal: 21 Juni – 08 Juli 2022
3. Pembagian Kelompok dan DPL  
Tanggal: 12 Juli 2022
4. Pelaksanaan Rapat Panitia dan Diklat DPL  
Tanggal: 14 - 15 Juli 2022
5. Pelaksanaan Diklat Mahasiswa  
Tanggal: 19 - 20 Juli 2022
6. Survey Lokasi KKN  
Tanggal: 21 - 26 Juli 2022
7. Pembuatan dan Upload Program Kegiatan  
Tanggal: 27 - 28 Juli 2022
8. Verifikasi Program Kegiatan KKN (DPL)  
Tanggal: 29 Juli 2022
9. Pengambilan Atribut  
Tanggal: 01 Agustus 2022
10. Kegiatan Peserta di Lokasi  
Tanggal: 02 - 30 Agustus 2022
11. Penyusunan dan Upload Laporan  
Tanggal: 29 - 31 Agustus 2022
12. Review dan Evaluasi Laporan  
Tanggal: 01 -02 September 2022
13. Pengumuman Nilai  
Tanggal: 05 September 2022
14. Laporan panitia ke Rektorat  
Tanggal: 15 September 2022

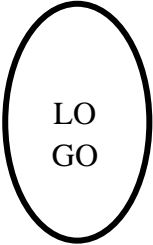
## G. Penempatan Peserta dan DPL KKN

1. Prosedur Penempatan Peserta KKN
  - a. Pembagian mahasiswa diusahakan merata pada tiap lokasi dari sisi jumlah dan jenis kelamin, sedangkan dari aspek keahlian (prodi) disesuaikan dengan kebutuhan fokus branding desa.
  - b. Memperhatikan kondisi mahasiswa KKN (tempat tinggal, kesehatan).
2. Prosedur Penetapan DPL
  - a. Panitia KKN mengusulkan calon DPL kepada Rektor.
  - b. Rektor menetapkan DPL.

## H. Kelengkapan Administrasi

Sebelum berangkat ke lokasi KKN, mahasiswa perlu mempersiapkan beberapa kelengkapan administrasi berikut:

1. Papan posko berukuran 1 x 2 meter yang bertuliskan

	<p>POSKO KKN 2022 UNISDA LAMONGAN DUSUN ..... DESA ..... KECAMATAN .....</p>
--	--

2. Buku Tamu (lampiran 4)
3. Daftar hadir peserta KKN (lampiran 5)
4. Papan informasi untuk daftar piket, matrik program kegiatan, laporan kegiatan mingguan, dsb.
5. Petunjuk arah ke posko KKN.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN/PELATIHAN, SURVEI, DAN PROGRAM KERJA**

Keberhasilan pelaksanaan KKN di lapangan sangat ditentukan oleh kecermatan persiapan sebelum mahasiswa ditempatkan di desa. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu kegiatan dalam mempersiapkan mahasiswa sebelum terjun ke desa. Setiap mahasiswa yang hendak melaksanakan KKN terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan keadaan pembangunan desa yang akan ditempati mahasiswa. Hal ini dilakukan melalui sesuatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh panitia diklat KKN yang dibantu oleh pengajar/pelatih baik dari lingkungan Unisda Lamongan maupun dari luar yang meliputi pengetahuan teori dan ketrampilan praktis. Dengan demikian sebelum mahasiswa bertugas di Desa mereka telah dibekali dengan hal-hal yang berhubungan erat dengan pembangunan dan situasi desa yang sebenarnya.

Dengan penerapan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dan latihan serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sebelumnya, diharapkan para mahasiswa akan dapat melaksanakan dengan baik seluruh program kegiatan lapangan yang akan dihadapi nanti di desa. Di samping keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tersebut, para mahasiswa juga diharapkan telah mempersiapkan dan melengkapi dirinya sendiri melalui keterlibatannya dalam wadah kegiatan kampus (UKM, BEM Fakultas maupun Universitas, dan HMJ) maupun di luar kampus (Karang Taruna, Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus dan lain sebagainya).

## **A. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa diselenggarakan sebagai persiapan untuk melaksanakan KKN bertujuan agar peserta KKN

1. Memahami maksud dan tujuan program KKN;
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KKN;
3. Memiliki pengetahuan untuk mempertajam penginderaan terhadap permasalahan maupun pemecahannya;
4. Memperoleh informasi tentang potensi dan permasalahan desa yang akan menjadi lokasi kerjanya;
5. Melatih diri bekerja berkelompok secara interdisipliner dan antarbidang;

## **B. Materi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan**

1. Sosialisasi buku panduan dan pemberdayaan masyarakat
2. Analisis Sosial dan SWOT
3. ABCD (Assets Based Community Development) dan Penyusunan program kerja
4. Penyusunan Laporan Akhir

Dalam menyampaikan materi pelatihan digunakan metode (1) ceramah, (2) diskusi, (3) demonstrasi, (4) simulasi, dan (5) tanya jawab.

## **C. Ketentuan dalam Pendidikan dan Pelatihan**

1. Mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti semua kegiatan diklat yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal dan atau perubahan atau tambahannya.
2. Mahasiswa peserta KKN wajib mengisi daftar hadir (tidak boleh diwakilkan) pada setiap sesi kegiatan diklat. Presensi diklat menjadi salah satu komponen penilaian diklat.
3. Mahasiswa calon peserta KKN bertanggung jawab atas diri pribadi masing-masing. Apabila ada tanda tangan yang

dipalsukan atau terjadi kelebihan tanda tangan, presensi kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku.

4. Peserta yang tidak dapat mengikuti diklat karena berhalangan sakit/melahirkan maka diwajibkan untuk menyampaikan izin tertulis dengan dilampiri surat izin dari instansi terkait (dokter rumah sakit).
5. Mahasiswa wajib mengikuti ujian diklat KKN, nilai hasil diklat KKN merupakan salah satu komponen penilaian.
6. Selama mengikuti diklat, mahasiswa calon peserta KKN wajib menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, tidak merokok di dalam kelas, bersepatu, dan bersikap tenang.
7. Petugas diklat (narasumber maupun panitia) berhak menegur, mencatat, atau mengeluarkan mahasiswa peserta KKN yang mengganggu kelancaran kegiatan diklat dan menghapus namanya dalam presensi diklat sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus diklat dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan KKN di lokasi.
8. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas dianggap gugur/tidak lulus diklat.

#### **D. Survei Lokasi Peserta KKN**

Sebagai bahan untuk menyusun program kerja KKN di desa/dusun dengan baik dan tepat sasaran, sekelompok mahasiswa KKN perlu melakukan survei lokasi KKN yang akan ditempati KKN. Dalam melakukan survei lokasi, mahasiswa didampingi oleh DPL yang telah ditunjuk.

Adapun hal-hal perlu dilakukan mahasiswa dalam melakukan survei adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing;
2. Menyusun kisi-kisi survei untuk memudahkan pelaksanaan survei lapangan;
3. Sebelum melakukan survei, lebih dulu menyampaikan surat terkait pelaksanaan KKN dari panitia KKN kepada kepala desa serta berkonsultasi untuk melakukan survei lokasi;



4. Menentukan sasaran yang akan disurvei dan dikomunikasikan dengan perangkat desa;
5. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh perangkat desa atau masyarakat setempat;
6. Memetakan potensi-potensi desa yang sudah dikembangkan dengan baik dan potensi yang belum dikembangkan;
7. SEMUA mahasiswa KKN bisa mengikuti survei lokasi atau diwakili oleh kordes, sekretaris, dan bendahara dan didampingi oleh DPL;
8. Hasil survei dijadikan bahan penyusunan program kegiatan KKN.

#### **E. Penyusunan Program Kerja**

Setelah melakukan survei lapangan, kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN adalah melakukan analisis hasil survei lapangan, yaitu memetakan keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari masing-masing bidang yang telah disurvei. Berdasarkan analisis hasil survei ini, mahasiswa menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di desa dengan bimbingan DPL.

Dalam menyusun program kerja, mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tujuan dan manfaat dari kegiatan yang diprogramkan;
2. Pemetaan jenis program (Ekonomi, Sosial Hukum dan Pendidikan), baik berupa kerja sama dengan pemerintah maupun usaha program tawaran mahasiswa sendiri.
3. Sebelum menyusun program, sedapat mungkin dikenali semua permasalahan yang mungkin timbul dalam usaha untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan dengan berpedoman pada permasalahan yang ada disusun suatu rencana kerja dengan skala prioritas;
4. Dijelaskan tujuan program serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;

5. Hasil pemetaan digunakan untuk menentukan sasaran yang akan dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memahami persoalan tersebut. Sasaran pemetaan dibuat perbidang secara spesifik dengan membuat pohon masalah dan waktu penerapan program ini dimulai pada pelaksanaan KKN;

Dalam pemetaan program kerja hingga pelaksanaan hendaknya dipilih yang sederhana dan dapat dijangkau dengan menggunakan potensi yang ada di desa tersebut. Penyusunan program dilakukan secara bersama dan rencana yang telah disusun tersebut dikonsultasikan kepada DPL. Dalam hal ini DPL hanya memberi arah dan tidak secara aktif melibatkan diri dalam penyusunan program kerja. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan melatih diri kepada mahasiswa dalam memetakan masalah di lapangan dengan memulai dari perencanaan program kerja serta bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari beberapa bidang.

Program kerja disusun berdasarkan bidang kegiatan yang dilaksanakan setiap desa terlebih dahulu. Kegiatan yang dimasukkan dalam matriks ini merupakan musyawarah hasil kegiatan kelompok yang disusun oleh mahasiswa bersama dengan kepala desa.

## **F. Lokakarya Program Kerja**

Setelah mahasiswa secara kelompok menyusun program kerja KKN yang akan dilaksanakan di lokasi KKN, perlu dilakukan lokakarya program kerja yang diikuti oleh semua mahasiswa peserta KKN dengan bimbingan DPL. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan rencana program kerja (baik individu maupun kelompok) yang telah disusun. Mahasiswa dan DPL diharapkan dapat menyumbangkan gagasannya untuk memperbaiki program kerja yang telah disusun, sehingga kegiatan yang akan dilakukan di lokasi nantinya benar-benar dapat bermanfaat dan terlaksana dengan baik.

Dalam lokakarya program kerja ini, setiap mahasiswa menyampaikan program individu yang didukung oleh analisis hasil survei lapangan, yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Mahasiswa yang lain dan DPL memberikan masukan-masukan sehingga program kerja benar-benar sudah matang dan siap dijalankan.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN KKN**

#### **A. Pemberangkatan Mahasiswa KKN**

Pemberangkatan mahasiswa KKN ke lokasi diatur menurut jadwal yang sudah disusun berdasarkan jumlah mahasiswa yang diterjunkan dan lokasi KKN yang dipergunakan. Pemberangkatan mahasiswa ke lokasi KKN dikoordinasi oleh korcam DPL, DPL, korcam mahasiswa, dan kodes/kordus.

Kelompok mahasiswa didampingi oleh DPL masing-masing mempersiapkan berkas kegiatan, bahan perbekalan, dan sarana transportasi menuju lokasi tiap-tiap kelompok.

Ketua KKN menyelenggarakan upacara pemberangkatan mahasiswa KKN dengan acara sebagai berikut:

1. Upacara pemberangkatan dihadiri oleh Rektor, Dekan, Ketua LPPM, DPL, dan mahasiswa KKN;
2. Laporan Ketua KKN tentang rencana pelaksanaan Program KKN yang akan dijalankan;
3. Amanat dan arahan oleh Rektor atau yang mewakili;
4. Pelepasan oleh Rektor atau yang mewakili.

Setelah upacara pelepasan, mahasiswa KKN didampingi DPL menuju kecamatan untuk melakukan upacara penerimaan di kecamatan lokasi KKN.

#### **B. Penerimaan Mahasiswa KKN**

Sebelum memulai kegiatan KKN di lokasi, pada hari pertama mahasiswa berada di lokasi KKN diawali dengan kegiatan penerimaan mahasiswa KKN oleh pemerintah kecamatan. Upacara penerimaan mahasiswa KKN oleh Camat atau yang mewakili di balai kecamatan diselenggarakan dalam acara penerimaan mahasiswa KKN.

Inti acara ini adalah penyerahan mahasiswa KKN oleh pihak Unisda kepada pihak kecamatan sekaligus

memperkenalkan DPL yang mendampingi mahasiswa KKN selama berada di lokasi KKN. Acara penyerahan ini dilanjutkan dengan acara penerimaan mahasiswa KKN oleh Camat atau yang mewakili sekaligus memperkenalkan para kepala desa yang ditempati mahasiswa KKN selama di lokasi. Dengan demikian, penerimaan ini selain dilakukan oleh camat sekaligus oleh kepala desa tempat KKN.

### **C. Sosialisasi Program Kerja KKN**

Program kerja yang telah disusun oleh mahasiswa KKN (berdasarkan hasil survei) dengan bimbingan DPL perlu disosialisasikan kepada masyarakat, yaitu perangkat dan lembaga desa, organisasi kemasyarakatan/pemuda (ta'mir masjid, karang taruna, remaja masjid, PKK, dsb.), dan warga masyarakat sasaran (industri rumah tangga). Program kerja ini perlu disosialisasikan secepatnya (maksimal 3 hari setelah mahasiswa berada di lokasi) untuk mendapatkan masukan perbaikan jika dimungkinkan.

### **D. Pelaksanaan Program Kerja**

Program kerja yang telah disusun dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Di dalam melaksanakan program kerja harus tetap menjaga kekompakan dan kerja sama antarmahasiswa, antara mahasiswa dengan masyarakat dan pimpinan masyarakat sehingga program kerja dapat terlaksana secara efektif.

Banyaknya kegiatan di desa tidak dimaksudkan agar semua dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa diperlukan sebagai pendorong, penggerak, pemrakarsa dalam melihat setiap permasalahan di desa/dusun. Ruang lingkup kegiatan sedapat mungkin harus sesuai dengan keadaan desa/dusun berdasarkan 6 bidang kegiatan dan dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata yang sesuai.

Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai penunjang kegiatan KKN antara lain sebagai berikut;

1. Pemuda desa memiliki peranan penting dalam kesuksesan program kegiatan KKN. Karena itu, mahasiswa KKN harus dapat menggandeng dan memdayagunakan mereka sebagai kader pembangunan.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN selalu menimbulkan efek sosial. Mahasiswa KKN harus mampu mengatasi dan menghilangkan efek sosial yang negatif dengan cara melakukan perencanaan seteliti dan sedini mungkin.
3. Mahasiswa KKN harus berusaha menggali potensi desa yang selama ini belum dikembangkan atau masih terpendam.
4. Dalam melaksanakan segala kegiatan, mahasiswa KKN tidak memberikan kesan menggurui, menonjolkan diri dan memerintah, tetapi bertindak dengan arif dan bijak serta menghargai tokoh maupun masyarakat biasa yang ada sehingga setiap kegiatan mendapat tanggapan yang baik dan kegiatan itu dirasakan berasal dari masyarakat.
5. Mahasiswa KKN harus menyesuaikan sikap dan cara kehidupan mereka (berpakaian, kebiasaan, tindak tanduk) dengan cara kehidupan masyarakat setempat.

Agar kegiatan mahasiswa KKN dapat terarah dan berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana, perlu adanya bimbingan DPL secara intensif. Bimbingan hendaknya dilakukan secara berkala tergantung kepada permasalahan yang ada dengan memperhatikan waktu dan tempat bimbingan diperlukan.

#### **E. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN**

Setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, mahasiswa ditarik dari lokasi KKN dan kembali ke kampus. Penarikan mahasiswa KKN ditandai dengan acara penutupan KKN di kantor kecamatan yang wajib diikuti semua mahasiswa KKN dan DPL.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN DAN PENILAIAN**

#### **A. Pelaporan**

Dalam upaya pencapaian target KKN Unisda 2022 dengan tema Unisda Berkontribusi, Desa Bergerak Mandiri, maka peserta KKN Unisda 2022 diwajibkan untuk memenuhi laporan KKN berupa: 1. Laporan Akhir Kelompok 2. Proposal Program Kerja Unggulan 3. Video Program Kerja Unggulan 4. Artikel Pengabdian kepada Masyarakat. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing.

##### **1. Laporan Akhir Kelompok**

Laporan akhir kelompok ini bertujuan untuk melaporkan kinerja peserta KKN Unisda 2022 selama kegiatan berlangsung dari awal pembukaan hingga penutupan. Laporan tersebut berisi deskripsi program-program kegiatan dengan disertai bukti pendukung berupa foto-foto kegiatan yang terdokumentasi dengan baik berdasarkan waktu dan tempat di real kejadian. Kegiatan-kegiatan tersebut harus mengacu kepada tiga bidang utama yaitu Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial-Hukum. Berikut adalah poin-poin penting yang harus dilaporkan di laporan akhir kelompok:

- a. Judul dan Identitas Kelompok
- b. Halaman Pengesahan
- c. Profil Desa yang sekaligus menjelaskan tentang Potensi Desa dan Branding Desa yang dikonsepsikan
- d. Program Kerja
- e. Pelaksanaan Program Kerja sekaligus menjelaskan tentang Peluang dan Hambatan yang dilalui
- f. Penutup
- g. Referensi
- h. Lampiran: *Presensi Kehadiran Peserta Kelompok dan DPL, Buku Tamu, dan Dokumentasi kegiatan.*

Penyusunan Laporan Akhir Kelompok ini harus mengikuti sistematika penulisan Laporan Kelompok KKN 2022 yang dapat dilihat di lampiran. Berikut adalah ketentuan untuk pengumpulan Laporan Akhir kelompok KKN 2022:

- a. Pengumpulan berupa file dengan ekstensi (pdf.)
- b. File diupload di link Google Drive berikut:  
[https://drive.google.com/drive/folders/11gezvQgUSrtCpeUf\\_simskSV7Xj1PW-Th?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/11gezvQgUSrtCpeUf_simskSV7Xj1PW-Th?usp=sharing)
- c. Deadline upload hari *Rabu, 31 Agustus 2022*.

## 2. Proposal Program Kerja Unggulan

Proposal program kerja unggulan bertujuan untuk menstimulasi mahasiswa agar lebih memahami program kerja yang telah dikonsepsikan dari kelompok untuk branding Desa di Desa yang ditempati. Proposal ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang proses masyarakat mitra, menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi masyarakat mitra, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menyelesaikan masalah tersebut. Proposal Program ini selanjutnya akan dikompertisikan di internal UNISDA untuk diberikan apresiasi dengan total hibah pendanaan senilai Rp. 25.000.000,00. Dari 22 (Dua puluh dua) kelompok KKN Unisda 2022 akan dipilih 5 proposal terbaik untuk didanai.

Format proposal program kerja unggulan dapat dilihat di lampiran. Berikut adalah ketentuan pengumpulan Proposal Program Kerja Unggulan:

- a. Pengumpulan berupa file dengan ekstensi (.doc) atau (.doc)
- b. File diupload di link Google Drive berikut:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1Xr-HGxgCMiWtaPSrzem7xPR6IKMwRXk?usp=sharing>
- c. Deadline upload hari *Minggu, 14 Agustus 2022*.



### 3. Video Program Kerja Unggulan

Video Program Kerja Unggulan bertujuan untuk mendokumentasikan program kerja unggulan kelompok KKN 2022 secara digital agar dapat dengan mudah dikonsumsi secara umum baik UNISDA, Mahasiswa, Desa KKN, maupun masyarakat luas. Deadline penguploadan kedua video tersebut (*Short dan Long Video*) adalah hari *Rabu, 31 Agustus 2022*. Video Program Kerja Unggulan ini terdiri dari dua jenis video, yaitu:

- a. *Short Video*, dengan durasi  $\leq 1$  Menit. Short Video ini wajib diposting di IG dengan Hashtag (**#kknunisda2022**) berisi tentang cuplikan-cuplikan kegiatan dalam pelaksanaan program kerja unggulan masing-masing kelompok peserta KKN 2022.
- b. *Long Video*, ketentuan pembuatan long video ini adalah sebagai berikut:
  - Setiap kelompok mengirimkan satu video yang selanjutnya diupload melalui link Google Drive berikut: [https://drive.google.com/drive/folders/1xKfqxJadbuu\\_4\\_KCoxVGOYK\\_LxAcwkAR?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1xKfqxJadbuu_4_KCoxVGOYK_LxAcwkAR?usp=sharing)
  - Konten video berisi tentang:
    1. Judul dan Tema KKN 2022
    2. Identitas (nama dan logo kampus, kelompok mahasiswa, DPL)
    3. Profil Desa
    4. Potensi Desa
  - 5. Pelaksanaan program kerja unggulan, boleh ditambah dengan program kerja lain yang juga diunggulkan.
  - 6. Kesan dan Pesan dari Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain
  - 7. Kesan dan Pesan dari DPL
  - 8. Credits
  - 9. Dedikasi
  - 10. Durasi Video  $\leq 15$  menit

11. Penambahan *subtitle* dalam bahasa Inggris akan menambah perolehan nilai
12. Direkomendasikan untuk menggunakan video ratio 16:9 untuk hasil terbaik
13. Video diupload dalam bentuk MP4 Format (H264) dengan minimal resolusi 720p (tidak lebih dari 1080p)
14. File Video diberi nama: KKN\_NAMADESA\_UNISDA2022
15. 3 Video terpilih akan diupload di Youtube Unisda\_ Official

#### **4. Artikel Pengabdian kepada Masyarakat**

Artikel Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan publikasi mahasiswa dan DPL dalam pengabdian kepada masyarakat. Artikel yang dihasilkan tersebut adalah merupakan hasil dari pelaksanaan program kerja kelompok KKN yang telah berhasil dilaksanakan selama kegiatan KKN UNISDA 2022. Template artikel pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat di lampiran. Berikut adalah ketentuan-ketentuan dalam pengumpulan Artikel Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Satu artikel Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari maksimal 5 *authors* (penulis) termasuk DPL dan 1 orang Panitia sesuai dengan ketentuan.
- b. DPL wajib menyubmit salah satu artikel terbaik dari kelompok bimbingannya ke salah satu Jurnal Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Terakreditasi Sinta.
- c. DPL wajib melaporkan bukti submit artikel di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ke Tim Evaluasi.
- d. DPL wajib mengupload seluruh artikel yang dihasilkan oleh kelompok KKN bimbingannya dalam bentuk (.doc) atau (.docx) ke link Google Drive berikut:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1aexbwcyA4l5xxK\\_RU\\_X6fEWcRsTj2faUj?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1aexbwcyA4l5xxK_RU_X6fEWcRsTj2faUj?usp=sharing)
- e. File artikel diberi nama:  
namapenulispertama\_artikelpkm\_namadesa\_kknunisda2022
- f. Deadline pelaporan submit artikel dan seluruh artikel kelompok paling lambat Hari *Jum'at, 02 September 2022*.

## **B. Penilaian**

Nilai akhir mahasiswa KKN 2022 didapatkan dari keseluruhan penilaian dari Panitia KKN UNISDA 2022, DPL, Kepala Desa. DPL dapat mempertimbangkan penilaian dari tokoh masyarakat maupun teman sejawat.

### **1. Komponen Penilaian**

Komponen penilaian terdiri dari empat komponen: a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), b. Penyusunan Program Kerja, c. Kegiatan Lapangan, d. Penyusunan Laporan Akhir Kelompok.

#### *a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)*

Penilaian di poin ini dinilai langsung oleh DPL masing-masing kelompok KKN 2022. Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut:

1. Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat dari awal hingga akhir sesi
2. Sikap peserta (disiplin, tanggung rasa, saling menghormati, jujur, mandiri, dan demokratis)
3. Keaktifan dalam pelatihan (mengemukakan pendapat/ bertanya)

#### *b. Penyusunan Program Kerja*

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut :

1. Kedalaman/ketajaman dalam menyusun analisis
2. Ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya masyarakat
3. Ketepatan dalam menyusun jadwal kegiatan
4. Ketepatan dalam menentukan sasaran dan strategi pelaksanaan

Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL.

#### *c. Kegiatan Lapangan*

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut :

1. Kehadiran dan keaktifan kegiatan di lapangan

2. Inovasi dan kreativitas dalam mengimplementasikan program kerja di lapangan
3. Sikap peserta (disiplin, tanggung jawab, jujur, demokratis, saling menghormati, menjaga nama baik almamater) di lapangan
4. Hasil pelaksanaan program kerja

Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL dengan mempertimbangkan masukan dari kepala desa/dusun dan teman sejawat.

*d. Penyusunan Laporan*

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut :

1. Ketepatan waktu menyerahkan laporan
2. Kesesuaian sistematika dan ketentuan laporan kelompok, artikel pengabdian kepada masyarakat dan video
3. Kualitas dan keorisinilan isi laporan kelompok artikel pengabdian kepada masyarakat dan video
4. Inovasi dan kreatifitas hasil laporan (keterbaharuan dan kebermanfaatan berkelanjutan)

Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL.

## **2. Pengolahan Nilai**

Penilaian pada tiap-tiap komponen menggunakan rentang 0 – 100. Adapun bobot penilaian tiap-tiap komponen penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan bobot 20%
- b. Penyusunan program kerja dengan bobot 10%
- c. Pelaksanaan kegiatan lapangan dengan bobot 40%
- d. Penyusunan laporan akhir dengan bobot 30%

Berdasarkan komponen penilaian dan pembobotannya, maka penghitungan nilai akhir KKN ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{2PL + PK + 4KL + 3LA}{10}$$

Keterangan :

*NA* : Nilai akhir KKN

*PL* : Pendidikan dan Pelatihan (diklat KKN)

*PK* : Program Kerja

*KL* : Kegiatan Lapangan

*LA* : Laporan akhir (laporan akhir kelompok, Proposal Program Kerja Unggulan, artikel, dan video)

### 3. Konversi Nilai dan Keputusan Kelulusan

Setelah dilakukan perhitungan nilai akhir KKN dalam rentang 0 – 100, penentuan nilai dalam rentang 0 – 4 dan ketentuan kelulusan kegiatan KKN ditetapkan sebagai berikut:

Rentang 0–100	Rentang 0–4	Huruf	Keterangan
91–100	4,00	A	Lulus
81–90	3,75	A-	Lulus
74–80	3,50	B+	Lulus
67–73	3,00	B	Lulus
61–66	2,50	C+	Lulus
54–60	2,00	C	Lulus
47–53	1,00	D	Tidak Lulus
0–46	0,00	E	Tidak Lulus

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

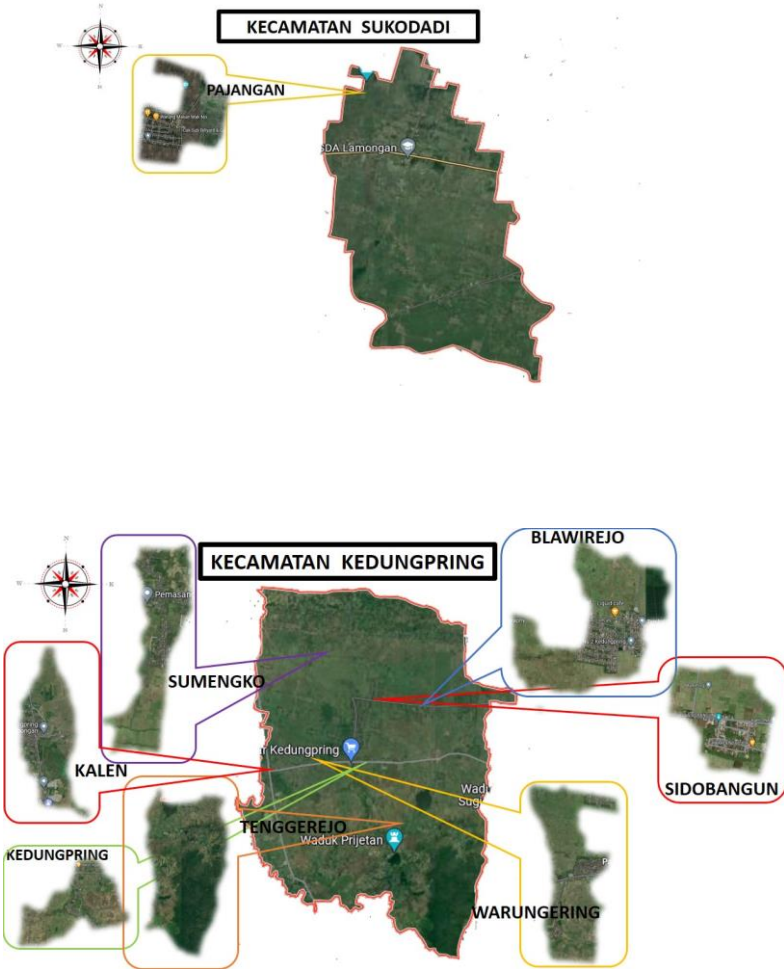
Segala hal yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan KKN Tahun 2022 Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan telah tertuang secara lengkap dalam buku Panduan yang disusun oleh Tim Diklat dan Tim Evaluasi KKN. Dengan hadirnya buku ini diharapkan pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan.

Pemberlakuan buku pedoman ini adalah sejak tanggal ditetapkannya, yang sasaran penggunaannya adalah peserta dan DPL KKN pada tahun ditetapkannya buku ini. Kekeliruan dan kesalahan merupakan hal yang wajar dalam setiap penyusunan buku, saran dan masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

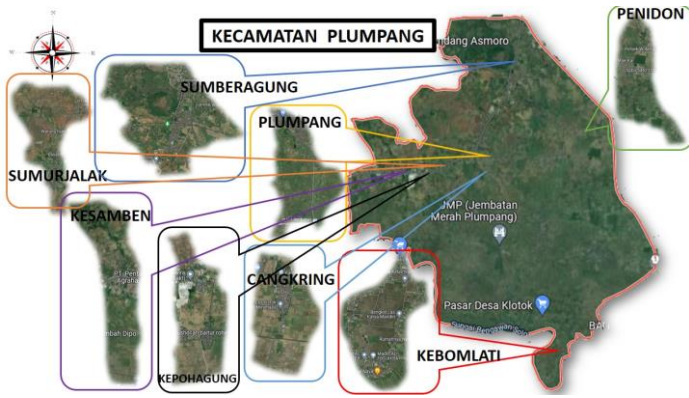
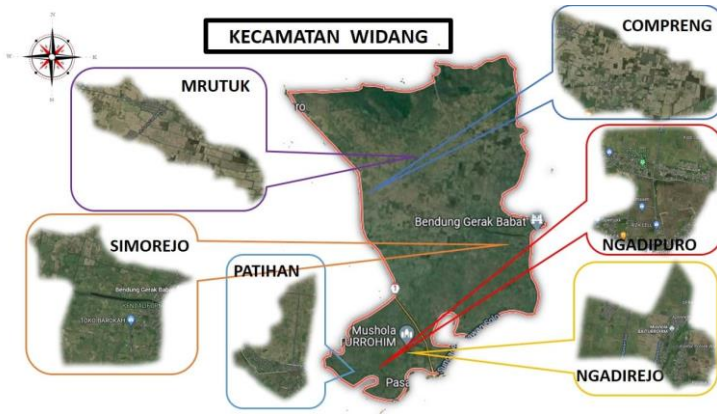
Hal-hal teknis yang tidak termuat dalam buku pedoman ini, Panitia KKN akan mengaturnya dalam bentuk surat pengumuman yang dipasang di laman website LPPM UNISDA Lamongan. Sebagai kalimat akhir, semoga ikhtiar untuk menyusun buku panduan KKN ini menjadi sedikit amal baik bagi tim penyusun yang dapat membawa manfaat untuk peningkatan kualitas pelaksanaan KKN di UNISDA Lamongan. *Aamiin.*

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I: LOKASI KKN**





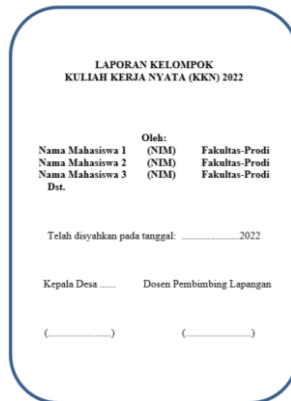
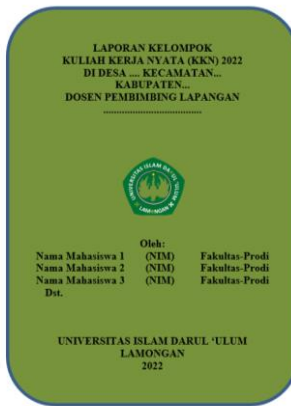


## LAMPIRAN 2: Format Laporan Kelompok KKN 2022

Laporan kelompok disusun mengikuti format sebagai berikut:

Huruf Times New Roman 12. Ukuran kertas A4 dengan margin normal semua sisi (2,54cm), Line and Paragraph Spacing 1,15cm. Cover warna Olive Green Accent 3, Darker 25%.

*Contoh Cover Laporan Akhir Kelompok dan Halaman Pengesahan*



## **Judul dan Identitas Kelompok**

Format Judul dan Identitas kelompok dituliskan secara lengkap sesuai dengan contoh diatas.

## **Halaman Pengesahan**

Format Halaman Pengesahan sesuai dengan contoh diatas dan diserahkan lengkap dengan tandatangan dan stempel dari Kepala Desa dan Tandatangan dari Dosen Pembimbing Lapangan.

## **Daftar Isi**

Daftar Isi berisi tentang semua bab dan sub-bab yang terdapat dalam laporan kelompok beserta nomor halamannya.

### **Bab 1. Profil Desa**

1. Menguraikan secara jelas potret dan kondisi masyarakat desa KKN
2. Menguraikan kondisi dan potensi wilayah dari bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan, agama, seni dan budaya, dan hukum dan kelembagaan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Mendeskripsikan hasil survey awal yang telah dilakukan, meliputi survey terhadap SDA, SDM, dan Kelembagaan.
4. Menjelaskan tentang Branding Desa yang diusulkan untuk Desa tempat KKN.

### **Bab 2. Program Kerja**

Uraikan secara jelas dan terperinci masing-masing Program kerja dari bidang KKN yang dipilih sesuai dengan bidang di program studi masing-masing peserta KKN 2022 yang telah disusun bersama dengan anggota kelompok dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan.

### **Bab 3. Pelaksanaan Program Kerja**

1. Menguraikan pelaksanaan masing-masing program kerja yang telah dan belum terlaksana yang terangkum dalam salah satu dan atau 3 bidang KKN Unisda 2022 dilengkapi dengan tanggal mulai dan akhir pelaksanaan berikut dokumentasi kegiatannya.

2. Menguraikan peluang dan hambatan dari masing-masing program kerja yang telah dan belum terlaksana (direkomendasikan semua program yang telah tersusun dapat terlaksana)
3. Menguraikan saran dan tindak lanjut dari program yang telah dan belum terlaksana

#### **Bab 4. Penutup**

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari kegiatan KKN Unisda 2022 yang telah dilaksanakan untuk kelanjutan program kerja setelah kegiatan KKN Unisda 2022 berakhir.

#### **Referensi**

Cantumkan semua referensi yang digunakan dalam pembuatan laporan akhir kelompok.

#### **Dokumentasi**

Lampiran berisi tentang Daftar Kehadiran Peserta KKN Unisda 2022 dan DPL, Buku Tamu dan foto-foto kegiatan mulai dari awal kegiatan KKN (Pemberangkatan) sampai akhir kegiatan KKN Unisda 2022 (dianjurkan untuk menggunakan kamera peta GPS).



## **LAMPIRAN 3: FORMAT PROGRAM KERJA UNGGULAN**

### **PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)**

#### **JUDUL PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT**



**Oleh:**

Nama Ketua Pengusul (NIDN)  
Nama Anggota Pengusul 1 (NIDN)  
Nama Anggota Pengusul 2 (NIDN)

**UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM  
LAMONGAN  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul :
2. Topik : *Desa Literasi/ Desa Wisata/Smart Village*
3. Ketua Pengusul :  
Nama Lengkap :  
NIDN :  
Program Studi/Jurusan :  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Darul Ulum Lamongan  
No. Telepon/HP :  
*E-mail* : ...@unisda.ac.id
4. Jumlah Anggota Pengusul (Orang): 2 orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra :  
Kelurahan/Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi : Jawa timur  
Jarak PT ke Lokasi desa (km) :  
Waktu tempuh PT ke lokasi :
6. Jangka waktu pelaksanaan (tahun) : 1 tahun
7. Biaya Total (Rp) : Rp. 50.000.000

Lamongan, ....

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Pengusul,  
Ketua Pengusul

Nama Lengkap  
NIDN

Nama Lengkap  
NIDN

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL PROPOSAL  
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL  
DAFTAR ISI  
RINGKASAN PROPOSAL  
PENDAHULUAN  
SOLUSI PERMASALAHAN  
METODE PELAKSANAAN  
LUARAN DAN TARGET CAPAIAN  
ANGGARAN  
JADWAL PELAKSANAAN  
DAFTAR PUSTAKA  
PERSETUJUAN / PERNYATAAN MITRA  
GAMBARAN IPTEK  
PETA LOKASI

## **RINGKASAN PROPOSAL**

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan.

Kata Kunci: Maksimal 5 kata



## **PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan.

### **Analisis Situasi:**

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut :

- a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif (contoh: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok ternak, industri rumah tangga dengan karyawan min. 4 orang dsb)
  - 1) Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
  - 2) Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra.
  - 3) Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra.
- b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif (contoh: kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok IRT, dsb)
  - 1) Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
  - 2) Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra.
  - 3) Uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha.
  - 4) Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra
- c. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial (contoh: PAUD/SD/SMP/SMA/SMK, Karang Taruna, RT/RW, dusun, desa, puskesmas/posyandu, pesantren, dsb)
  - 1) Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pekerjaan terjadi dan didukung dengan data dan gambar/foto.
  - 2) Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.

**Permasalahan Mitra:**

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan prioritas mitra yang mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.
- b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama.
- c. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
- d. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PKM.

**SOLUSI PERMASALAHAN**

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Hasil riset yang diterapkan kepada mitra.

- a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif / mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi / sosial.

- c. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- d. Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra.

- a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti permasalahan dalam bidang produksi, permasalahan dalam bidang manajemen, permasalahan dalam bidang manajemen, permasalahan dalam bidang pemasaran, dsb.
- b. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
- c. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
- d. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

## **LUARAN DAN TARGET CAPAIAN**

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan

menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju. Jenis luaran:

- a. Artikel ilmiah di jurnal terakreditasi
- b. Prosiding dari seminar internasional
- c. Video kegiatan
- d. Artikel pada media massa cetak/elektronik
- e. Peningkatan pemberdayaan mitra

### **ANGGARAN**

Anggaran biaya untuk investasi kepada mitra minimal 40% dari total anggaran (Rp. 50.000.000) dan anggaran untuk honor maksimal 20%. Rencana anggaran biaya PPM mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum. Jenis pembelanjaan antara lain:

- a. Honor
- b. Belanja barang non operasional yang lainnya
- c. Belanja bahan
- d. Belanja perjalanan lainnya

### **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal kegiatan harus rinci dan jelas meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dalam bentuk Barchart yang memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

### **PERSETUJUAN / PERNYATAAN MITRA**

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang

telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas materai Rp10.000 kemudian disimpan dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

### **GAMBARAN IPTEK**

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra, dilengkapi dengan flowchart penerapan IPTEKS, spesifikasi TTG/IPTEKS lainnya.

### **PETA LOKASI**

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul. Jarak maksimum adalah 200 km.

## **LAMPIRAN 4 . Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **PETUNJUK PENULISAN DAN PENGIRIMAN ARTIKEL JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (14pt Bold)**

Nama<sup>1\*</sup>, Nama<sup>2</sup> (12pt Bold)

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik,  
Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia  
(10pt Normal Italic)

\* Penulis Korespodensi : hendri@unimed.ac.id

Abstrak (12pt Bold)

Petunjuk ini merupakan format baru sekaligus template manuskrip/artikel yang digunakan pada artikel yang diterbitkan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat mulai penerbitan tahun 2014. Artikel diawali dengan Judul Artikel, Nama Penulis, Alamat Afiliasi Penulis, diikuti dengan abstrak yang ditulis dengan huruf miring (Italic) sepanjang 150-200 kata. Khusus untuk Abstrak, teks ditulis dengan margin kiri 35 mm dan margin kanan 30 mm dengan ukuran font 10 pt dan jenis huruf Times New Roman serta jarak antar baris satu spasi. Jika artikel berbahasa Indonesia, maka abstrak harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jika artikel berbahasa Inggris, maka abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris saja. Bagian Abstrak harus memuat inti permasalahan yang akan dikemukakan, metode pemecahannya, dan hasil-hasil temuan saintifik yang diperoleh serta simpulan. Abstrak untuk masing-masing bahasa hanya boleh dituliskan dalam

satu paragraf saja dengan format satu kolom.

Kata kunci: Abstrak, Ikhtisar, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Petunjuk Penulisan, Pola Artikel

### Abstract (12pt Bold)

This is a new author guidelines and article template of Teknik journal since year 2014 publication. Article should be started by Title of Article followed by Authors Name and Affiliation Address and abstract. This abstract section should be typed in Italic font and font size of 10 pt and number of words of 150-200. Special for the abstract section, please use left margin of 25 mm, top margin of 30 mm, right and bottom margins of 20 mm. The single spacing should be used between lines in this article. If article is written in Indonesian, the abstract should be typed in Indonesian and English. Meanwhile, if article is written in English, the abstract should be typed in English only. The abstract should be typed as concise as possible and should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, and short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.

Keywords: Abstract, Author Guidelines, Article Template, Journal of Communities-Based Service, Resume

## 1. Pendahuluan

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) LPM  
UNIMED (ISSN xxxx-xxxx;

<http://jurnal.unimed.ac.id/index.php/jpkm>) adalah blind and peer-reviewed journal yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dari berbagai disiplin ilmu rekayasa/keteknikan. Artikel-artikel yang dipublikasikan di JPKM LPM UNIMED meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli (prioritas utama), artikel ulasan ilmiah yang bersifat baru (tidak prioritas), atau komentar atau kritik terhadap tulisan yang ada di JPKM LPM UNIMED. JPKM diterbitkan oleh LPM UNIMED. JPKM menerima manuskrip atau artikel dalam bidang riset terapan dan pengabdian masyarakat dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional.

Artikel-artikel yang dimuat di JPKM adalah artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Mitra Bebestari (peer-reviewers). Mulai tahun 2016, JPKM hanya menerima artikel-artikel yang berasal dari hasil-hasil penelitian terapan berbasis kepada komunitas dan masyarakat dan artikel ulasan ilmiah yang bersifat baru (tidak prioritas) (Bekker dkk., 1999; Bezuidenhout dkk., 2009). Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di jurnal ini menjadi hak dari Dewan Penyunting berdasarkan atas rekomendasi dari Mitra Bebestari (Bhaktavatsalam & Choudhury, 1995).

## **2. Penulisan Judul, Nama dan Alamat Penulis**

Judul artikel, nama penulis (tanpa gelar akademis), dan alamat afiliasi penulis ditulis rata tengah pada halaman pertama di bawah judul artikel. Jarak antar baris antara judul dan nama penulis adalah 2 spasi, sedangkan jarak antara alamat afiliasi penulis dan judul abstrak adalah 1 spasi. Kata kunci harus dituliskan di bawah teks abstrak



untuk masing-masing bahasa, disusunurut abjad dan dipisahkan oleh tanda titik koma dengan jumlah kata 3-5 kata. Untuk artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia, tuliskan terjemahan judul dalam bahasa Inggris di bagian awal teks abstrak berbahasa Inggris (lihat contoh di atas).

Penulis Penanggungjawab atau Penulis Korespondensi atau Corresponding Author harus ditandai dengan tanda asterisk diikuti tanda koma “\*,” seperti contoh di atas. Di bagian bawah kolom kiri halaman pertama/abstrak harus dituliskan tanda Penulis Penanggungjawab atau Penulis Korespondensi atau Corresponding Author dan dituliskan pula alamat emailnya (lihat contoh). Komunikasi tentang revisi artikel dan keputusan akhir hanya akan dikomunikasikan melalui email Penulis Korespondensi.

Jika penulis lebih dari satu, tuliskan nama-nama penulis dengan dipisahkan oleh koma (,). Jika nama penulis terdiri dari dua kata, kata pertama penulis (first name) sebaiknya tidak disingkat. Jika nama penulis hanya terdiri dari satu kata, tuliskan nama sebenarnya dalam satu kata, namun demikian di versi online (HTML) akan dituliskan dalam dua kata yang berisi nama yang sama (berulang) untuk keperluan indeksasi metadata (Camdali & Tunc, 2006; Fridman, 2008).

### **3. Petunjuk Umum Penulisan Naskah Manuskrip**

Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan jurnal Teknik (dalam format MS Word, gunakan template artikel ini) harus dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini:

1. Pengiriman naskah manuskrip melalui E-mail ke email

Editorial Jurnal Teknik (jpkm@unimed.ac.id)

2. Pengiriman naskah manuskrip dengan Online Submission System di portal E-Journal JPKM (<http://jurnal.unimed.ac.id/index.php/jpkm>) setelah mendaftarkan sebagai Penulis dan/atau Reviewer di bagian “Register”.

Petunjuk submit manuskrip secara daring dapat dilihat di bagian Petunjuk Submit Online di bawah. Naskah manuskrip yang tidak sesuai petunjuk penulisan jurnal Teknik akan dikembalikan ke Penulis terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses penelaahan.

Naskah manuskrip yang ditulis harus mengandung komponen-komponen artikel ilmiah berikut (sub judul sesuai urutan), yaitu: (a) Judul Artikel, (b) Nama Penulis (tanpa gelar), (c) Alamat Afiliasi Penulis, (d) Abstrak dan Kata Kunci, (e) Pendahuluan, (f) Bahan dan Metode, (g) Hasil dan Pembahasan, (h) Kesimpulan, (i) Ucapan terima kasih (jika ada), dan (j) Daftar Pustaka.

Penulisan sub judul di bagian isi artikel (Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan) harus diberi nomor urut format angka Arab berurut dimulai dari angka satu. Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format Title Case dan disusun rata kiri tanpa garis bawah. Sub-sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format Sentence case dan disusun rata kiri dan menggunakan format penomoran level dua.

Naskah manuskrip dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan rentang jumlah kata antara 5000 – 7000 kata atau dalam jumlah halaman maksimum 15 halaman termasuk gambar dan tabel. Naskah manuskrip harus ditulis sesuai template artikel ini dalam

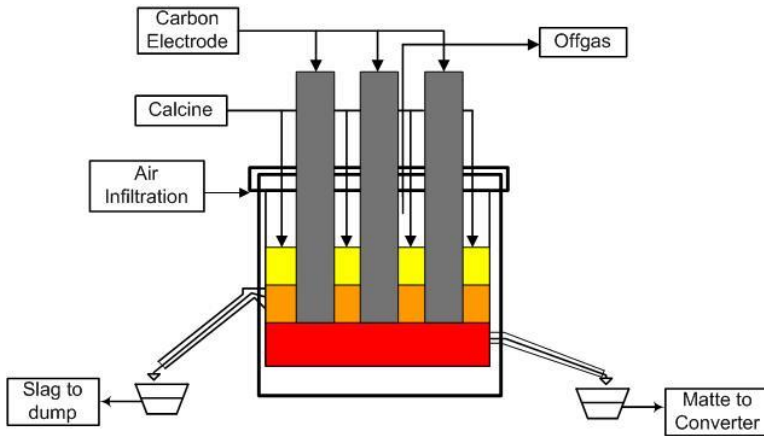
bentuk siap cetak (printed ready). Artikel harus ditulis dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan dengan format margin kiri 25 mm, margin kanan 20 mm, margin bawah 20 mm, dan margin atas 30 mm. Naskah harus ditulis dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 10 pt (kecuali judul artikel, nama penulis dan judul abstrak), berjarak satu spasi, dan dalam format dua kolom (kecuali bagian judul artikel, nama penulis, dan abstrak). Jarak antar kolom adalah sejauh 10 mm.

Kata-kata atau istilah asing digunakan huruf miring (*Italic*). Sebaiknya hindari penggunaan istilah asing untuk artikel berbahasa Indonesia. Paragraf baru dimulai 10 mm dari batas kiri, sedangkan antar paragraf tidak diberi spasi antara. Semua bilangan ditulis dengan angka Arab, kecuali pada awal kalimat.

Tabel dan Gambar diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi judul gambar (*Figure Caption*) di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomorurut angka Arab diikuti dengan judul gambar. Setiap tabel harus diberi judul tabel (*Table Caption*) dan bernomorurut angka Arab di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan judul tabel. Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran font, resolusi dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas). Gambar dan tabel dan diagram/skema sebaiknya diletakkan sesuai kolom diantara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman. Tabel tidak boleh mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horisontal diperbolehkan tetapi hanya yang penting-penting saja.

#### 4. Petunjuk Khusus Penulisan Isi Naskah Manuskrip

Judul Artikel: Judul Artikel harus dituliskan secara singkat dan jelas, dan harus menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dikemukakan, tidak memberi peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital secara simetris. Judul artikel tidak boleh mengandung singkatan kata yang tidak umum digunakan. Kemukakan terlebih dahulu gagasan utama artikel baru diikuti dengan penjelasan lainnya.



Gambar 1. Contoh gambar atau ilustrasi (Hovmand, 1995)

#### 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut. Di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka

sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (state of the art) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

## **2. BAHAN DAN METODE**

Bahan dan metode berisi bahan-bahan utama yang digunakan dalam penelitian dan metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Bahan-bahan yang dituliskan di sini hanya berupa bahan utama saja dan harus dilengkapi dengan merk dan kemurniannya (misalnya: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Merck, 99%)). Peralatan-peralatan yang dituliskan di bagian ini hanya berisi peralatan-peralatan utama saja dilengkapi dengan merk (misalnya: Furnace elektrik (Carbolite)). Komponen-komponen peralatan penunjang tidak perlu dituliskan. Rangkaian alat utama sebaiknya disajikan di bagian ini dilengkapi dengan keterangan gambar. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar (figure caption) bukan menjadi bagian dari gambar. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan

ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara saintifik, tidak hanya deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena dasar ilmiah yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum

80% dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan. Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, EndNote, atau Zotero, atau lainnya.

## **5. Panduan Penulisan Persamaan**

Setiap persamaan ditulis rata tengah kolom dan diberi nomor yang ditulis di dalam kurung dan ditempatkan di bagian akhir margin kanan. Persamaan harus dituliskan menggunakan Equation Editor dalam MS Word atau Open Office (Primack, 1983).

(1)

## **6. Panduan Penulisan Kutipan/Rujukan Dalam Teks Artikel**

Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan sumber rujukannya. Rujukan atau sitasi ditulis di dalam uraian/teks dengan cara nama penulis dan tahun (Irwan dan Salim, 1998). Jika penulis lebih dari dua, maka hanya dituliskan nama penulis pertama diikuti “dkk” atau “et al.” (Bezuidenhout dkk., 2009; Roeva, 2012). Semua yang dirujuk di dalam teks harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka, demikian juga sebaliknya, semua yang dituliskan di Daftar Pustaka harus dirujuk di dalam teks (Wang dkk., 2011).

## **7. Panduan Penulisan Daftar Pustaka**

Penulisan Daftar Pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, End Note, Zotero,

atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di jurnal Teknik adalah sesuai dengan format APA 6th Edition (American Psychological Association).

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Bekker, J. G., Craig, I. K., & Pistorius, P. C. (1999). Modeling and Simulation of Arc Furnace Process. *ISIJ International*, 39(1), 23–32.

Pustaka yang berupa judul buku:

Fridman, A. (2008). *Plasma Chemistry* (p. 978). Cambridge: Cambridge University Press

Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:

Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In *International Conference on Chemical and Material Engineering* (pp. 25–30). Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University.

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:

Istadi, I. (2006). Development of A Hybrid Artificial Neural Network – Genetic Algorithm for Modelling and Optimization of Dielectric-Barrier Discharge Plasma Reactor. PhD Thesis. Universiti Teknologi Malaysia.

Pustaka yang berupa patent:

Primack, H.S. (1983). Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions. US Patent No. 4,373,104

Pustaka yang berupa HandBook:



Hovmand, S. (1995). Fluidized Bed Drying. In Mujumdar, A.S. (Ed.) Handbook of Industrial Drying (pp.195-248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker.

## **8. Petunjuk Submit Manuskrip Secara Online**

Naskah manuskrip harus dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini (cara yang kedua lebih diutamakan):

1. Pengiriman naskah manuskrip sebaiknya dengan Online Submission System di portal E-Journal Teknik (<http://jurnal.unimed.ac.id/index.php/jpkm>)
2. Pertama Penulis mendaftarkan sebagai Penulis dan/atau Reviewer (mencentang role sebagai Author dan/atau Reviewer) di bagian “Register” atau alamat: <http://jurnal.unimed.ac.id/index.php/jpkm>
3. Setelah Penulis login sebagai Author, klik di “New Submission”. Tahapan submit artikel terdiri dari 5 tahapan, yaitu: (1). Start, (2). Upload Submission, (3). Enter Metadata, (4). Upload Supplementary Files, (5). Confirmation
4. Di bagian Start, pilih Jurnal Section (Full Article), centang semua ceklist.
5. Di bagian Upload Submission, silakan unggah file manuskrip artikel dalam MS Word di bagian ini.
6. Di bagian Enter Metadata, masukkan data-data semua Penulis dan afiliasinya, diikuti dengan judul dan abstrak, dan indexing keywords.
7. Di bagian Upload Supplementary Files, diperbolehkan mengunggah file data-data pendukung atau surat pengantar atau dokumen lainnya.
8. Di bagian Confirmation, silakan klik “Finish Submission” jika semua data sudah benar.

9. Jika penulis kesulitan dalam proses pengiriman naskah melalui sistem daring, naskah manuskrip dapat juga dikirimkan melalui E-mail ke email Editorial JPKM LPM UNIMED (jpkm@unimed.ac.id), namun demikian metode ini tidak direkomendasikan.

## **9. Kesimpulan**

Setiap artikel yang dikirimkan ke kantor editorial jurnal Teknik harus mengikuti petunjuk penulisan ini. Jika artikel tersebut tidak sesuai dengan panduan ini maka tulisan akan dikembalikan sebelum ditelaah lebih lanjut.

## **Ucapan Terima Kasih**

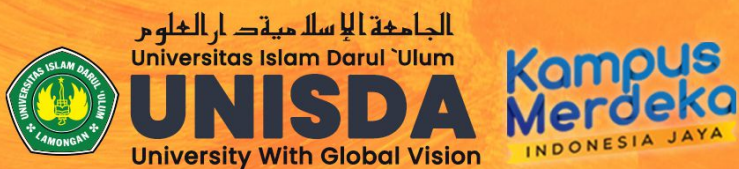
Terima kasih disampaikan kepada LPM yang telah mendanai keberlangsungan jurnal ini.

## **Daftar Pustaka**

- Bekker, J. G., Craig, I. K., & Pistorius, P. C. (1999). Modeling and Simulation of Arc Furnace Process. *ISIJ International*, 39(1), 23–32.
- Bezuidenhout, J. J., Eksteen, J. J., & Bradshaw, S. M. (2009). Computational fluid dynamic modelling of an electric furnace used in the smelting of PGM containing concentrates. *Minerals Engineering*, 22(11), 995–1006.
- Bhaktavatsalam, A. K., & Choudhury, R. (1995). Specific Energy Consumption in The Steel Industry. *Energy*, 20(12), 1247–1250.
- Camdali, U., & Tunc, M. (2006). Steady State Heat Transfer of Ladle Furnace During Steel Production Process.

- Journal of Iron and Steel Research, International, 13(3), 18–20.
- Fridman, A. (2008). Plasma Chemistry (p. 978). Cambridge: Cambridge University Press
- Hovmand, S. (1995). Fluidized Bed Drying. In Mujumdar, A.S. (Ed.) Handbook of Industrial Drying (pp.195-248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker.
- Istadi, I. (2006). Development of A Hybrid Artificial Neural Network – Genetic Algorithm for Modelling and Optimization of Dielectric-Barrier Discharge Plasma Reactor. PhD Thesis. Universiti Teknologi Malaysia
- Primack, H.S. (1983). Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions. US Patent No. 4,373,104
- Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In International Conference on Chemical and Material Engineering (pp. 25–30). Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University.
- Wang, Z., Wang, N. H., & Li, T. (2011). Computational analysis of a twin-electrode DC submerged arc furnace for MgO crystal production. Journal of Materials Processing Technology, 211(3), 388–395.

“ **UNISDA**  
Berkontribusi,  
Desa  
**BERGERAK**  
Mandiri ”



📍 Jl. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan 62253  
☎ 0322 390497 ✉ [humas@unisda.ac.id](mailto:humas@unisda.ac.id) 🌐 [www.unisda.ac.id](http://www.unisda.ac.id)